



LAPORAN PENELITIAN

NELAYAN TRADISIONAL DI MADURA (Studi Sosial-Budaya terhadap Aktivitas Pekonomian di Desa Bandaran Kabupaten Pamekasan)

Oleh:

**H. Karjadi Mintaroem
Mohammad Imam Farisi**

**Dibiayai dari Dana Penelitian Pusat Studi Indonesia Berdasarkan Surat
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 4666/J31. 2. 3/PG/2000
Tanggal 29 Mei 2000**

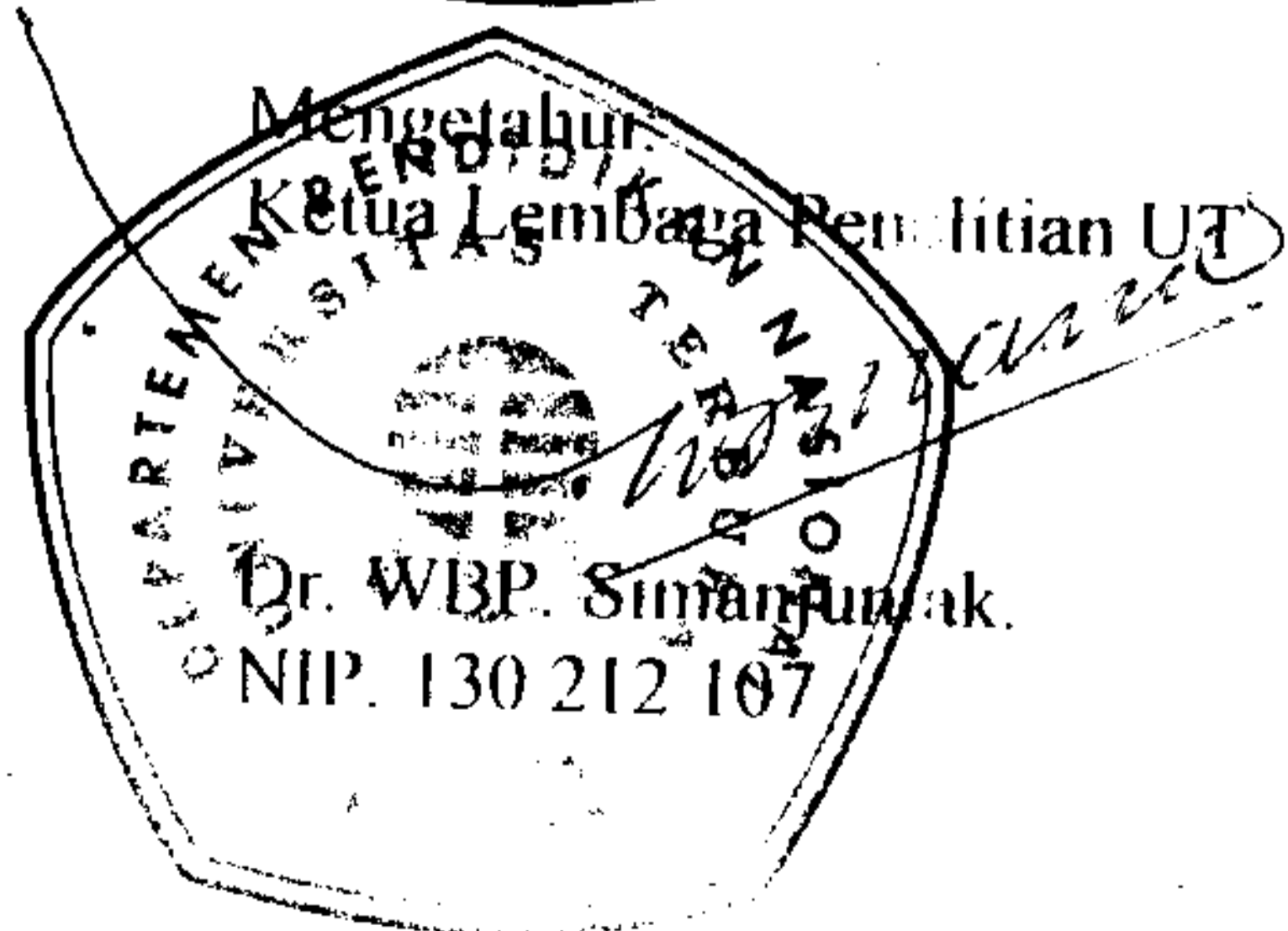
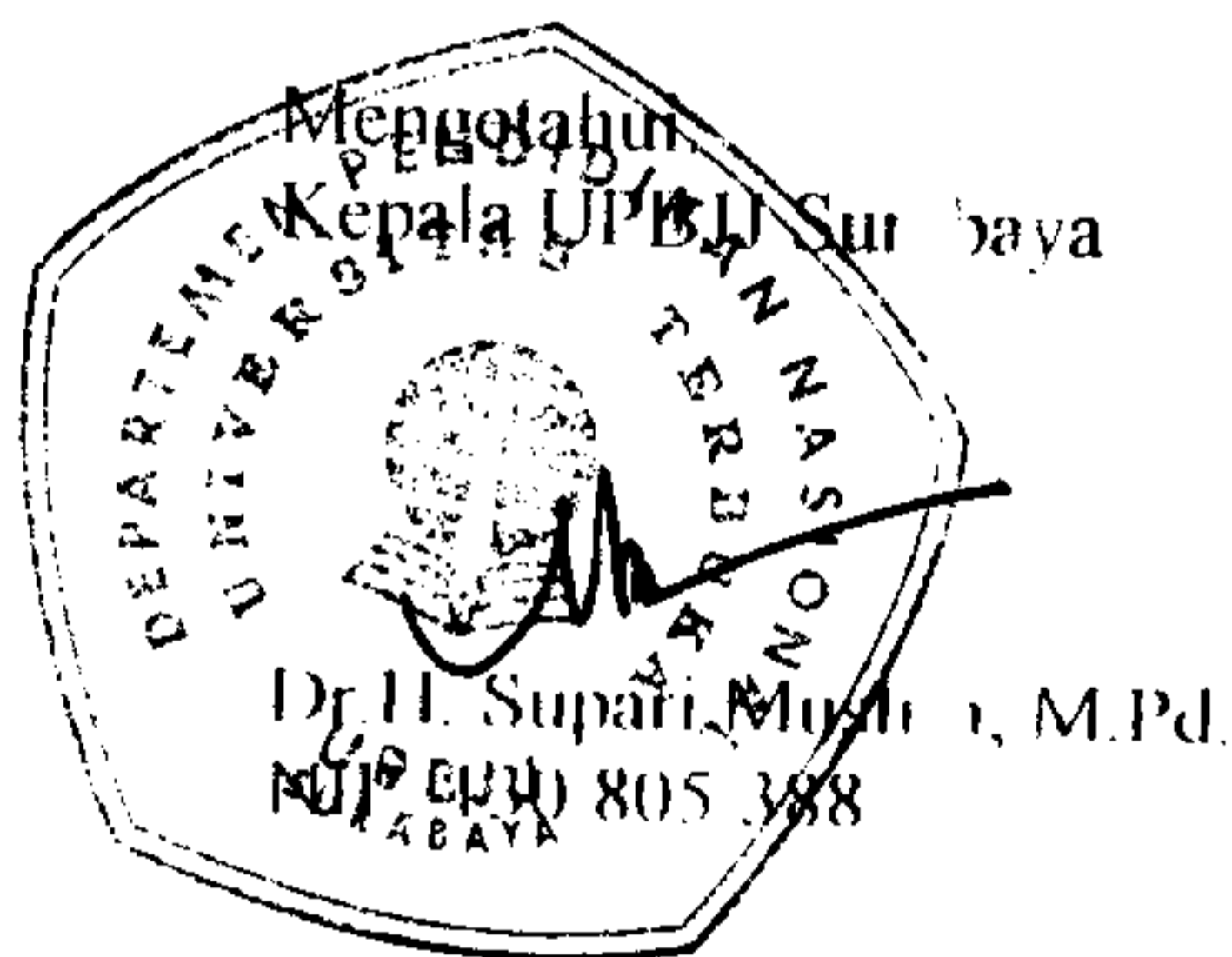
**UNIVERSITAS TERBUKA
LEMBAGA PENELITIAN – PUSAT STUDI INDONESIA
2001**

*kaator:
môngghu dha' sadajana reng majheng
se abantal omba', asapo' angen
salanjangnga*

*untuk:
para nelayan
yang senantiasa berbantal ombak, dan berselimutkan angin*

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

- 1.a. Judul Penelitian : NELAYAN TRADISIONAL DI MADURA
(Studi Sosial-Budaya dalam Aktivitas Perekonomian di Desa Bandaran Kabupaten Pamekasan)
- b. Macam Penelitian : Penelitian Kualitatif
- c. Kategori Penelitian : Penelitian Keilmuan/ Keindonesiaan
2. Peneliti Utama:
- a. Nama Lengkap : Drs.Ec. H. Karjadi Mintaroem, MS.
- b. NIP : 130 517 150
- c. Jenis Kelamin : Laki - laki
- d. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
- e. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
- f. Unit Kerja : UPBJJ Surabaya
- g. Fakultas : FEKON
3. Anggota Tim Peneliti
- a. Jumlah anggota : 1 (satu) orang
- b. Nama anggota/unit kerja : Drs. Moh. Imam Farisi, M.Pd. (UPBJJ Surabaya)
4. Lokasi Penelitian : Desa Bandaran, Kabupaten Pamekasan.
5. Lama Penelitian : 12 bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
7. Sumber Biaya : Pusat Studi Indonesia Universitas Terbuka



Ketua Peneliti,

Drs Ec. H. Karjadi Mintaroem, MS.
NIP. 130 517 150

Meyetujui:
Kepala Pusat Studi Indonesia UT

Dr. Tian Belawati
NIP. 131 569 974

NELAYAN TRADISIONAL DI MADURA
(Studi Sosial-Budaya dalam Aktivitas Perekonomian di Desa Bandaran
Kabupaten Pamekasan)

Identitas

Bidang ilmu	: Sosial - Ekonomi
Judul	: Nelayan Tradisional di Madura: Studi Sosial-Budaya dalam Aktivitas Perekonomian di Desa Bandaran Kabupaten Pamekasan)
Penulis	: Karjadi Mintaroem dan Mohammad Imam Farisi.
Tahun	: 2001
Sumber abstrak	: Laporan hasil penelitian
Lokasi laporan	: Lembaga Penelitian – UT

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang kaitan timbal-balik antara konteks dan aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat setempat dengan aktivitas penangkapan ikan serta pengembangan struktur perekonomian pada masyarakat desa tradisional

Pada tataran teoretik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan tambahan referensi teoretik tentang konteks dan dimensi-dimensi sosial dan budaya dalam suatu kehidupan “*masyarakat marjinal*”, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan perekonomian di tingkat lokal.

Sedangkan pada tataran praktik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Pamekasan-Madura) yang bertumpu pada faktualitas dan dinamisme sosial dan budaya setempat.

Lokasi dan latar penelitian adalah masyarakat nelayan tradisional di desa Bandaran Kabupaten Pamekasan. Pendekatan dan metode penelitian menggunakan “*fenomenologi*”, atau di dalam sosiologi dinamakan “*metode verstehende*”, yang meletakkan makna “kemengertian” atau “kepemahaman” (*verstehen*) terhadap obyek dilihat dari sudut pandang obyek itu sendiri. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, catatan lapangan (*field notes*), dan dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Studi ini menunjukkan bahwa organisasi dan pola relasi kerja baik antara *jrghan perahu*, *jrangan kepala* dan *phandiga*, atau antar anggota nelayan sendiri, terjadi bukan dalam kerangka hubungan kerja antara “atasan” dan “bawahan” yang bersifat “hubungan pengabdian”, tetapi lebih bersifat “kolegialisme” dan “kekeluargaan”, sangat longgar, terbuka, suka-hati dengan pengklasifikasian sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing.

Pelaku-pelaku ekonomi terdiri dari para juragan, bakul dan tengkulak ikan. Mereka berasal dan memiliki jaringan hanya di tingkat lokal. Hubungan di antara mereka sebagian merupakan hubungan “patron-klien” yang cenderung melahirkan “ketergantungan ekonomis” bagi umumnya para nelayan. Sistem pengelolaan uang dan modal cenderung terjadi di dalam “lembaga-lembaga keuangan informal” yang bersifat “kuasi investasi” seperti arisan dan titip uang. Semua itu,

merupakan sejumlah karakteristik terpenting dari masyarakat desa nelayan tradisional di desa Bandaran, namun juga justru yang telah memungkinkan struktur ekonomi di desa mereka dapat dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan ekonomi lokal atau secara “berswasembada”.

Sosok “nelayan tradisional” Madura di desa Bandaran, kurang memiliki orientasi ke masa depan, atau tidak menginginkan hal-hal yang “*jlimet*” lainnya, terkait erat dengan sikap mereka yang memandang bahwa “bekerja adalah sekedar untuk hidup” (*alako reya kaangguy odhi*). Apa yang diperoleh sekarang gunakan untuk hari ini, besok kerja lagi (*sateya sateya, lagghu' lagghu*). Berhemat dan berinvestasi belum menjadi budaya umumnya masyarakat nelayan Bandaran. Dengan sikap hidup demikian, kerja keras adalah “tradisi”; tiada hari tanpa kerja adalah “motto” hidup keseharian masyarakat nelayan tradisional Desa Bandaran.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
BAB I: Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II: Tinjauan Pustaka	
A. Struktur Ekonomi “Desa Tradisional”	6
B. Dimensi Sosial-Budaya dalam Aktivitas Perekonomian Masyarakat “Desa Tradisional”	8
C. Studi tentang Segi-segi Sosial-Budaya dalam Aktivitas Perekonomian Masyarakat “Desa Tradisional”	9
BAB III: Metodologi Penelitian	
A. Pemilihan Lokasi Penelitian	13
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	14
BAB IV: Hasil dan Pembahasan	
A. Bandaran: Sebuah Desa Nelayan yang Sedang Berkembang..	17
B. Sistem Penangkapan Ikan di Laut	26
C. Pola Relasi dan Jaringan Penjualan Ikan	53
D. Kepemimpinan Ekonomi dan Pengembangan Struktur Ekonomi Lokal	60
BAB V: Penutup	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Desa Bandaran	18
2. Perkampungan Nelayan Desa Bandaran di Kedua Sisi Jalan Raya Pamekasan - Sampang.....	20
3. Perumahan Nelayan di Pinggir Laut dengan Sebuah Gardu Tempat Menantikan Para Nelayan Kembali ke Darat	20
4. Salah Satu Mesjid yang Terletak di Kampung Sumber Wangi II Desa Bandaran	23
5. Kantor Kepala Desa Bandaran	23
6. Gedung SDN. Bandaran II No. 423, dan Pusat Kegiatan Guru (PKG)	24
7. Bentuk “Bagan” sebagai Salah Satu Jenis Penangkapan Ikan di Daerah Perairan Dangkal dan Landai.....	27
8. Sistem Penangkapan Ikan di Sekitar Rumah-rumah Ikan Buatan dengan “ <i>Jaring Sethet</i> ”	29
9. Sistem Penangkapan Ikan dengan “ <i>Jaring Lingkar</i> ”	32
10. “ <i>Edher</i> ”, Salah Satu Jenis Perahu Penangkap Ikan.....	33
11. Berbagai Jenis Perahu Penangkap Ikan yang Digunakan Nelayan Desa Bandaran.....	33
12. Kapal Sleret Akan Melaut, dan Perahu Nelayan Yang Baru Datang	34
13. Pak Rusdi, Salah Seorang Juragan di Atas Kapal Sleret “se Mega” Miliknya	36
14. Tukang Perahu dan Para Pekerja Pembantunya sedang membuat Kapal/Perahu.....	38
15. Sosok Nelayan Tradisional Desa Bandaran	54
16. Pasar Lokal Tempat Penjualan Ikan di Pinggir Jalan Raya Pamekasan – Sampang.....	60
17. Sosok Para “Bakul Ikan” Desa Bandaran	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, ada kecenderungan bahwa kajian-kajian tentang kehidupan sosial-ekonomi tidak lagi terkonsentrasi pada masyarakat daerah-daerah perkotaan. Medan penelitian telah beralih ke daerah-daerah pinggiran, baik di tingkat lokal maupun regional yang masih sangat kuat bertahan pada basis sosial dan ekonomi tradisional yang bercirikan “*agraris*” dan “*padat karya*”.

Pada sisi lain, walaupun dalam tahun-tahun yang lampau, ketika studi-studi sosiologis dan antropologis telah banyak mencurahkan perhatian pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat nusantara, namun hanya sedikit sekali yang memfokuskan kajiannya pada pola-pola dan praktik-praktik ekonomi yang dikelola dan dipimpin oleh “*penduduk pribumi*” dengan bentuk-bentuk relasi dan jaringan ekonomi yang bersifat “*internal*”. Pada umumnya tekanan kajian mereka banyak diletakkan pada peranan orang-orang Eropa daripada penduduk pribumi sendiri (*lihat*. Geertz, 1963; Burger, 1980). Van Leur (1967) dan Schrieke (1955-1957)-lah yang memandegani kajian-kajian sosial-ekonomi dengan mencoba menempatkan arti penting orang-orang Asia (Indonesia) dalam aktivitas dan jaringan ekonomi (perdagangan) dunia. Hanya sayangnya studi-studi tersebut dilakukan pada masa-masa pra-kolonial dan kolonial.

Studi-studi terpenting mengenai relasi dan jaringan ekonomi (perdagangan) “setempat dan regional” telah dimulai oleh Dewey dalam karyanya “*Peasant Marketing in Java*” (1962), dan Geertz, melalui karyanya “*Peddlers and Princes*” (1963). Kedua peneliti ini, mencoba menghubungkan aktivitas-aktivitas para pedagang dan para wiraswastawan dengan keadaan ekonomi umum di dalam sebuah masyarakat yang sedang berubah, dan secara luas menguraikan keterkaitannya dengan konteks sosial-budaya dari peristiwa ekonomi tersebut.

Pulau Madura, sebagai “*daerah marjinal*”, dan salah satu dari banyak pulau di Nusantara yang dipersiapkan untuk menjadi daerah-daerah pertumbuhan sosial-ekonomi lokal atau regional baru, juga tidak luput dari kajian para ahli. Dari kepustakaan yang ada, penelitian-penelitian ke-Madura-an lebih banyak menyoroti kehidupan masyarakat petani/pertanian, baik yang yang berfokus pada kehidupan sosial-ekonomi (Kuntowijoyo, 1980; Leunissen, 1982, 1989; Touwen-Bouwsma, 1989a; Smith, 1989); sosial-budaya (de Jonge, 1977; Bouvier, 1987), sosial-politik (Kuntowijoyo, 1980, 1993; Touwen-Bouwsma, 1989b; de Jonge, 1989b), maupun

yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan (Islam) (de Jonge, 1989; Kuntowijoyo, 1989; Akhmad Khusyairi, 1989). Sedangkan penelitian-penelitian pada latar kehidupan masyarakat pesisiran relatif sedikit, itu pun tidak sepenuhnya berkenaan dengan aktivitas para nelayan di bidang perikanan laut, kecuali penelitian yang dilakukan oleh de Jonge (1989c). Sedangkan Munir (1985), dan Muljono (1985) memfokuskan diri pada studi tentang ritus kematian, dan adat sekitar kelahiran pada masyarakat nelayan Madura.

Banyaknya minat para peneliti baik yang berasal dari Eropa maupun dalam negeri, menunjukkan bahwa Pulau Madura dengan segala aspek kehidupannya yang sangat khas, cukup menarik untuk dikaji dan layak ditampilkan dalam wacana ilmiah. Dari penelitian-penelitian itu pula terdapat benang merah bahwa betapa penting kajian-kajian pada tingkat lokal/regional, dan betapa posisi dan peran mereka yang sering "*dimarjinalkan*" cukup penting dalam konstalasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di tingkat nasional.

Sebagai contoh kasus, sudi antropologi-ekonomi tentang kehidupan ekonomi (tepatnya tentang relasi antara Islam dan komersialisasi) oleh Huub de Jonge (*Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. 1989) telah menunjukkan betapa Pulau Madura secara berangsur-angsur namun pasti dilibatkan dalam lalu-lintas komersialisasi di Nusantara, serta betapa erat relasi antara Islam, para saudagar dan berbagai persekutuan dagang (*Gema*)—khususnya tembakau—dalam menciptakan perubahan sosial-ekonomis masyarakat Madura, dan kontribusinya bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sementara itu pula, Kuntowijoyo (1980; 1989) juga telah mengkaji tentang proses terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat agraris, arti penting Islam di dalam proses perubahan sosial yang terjadi, beserta dampak-dampak politisnya baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Bagaimanapun, studi de Jonge (1989a) tentang peranan pedagang dan berbagai persekutuan dagang dalam proses perubahan ekonomi di dalam masyarakat pesisiran Madura ini, sangat berarti dan memberikan inspirasi bagi kami. Dalam pengertian tertentu, penelitian ini memiliki kaitan dengan studi de Jonge tersebut. Setidak-tidaknya, karena penelitian ini juga memfokuskan diri pada kajian ekonomis (perdagangan), serta relasi dan jaringan perdagangan internal di tingkat lokal. Hanya, de Jonge tidak memasukkan peran petani (tembakau) sebagai mata rantai pertama dalam aktivitas ekonomi/perdagangan lokal, serta aspek-aspek sosial dan kultural dalam aktivitas ekonomi/perdagangan masyarakat setempat dalam kajiannya (*lihat juga*. De Jonge, 1989b).

Selain itu juga, meskipun tidak seluruhnya, rendahnya akselerasi pertumbuhan ekonomi/perdagangan di Madura khususnya dan di Indonesia pada umumnya, hingga dewasa ini, dapat dihubungkan dengan alasan-alasan sosiologis dan kultural, di samping faktor-faktor ekonomi sendiri (*periksa: Geertz, C., 1956, 1963; Geertz, H., 1981; McVey, 1963; Wertheim, 1959; Koentjaraningrat, 1969; Castles, 1982; dan de Jonge, 1989b*).

Pada sisi lain, secara statistik aktivitas perekonomian masyarakat Madura di sektor perikanan laut, merupakan sektor ekonomi terpenting kedua setelah sektor pertanian. De Jonge (1989c) menyatakan bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk Madura, terdapat sekitar 8% yang bermatapencaharian pokok sebagai nelayan. Jumlah tersebut akan lebih besar bila ditambah dengan jumlah yang hampir sama dari mereka yang menjadikan nelayan sebagai matapencaharian sambilan. Suatu jumlah, yang diperkirakan hampir seperempat dari seluruh nelayan yang ada di Jawa dan Madura.

Studi de Jonge (1989c) tentang hubungan ketergantungan di dalam perikanan di Madura, merupakan studi yang sangat baik dan berhasil di dalam memetakan rintangan-rintangan ekonomis bagi pengembangan sektor perikanan di Madura. Akan tetapi, seperti halnya pada penelitian-penelitian ke-Madura-an di atas, kajian-kajian terhadap aspek-aspek sosiologis dan kultural dari aktivitas ekonomi mereka sama sekali kurang mendapatkan perhatian.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan diri pada kajian tentang “konteks dan aspek-aspek sosial dan kultural di dalam suatu peristiwa/aktivitas perekonomian masyarakat (nelayan) tradisional” di bagian selatan pulau Madura; tepatnya, pada masyarakat nelayan di pesisir utara selat Madura, yang terletak sekitar 20 Km sebelah barat daya kota Pamekasan.

Studi tentang konteks dan aspek-aspek sosial dan budaya setempat pada aktivitas/peristiwa di dalam suatu masyarakat (ekonomi, politik, dan sebagainya), secara teoretik merupakan suatu kajian yang bersifat *transdisipliner* dan atau *interdisipliner*. Studi ini merupakan kajian kombinatif yang mencoba menemukan keberkaitan atau keberpengaruhannya antara peluang-peluang atau alokasi-alokasi ekonomis dengan sumber-sumber sosial dan budaya di dalam konteks kehidupan suatu kelompok masyarakat (pesisiran).

Dengan perkataan lain, studi ini akan mengkaji bagaimana upaya masyarakat nelayan tradisional setempat mencapai tujuan-tujuan ekonominya,

bagaimana mereka berupaya menemukan dan mengembangkan strategi-strategi ekonomi dalam menciptakan suatu perubahan ekonomi (struktur dan sistem) baik pada sektor ekonomis maupun non-ekonomis (de Jonge, 1977).

Pada tingkat mikro-sosiologis, studi ini berkaitan erat dengan upaya untuk “mencapai akses-akses ke dalam *dunia pemikiran/konseptual* di mana masyarakat yang diselidiki hidup” (Geert, dalam Niel Mulder, 1984:xviii). Pendekatan sosial dan budaya ini, menyelidiki nilai-nilai, konsepsi-konsepsi, dan paham-paham sosial yang membimbing tindakan para anggota masyarakat dan yang memberi makna pada pengalaman dan lingkungannya, yang diejawantahkan pada perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan *ekspresif* di dalam kehidupan sosial keseharian mereka. Nilai-nilai, konsepsi-konsepsi, dan paham-paham sosial tersebut berfungsi sebagai *institusi-institusi paradigmatik* yang merupakan sebuah “konstruksi kepercayaan sosial”. Konstruksi-konstruksi tersebut tidak lain merupakan hasil pemaknaan masyarakat terhadap pengalaman sosial mereka. Oleh karena itu, perilaku atau tindakan yang muncul sering kali diindikasikan oleh keterlibatan emosional yang kuat. Dengan demikian, maka institusi-institusi paradigmatik tersebut menjadi ruang gerak (*lebensraum*) di dalam mana tindakan-tindakan atau gejala-gejala perilaku—lama atau baru--ditafsirkan, dan dipahami.

Nilai-nilai, konsepsi-konsepsi, dan paham-paham tersebut bersifat kenyal dan temporal, atau senantiasa berubah sesuai dengan hakikat dari realitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan sosial dan budaya harus senantiasa memahami tindakan-tindakan ekspresif mereka, dengan pelbagai dimensi perubahannya, di samping pada pemahaman terhadap nilai-nilai, konsepsi-konsepsi, dan paham-paham tertentu yang masih cenderung bertahan dan melembaga.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka persoalan pokok yang hendak dikaji di dalam penelitian ini adalah “bagaimana konteks dan aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat setempat secara *resiprokal* berkaitan/berpengaruh pada aktivitas ekonomi nelayan tradisional setempat, serta bagaimana struktur perekonomian masyarakat setempat dibangun dan dikembangkan atas dasar kehidupan sosial dan budaya mereka”.

Secara rinci, persoalan pokok di atas, dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) bagaimana sistem penangkapan ikan nelayan tradisional setempat?
- (2) bagaimana organisasi, pola relasi jaringan kerjasama antar-nelayan pada masyarakat nelayan tradisional?

- (3) bagaimana pola relasi jaringan kerjasama di antara para pelaku ekonomi di sektor perdagangan ikan pada masyarakat nelayan tradisional?, serta
- (4) bagaimana pola dan peranan kepemimpinan ekonomi setempat dalam mengembangkan perekonomian pada masyarakat nelayan tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menemukan berbagai konstruksi teoretik tentang “keberkaitan dan atau keberpengaruhan secara *resiprokal* dari konteks dan aspek-aspek sosial dan budaya setempat pada aktivitas perekonomian masyarakat nelayan tradisional di Madura, baik yang ditampakkan pada: sistem penangkapan ikan oleh para nelayan tradisional setempat; relasi dan jaringan kerja antar-nelayan; relasi dan jaringan kerja secara ekonomis antara nelayan dengan para pedagang, dan atau para pelaku ekonomi lain; serta pola kepemimpinan ekonomi setempat, di dalam membangun dan mengembangkan sistem dan struktur perekonomian masyarakat setempat.

D. Manfaat Penelitian

Pada tataran teoretik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan tambahan referensi teoretik tentang konteks dan dimensi-dimensi sosial dan budaya dalam suatu kehidupan “*masyarakat marjinal*”, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan perekonomian di tingkat lokal.

Sedangkan pada tataran praktik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Pamekasan-Madura) yang bertumpu pada faktualitas dan dinamisme sosial dan budaya setempat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian-penelitian sosial pada dasarnya bersifat deskriptif-kualitatif, dan oleh karena itu tidak *apriori* menentukan teori, atau memastikan terlebih dahulu teori-teori yang akan dijadikan pegangan di lapangan (Nasution, 1982). Teori-teori yang ada meskipun dimaksudkan untuk menjelaskan sebuah realitas sosial, namun penerapannya secara langsung dan logis akan menimbulkan “bias teori” sehingga hasil penelitian akan terlepas dari obyeknya (Niel Mulder, 1984:3).

Namun demikian, tidak berarti bahwa penelitian kualitatif sama sekali tidak memerlukan teori. Untuk mengkaji atau mendalami konstruk fenomena empirik yang akan dikaji, bagaimanapun peneliti memerlukan konstruksi teoretik yang dipandang oleh peneliti dapat membantu mendekati obyek penelitiannya. Namun seorang peneliti *tidak berpegang pada satu teori tertentu*, dan tidak berusaha untuk melakukan *uji-empirik* atas kebenaran teori yang ada.

Konstruksi teoretik lebih dimaksudkan sebagai “*tacit knowledge*” (Nasution, 1980), atau *konstruk lapis dua*—meminjam *terminasi Schutzian* (Ritzer, 1992)—yang berfungsi sebagai *stok pengetahuan peneliti*, utamanya teori-teori yang dipandang memiliki struktur makna yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu tentang “keberkaitan/keberpengaruhannya konteks dan aspek-aspek sosial dan budaya pada peristiwa/aktivitas perekonomian masyarakat”. Dengan konstruksi teoretik yang dimiliki, peneliti akan memiliki kepekaan konseptual terhadap medan atau peta permasalahan yang hendak dikaji.

A. Struktur Ekonomi “Desa Tradisional”

Dalam sebuah “buku kecil” berjudul “*The Interest of the Voiceless Far East: Introduction to Oriental Economics*”, yang diterbitkan di Leiden pada tahun 1948—versi Indonesia tahun 1983, Boeke menyadarkan kepada kita bahwa dalam berbagai kajian tentang ekonomi, kedudukan, peran dan arti desa tradisional hampir-hampir terabaikan. Kalaupun disinggung, sejauh desa tradisional itu mulai terlibat atau terkait dalam permasalahan perekonomian kota. Desa tradisional senantiasa hanya dijadikan “obyek” atau dalam posisi tersubordinasi oleh kota. Padahal, menurut Boeke, bagi masyarakat negara berkembang (*developing countries*) yang berbasis pada sektor pertanian-agraris, desa tradisional memiliki

kedudukan dan telah memainkan arti penting bagi masyarakatnya di dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekonomis mereka. Bahkan, walaupun pada *medio* abad 20-an gerakan ekonomi perkotaan telah mulai menembus tembok kehidupan ekonomi pedesaan, ternyata desa tradisional tetap mampu mempertahankan prinsip-prinsip, pandangan-pandangan “ekonomi pedesaan”-nya atas dasar kekuatan-kekuatan internal yang dimiliki, yaitu “ekonomi swasembada”, yang oleh Boeke diistilahkan sebagai “ekonomi prakapitalis” (*pracapitalism economy*). Atas dasar prinsip keswasembadaan ini pulalah, ketika berbagai krisis yang melanda di berbagai sektor ekonomi perkotaan (produksi, perdagangan, perniagaan, dan lain-lain) telah mencentangkan sendi-sendi kekuatan ekonomi mereka yang berbasis pada “mekanisme pasar”, ternyata pula kehidupan perekonomian di desa tradisional seakan tidak terkontaminasi, dan tetap bergerak sesuai dinamikanya sendiri.

Menurut Boeke (1983), desa tradisional merupakan sebuah rumah tangga yang secara ekonomi “berdaulat”, “mandiri”; desa tradisional merupakan sebuah “unit produksi” bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif kalangan kelas menengah dan atas (penguasa, bangsawan, pemilik tanah/modal, dll), sementara kalangan bawah atau awam hal itu tidak lain sebagai “kewajiban sosial dan ekonomis” mereka atas perlindungan dan pimpinan yang diberikan oleh kalangan menengah dan atas; yang ini berarti pula sebagai bentuk pengabdian kepada penguasa alam yang Maha Kuasa. Pendek kata, setiap aktivitas ekonomi mereka senantiasa ditundukkan pada dan dicampur dengan segala macam motif, yaitu motif sosial, keagamaan, etis dan tradisional. Dari sisi konsumsi, kehidupan ekonomi desa tradisional tradisional dibangun atas dasar “prinsip swasembada”, dimana hampir seluruh kebutuhan hidup kesehariannya diproduksi oleh dan di desa tradisional sendiri.

Kemampuan desa tradisional membangun struktur ekonomi demikian, karena didukung penuh oleh adanya ikatan-ikatan sosial yang asli dan organis, sistem kesukuan tradisional, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi pertanian semata-mata untuk keperluan keluarga, pengekangan pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak terlalu berorientasi kepada laba (*non profit oriented*). Landasan struktur ekonomi desa tradisional diletakkan pada prinsip” *hemat, ingat, dan istirahat* (Boeke, 1983: 22).

desa tradisional diletakkan pada prinsip” *hemat, ingat, dan istirahat* (Boeke, 1983: 22).

B. Dimensi Sosial-Budaya dalam Aktivitas Perekonomian Masyarakat “Desa Tradisional”

Kehidupan sosial masyarakat desa tradisional sulit diklasifikasikan menurut pekerjaan mereka (de Jong, 1989), tidak seperti struktur kehidupan sosial pada masyarakat perkotaan dalam klasifikasi yang jelas dan terstruktur. Masyarakat desa tradisional yang hidup di daerah-daerah pertanian pedalaman hidup dalam komunitas-komunitas yang cenderung bersikap “tertutup”, serta dengan semangat kelompok yang kuat, karena mereka menganggap bahwa eksistensi individu terletak di dalam kehidupan berkelompok, bermasyarakat. Oleh sebab itu kehidupan individu perlu diatur secara organis, tunduk serta menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakatnya, alam dan Sang Pencipta. Mereka emosional, dengan kemampuan intelektual yang “kurang berkembang”, kurang disiplin dan kurang memiliki rasa ketepatan dan penghargaan terhadap waktu (Boeke, 1983); walaupun tidak sebagaimana dilukiskan oleh Kruyt dan Ossenbruggen (Koentjaraningrat, 1985) bahwa mereka cenderung berpikir secara “tidak rasional”, tetapi lebih mengandalkan pada hal-hal yang bersifat “religio-magis”.

Kehidupan masyarakat desa pedalaman di atas, walaupun dalam banyak segi ada kesamaan, namun dibandingkan dengan mereka, kehidupan masyarakat desa tradisional yang hidup di daerah pesisir, lebih dinamis, terbuka, moderat; sebagai akibat dari intensnya kontak sosial budaya mereka dengan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya dan agama yang berbeda-beda (Geert, 1981).

Adanya pemikiran, sikap dan tindakan di atas, erat berkaitan dengan “sistem nilai budaya dan sikap” yang mereka anut dan patuhi; serta sebagai “faktor-faktor mental” (Koentjaraningrat, 1985) yang mempengaruhi pemikiran, sikap dan tindakan mereka dalam kehidupan kesehariannya maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan penting yang lain. Ia merupakan suatu rangkaian knsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, sekaligus juga apa yang dianggap remeh dan tak berharga dalam kehidupan mereka.

Realitas ini dapat dilihat dari bagaimana pemikiran, sikap dan tindakan mereka terhadap aktivitas ekonomi. Kalaupun sebagaimana dikatakan oleh Boeke

di atas, walaupun masyarakat desa tradisional mampu membangun dan mengembangkan struktur ekonomi secara otonom, swasembada, hal itu tidak lain karena didukung penuh oleh adanya ikatan-ikatan sosial dan budaya yang asli dan organis, sistem kesukuan tradisional, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi pertanian semata-mata untuk keperluan keluarga, pengekangan pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak terlalu didasarkan pada motif-motif murni ekonomi yang sangat berorientasi kepada pasar dan laba (*non profit oriented*); dan karena itu pula pekerjaan tidak lain dipandang sebagai “sarana pengabdian” terhadap kewajiban-kewajiban moral, sosial, etika dan keagamaan; atau hanya sebatas sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidup. Dengan kata lain, setiap aktivitas ekonomi, apapun bentuk dan jenisnya, ia senantiasa dikuasai atau berada di dalam “konteks tradisi”.

Sebagai sebuah pengabdian dan alat untuk mempertahankan hidup, maka bagi masyarakat desa tradisional bekerja bukanlah suatu “kejahatan yang terpaksa dilakukan, karena itu sedapat mungkin di jauhi dan dibatasi” seperti dikatakan Boeke (1983: 22). Bagi mereka bekerja, ataupun aktivitas ekonomi lainnya memang sebagai sesuatu yang harus diterima, tetapi ia harus dilakukan dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh, penuh kerja keras, dan sedapat mungkin tanpa bantuan orang lain sehingga bernilai tinggi di mata masyarakatnya. Bekerja keras adalah milik masyarakat desa tradisional, dan karenanya tidak perlu “sistem perangsang” sebagaimana dikonsepsikan oleh Hoselitz; ; walaupun dengan cara dan irama kerja yang masih perlu didisiplinkan dan diselaraskan dengan perkembangan teknologi modern sehingga dapat memberikan hasil yang seefektif mungkin (Koentjaraningrat, 1983; 1985).

C. Studi tentang Segi-segi Sosial-Budaya dalam Aktivitas Perekonomian “Desa Tradisional”

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, walaupun Boeke mungkin bukan orang pertama yang secara utuh mengadakan kajian tentang dimensi sosial-budaya dalam aktivitas perekonomian masyarakat desa tradisional—ia menyebut sebagai “masyarakat prakapitalis”—namun, Boekelah—setidak-tidaknya bagi peneliti—yang menyadarkan kepada kita bahwa betapa dalam berbagai kajian tentang ekonomi, kedudukan, peran dan arti desa tradisional hampir-hampir terabaikan, dan senantiasa ditempatkan sebagai “obyek”, bukan “subyek”.

Bermula dari munculnya kesadaran bahwa masyarakat kota dan desa telah terlibat dalam hubungan-hubungan ekonomis dalam eskalasi yang lebih luas, kerap, serta saham masyarakat desa terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kota semakin besar dan meningkat, maka sejak medio 80-an hingga dewasa ini, para ahli tidak lagi mengkonsentrasikan diri semata-mata terhadap aspek-aspek kehidupan sosial-budaya dalam aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan. Medan penelitian telah beralih ke daerah-daerah pinggiran, baik di tingkat lokal maupun regional yang masih sangat kuat bertahan pada basis sosial dan ekonomi tradisional yang bercirikan "*agraris*" dan "*padat karya*"; atau setidaknya keduanya dikaji dengan intensitas yang relatif berimbang. Terutama, ketika derap pembangunan di setiap bangsa semakin cepat. Dan melibatkan seluruh wilayahnya, di kota dan di desa.

Pada sisi lain, walaupun dalam tahun-tahun yang lampau, ketika studi-studi sosiologis dan antropologis telah banyak mencurahkan perhatian pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat nusantara, namun hanya sedikit sekali yang memfokuskan kajiannya pada pola-pola dan praktik-praktik ekonomi yang dikelola dan dipimpin oleh "*penduduk pribumi*" dengan bentuk-bentuk relasi dan jaringan ekonomi yang bersifat "*internal*". Pada umumnya tekanan kajian mereka banyak diletakkan pada peranan orang-orang Eropa daripada penduduk pribumi sendiri; seperti studi yang pernah dilakukan oleh Geertz (1963), Burger (1980).

Dalam kaitan ini, kita sangat menghargai karya-karya klasik dari van Leur (1967) dan Schrieke (1955-1957), karena kedua orang inilah yang memandegani kajian-kajian sosial-ekonomi dengan mencoba menempatkan arti penting orang-orang Asia (Indonesia) dalam aktivitas dan jaringan ekonomi (perdagangan) dunia. Hanya sayangnya studi-studi tersebut dilakukan pada masa-masa pra-kolonial dan kolonial. Studi-studi terpenting mengenai relasi dan jaringan ekonomi (perdagangan) "*setempat dan regional*" telah dimulai oleh Dewey dalam karyanya "*Peasant Marketing in Java*" (1962), dan Geertz, melalui karyanya "*Peddlers and Princes*" (1963), yang mencoba menghubungkan aktivitas-aktivitas para pedagang dan para wiraswastawan dengan keadaan ekonomi umum di dalam sebuah masyarakat yang sedang berubah, dan secara luas menguraikan keterkaitannya dengan konteks sosial-budaya dari peristiwa ekonomi tersebut.

Sangat kurangnya studi-studi tentang aspek-aspek sosial-budaya dalam aktivitas perekonomian dalam latar masyarakat desa tradisional, ini pun terjadi pada masyarakat Madura, terutama di kalangan masyarakat desa tradisional di

daerah-daerah pesisir. Padahal, walaupun pertanian dan peternakan merupakan matapencaharian utama bagi sebagian terbesar penduduk Madura, namun perikanan laut selain memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat, juga dijadikan semacam “komplementer” akibat kondisi tanah yang keras berbatu, dan tandus di daerah Madura. Bahkan, sebagaimana ditunjukkan oleh de Jonge (1989c), bahwa secara statistik aktivitas perekonomian masyarakat Madura di sektor perikanan laut, merupakan sektor ekonomi terpenting kedua setelah sektor pertanian. Dari keseluruhan jumlah penduduk Madura, terdapat sekitar 8% yang bermatapencaharian pokok sebagai nelayan. Jumlah tersebut akan lebih besar bila ditambah dengan jumlah yang hampir sama dari mereka yang menjadikan nelayan sebagai matapencaharian sambilan. Suatu jumlah, yang diperkirakan hampir seperempat dari seluruh nelayan yang ada di Jawa dan Madura.

Dari kepustakaan yang ada, penelitian-penelitian ke-Madura-an masih banyak difokuskan pada kehidupan masyarakat “petani tradisional” (*traditional peasant society*), seperti yang telah dilakukan oleh Kuntowijoyo (1980; Leunissen (1982; 1989). Touwen-Bouwsma (1989a), Smith (1989) dengan fokus tentang kehidupan sosial-ekonomi. Sementara studi de Jonge (1977), Bouvier (1987) memfokuskan diri pada studi tentang kehidupan sosial-budayanya. Atau, sejumlah studi lain dari Kuntowijoyo (1980, 1993); Touwen-Bouwsma (1989b); de Jonge (1989b) terhadap aspek sosial-politik dalam kehidupan masyarakat Madura; serta yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan (Islam), baik yang dilakukan oleh de Jonge (1989), Kuntowijoyo (1989), dan Akhmad Khusyairi (1989).

Sementara itu, penelitian-penelitian pada latar kehidupan masyarakat pesisiran relatif sedikit, itu pun tidak sepenuhnya berkenaan dengan aktivitas para nelayan di bidang perikanan laut, kecuali penelitian yang dilakukan oleh de Jonge (1989c). Sedangkan Munir (1985), dan Muljono (1985) memfokuskan diri pada studi tentang ritus kematian, dan adat sekitar kelahiran pada masyarakat nelayan Madura.

Bagaimanapun, studi de Jonge tentang peranan pedagang dan berbagai persekutuan dagang dalam proses perubahan ekonomi; studi Munir tentang upacara dan ritus kematian; serta studi Djojomartono tentang ritus kelahiran tersebut, telah memberikan gambaran walaupun tidak utuh tentang berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dalam latar kehidupan masyarakat pesisiran Madura. Berkenaan dengan fokus penelitian ini, maka studi de Jong tersebut telah

menunjukkan betapa aktivitas perekonomian masyarakat (tradisional ataupun modern) meskipun tidak seluruhnya, dapat dihubungkan dengan alasan-alasan sosiologis dan kultural, di samping faktor-faktor ekonomi sendiri; seperti juga telah ditunjukkan oleh sejumlah studi lain dari Geertz (1956, 1963), Geertz (1981), McVey (1963), Wertheim (1959), Koentjaraningrat (1969, 1985), serta Castles (1982), tentang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah desa/kampung “nelayan tradisional” yang bernama “Bandaran”. Secara geografis, desa/kampung Bandaran ini terletak sekitar 20 km sebelah barat daya kota Pamekasan.

Untuk melakukan penelitian tentang aspek-aspek sosial-budaya dalam sebuah aktivitas perekonomian berlatar “tradisional”, sebenarnya terdapat banyak lokasi di Kabupaten Pamekasan, yaitu: *pertama*, desa-desa nelayan yang terdapat di daerah pesisir utara pulau Madura yang berhadapan dengan laut Jawa seperti: Pasean, Paddhek, dan Tamberu/Batumarmar; dan *kedua*, desa-desa nelayan yang terdapat di daerah pesisir pantai selatan pulau Madura yang berhadapan dengan Selat Madura seperti: Talang, Majungan, Padelegan, Branta, dan Bandaran. Di antara desa-desa nelayan di atas, Bandaran—semula bernama *kampung cerek*—dipandang sebagai sebuah kampung yang cukup memenuhi syarat dan keinginan oleh tim peneliti, untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kehidupan para nelayan tradisional di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Desa Bandaran merupakan sebuah potret kehidupan nelayan tradisional, yang dalam menggerakkan aktivitas perekonomiannya sangat mengandalkan pada matapencaharian sebagai nelayan, dan sedikit sekali yang memiliki matapencaharian tetap; di samping karena kondisi sosial budaya mereka yang masih belum banyak terkontaminasi oleh kehidupan perkotaan. Selain itu, para nelayan, beberapa pelaku ekonomi setempat (juragan pemilik kapal, bakul ikan) mengelola dan mengembangkan aktivitas perekonomian mereka secara “swasembada”, yaitu bertumpu pada pemberdayaan potensi daerah dan modal yang terdapat di lingkungan setempat (lokal), yang merupakan ciri khas dari sebuah struktur ekonomi desa.

Seperti umumnya sebuah desa nelayan tradisional, kondisi rumah-rumah penduduk setempat cukup berjejal, saling berdempetan, yang mungkin bagi para penduduk kota mengesankan sebuah “pemukiman kumuh”. Tata pemukiman yang bersih, indah dan nyaman, tampaknya memang belum banyak dimengerti oleh masyarakat setempat. Bangunan “modern” dan “bangunan tradisional” khas nelayan tradisional, yang berpadu menjadi satu menggambarkan suatu panorama

yang mengesankan sebuah desa yang sedang berkembang, dengan basis-basis kehidupan sosial-budaya yang masih kental dengan nuansa tradisional khas Madura.

Realitas inilah yang menarik perhatian tim peneliti untuk mengkaji dan mengelaborasi obyek-obyek penelitian sesuai dengan fokus utama penelitian, yaitu “bagaimana konteks dan aspek-aspek sosial dan budaya tradisional masyarakat setempat secara *resiprokal* berkaitan/berpengaruh pada aktivitas ekonomi nelayan tradisional setempat, serta bagaimana struktur perekonomian masyarakat setempat dibangun dan dikembangkan atas dasar kehidupan sosial dan budaya mereka”.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikenal di dalam filsafat sebagai “*fenomenologi*”, atau di dalam sosiologi dinamakan—meminjam istilah Max Weber—“*Metode Verstehende*” (Niel Mulder,1984:5), yang meletakkan makna “kemengertian” atau “kepemahaman” (*verstehen*) terhadap obyek dilihat dari sudut pandang obyek itu sendiri.

Untuk mengerti atau memahami obyek, tim peneliti memang tidak menetap di lokasi penelitian, mengingat kami bertempat tinggal di kota Pamekasan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penelitian (sekitar 12 Km). Selama penelitian dilakukan—antara bulan Juni – Desember 2000, peneliti mendatangi lokasi penelitian sebanyak 20 kali untuk mewawancarai para informan. Jumlah informan yang dihubungi selama proses penelitian berlangsung sebanyak 19 orang, terdiri dari: 2 orang juragan pemilik perahu , 3 orang juragan kepala, 5 orang nelayan, 2 orang bakul, 1 orang tengkulak ikan, 1 orang tukang pembuat perahu, serta 5 orang penduduk desa, untuk keperluan pengumpulan data lapangan. Wawancara dengan para informan di atas dilakukan secara individual (untuk para juragan pemilik perahu, juragan kepala, dan tukang pembuat perahu); secara kelompok (penduduk, anggota nelayan) pada waktu pagi atau sore hari dalam suasana yang “santai” dan penuh keakraban. Hasil wawancara dicatat dalam “catatan lapangan” (*field notes*). Bahan-bahan untuk materi wawancara sebelumnya telah disispkan sesuai dengan fokus-fokus permasalahan yang akan dikaji dan dimengerti; selain itu, dalam wawancara ini pula beberapa fokus

permasalahan yang telah didapatkan informasinya dari kelompok informan yang satu, dicocokkan dengan cara “cek-silang” (*cross-check*) kepada kelompok informan yang lain, sehingga diperoleh data yang sebenarnya (*triangulasi sumber*). Bahasa pengantar dalam wawancara pada umumnya menggunakan Bahasa Madura, dan kadangkala saja menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan, mengingat tidak seluruh informan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar, juga dimaksudkan agar situasi wawancara lebih akrab, lebih kekeluargaan, tidak canggung, serta agar “*nuansa etnis*” dari informasi yang diberikan lebih dirasakan dan mengena. Selain wawancara dan pengamatan yang dilakukan di kancha penelitian (desa Bandaran), tim peneliti juga melakukan wawancara dan pengamatan dalam waktu singkat dengan orang-orang di daerah lain atau “ahli budaya Madura” (Bpk. Baisuni, BA. Pensiunan Kasie. Kebudayaan Kab. Sumenep), untuk lebih memberikan bobot kepada materi yang dikaji, sekaligus untuk mempertajam analisis, interpretasi, hipotesis peneliti terhadap peta permasalahan.

Untuk mendapatkan informan dan mendapatkan akses informasi data penelitian yang diperlukan, memang tidak selalu mudah dilakukan. Adanya kecenderungan untuk “tidak menerima” orang luar, pada awal-awal memasuki kancha menjadi kendala utama di dalam penelitian, sekalipun dua anggota tim pengumpul data lapangan juga berasal dari orang-orang Madura. Alhamdulillah, dengan perantaraan seorang anggota tim peneliti yang merupakan “*putra desa*” Bandaran, yaitu Bapak Adrawi Zaini—sekarang dosen UT di Pamekasan—, kendala di atas, lambat laun dapat diatasi, dan sejak itu pula komunikasi dengan berbagai kelompok informan di atas berjalan dengan lancar, bahkan hubungan-hubungan personal pun menjadi sangat akrab, penuh kekeluargaan. Dari dia pulalah para anggota tim peneliti mendapatkan ijin resmi (secara lisan) dari Kepala Desa (*klebun*) Bandaran yaitu H. Abd. Rasyid ketika tim peneliti memasuki kancha penelitian untuk melakukan pengambilan data lapangan, dan mewawancarai para informan.

Sebelum tim peneliti memasuki kancha penelitian untuk pengumpulan data, di antara para anggota peneliti, terlebih dahulu mendiskusikan fokus atau obyek yang akan diteliti; sekalipun ketika di lapangan ternyata fokus tersebut menjadi berkembang, hingga pada berbagai aspek yang lain di luar fokus; mengingat bahwa berbagai fenomena, keadaan, atau gejala yang terdapat di

lapangan mengharuskan untuk segera dicatat atau didokumentasikan pada saat itu juga, sebelum menjadi sesuatu yang sulit ditemukan lagi setelah waktu itu.

Data-data lapangan dikumpulkan melalui teknik “wawancara” dengan para informan di atas, dengan menggunakan bahasa Madura (*bhasa Madhura*) sebagai bahasa pengantar komunikasi. Data-data lapangan ini, selanjutnya dicatat segera setelah tim peneliti kembali ke rumah, dalam bentuk “catatan-catatan lapangan” (*field notes*). Catatan-catatan lapangan ini kemudian didiskusikan di antara para anggota tim penelitian (*peer-discussion*), baik untuk keperluan menyusun sejumlah katagorisasi, konstruksi, serta merumuskan hipotesis yang dapat menjelaskan secara koheren dan lengkap mengenai ‘apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan masyarakat nelayan di desa Bandaran. Untuk melengkapi data yang ada, juga digunakan teknik “pengamatan” terhadap orang, situasi, aktivitas yang terdapat di kancah. Dalam hal ini, pengamatan tidak dilakukan dalam bentuk “pengamatan partisipan” (*non participant observation*). Hal ini disebabkan karena tim peneliti tidak bertempat tinggal di lokasi penelitian, serta tidak memiliki ijin atau cuti dinas, sehingga di sela-sela penelitian seluruh anggota tim peneliti masih memiliki tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan data-data tentang sosok nelayan desa Bandaran, lingkungan desa, situasi pasar ikan, para bakul, dan lain-lain, digunakan “*teknik dokumentasi*”. Alat yang digunakan untuk keperluan itu adalah alat pemotret.

Dengan berbagai teknik pengumpulan data lapangan tersebut, proses validasi data dilakukan (*triangulasi metode*), sehingga data yang diperoleh mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran yang lebih tinggi.; selain setelah data-data yang terkumpul diinterpretasikan, hipotesis-hipotesis dikembangkan juga dikonfirmasi kembali kepada para informan (*member-check*).

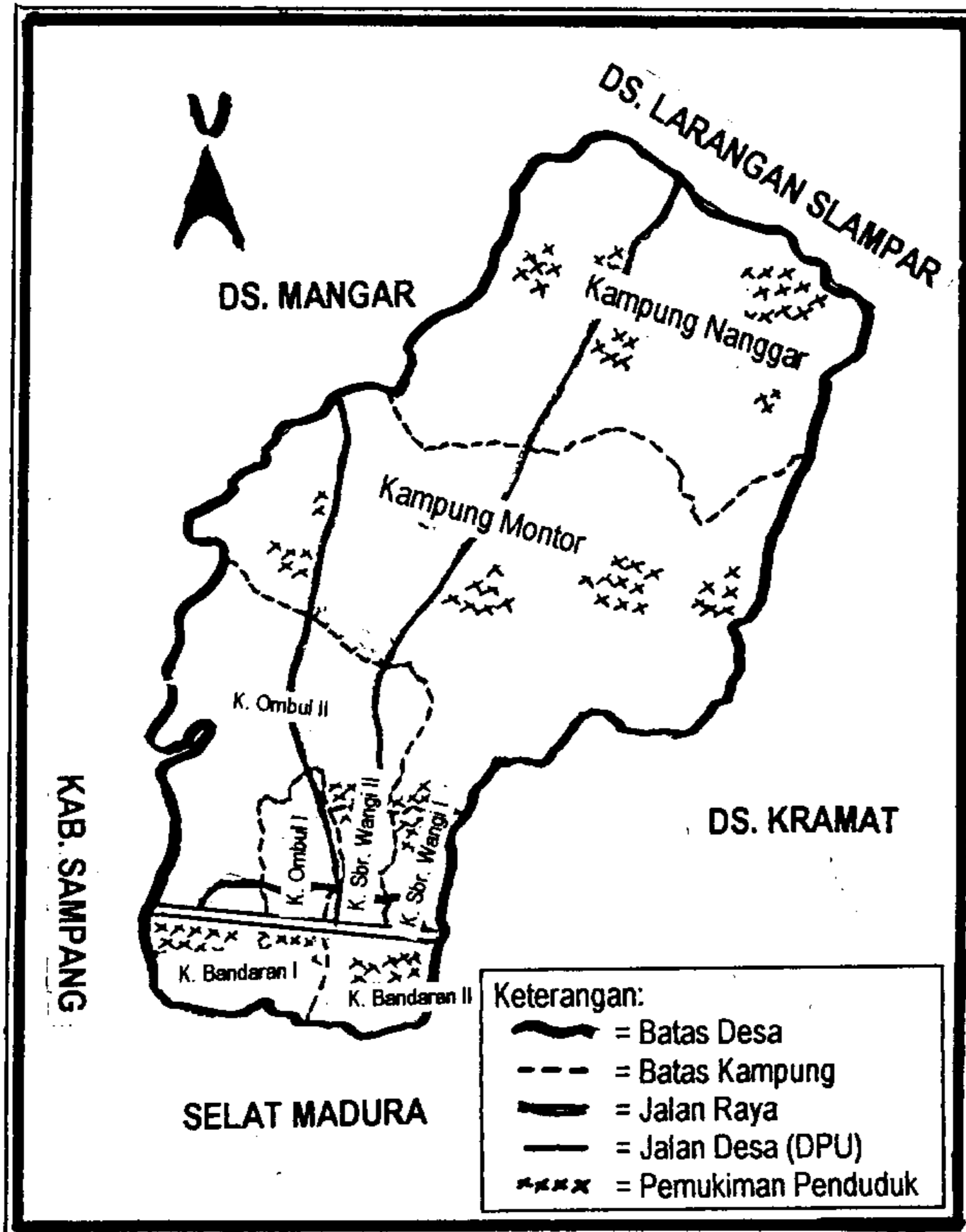
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bandaran: Sebuah Desa Nelayan yang Sedang Berkembang

Bandaran adalah salah satu desa (*dhisa*) di antara delapan desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan Pamekasan, serta merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Secara topografis, daerah Bandaran mempunyai ketinggian tanah antara 0–50 meter di atas permukaan laut, dengan jenis tanah “*grumusol*” (Abdurrachman, 1977).

Desa Bandaran terbagi menjadi 8 (delapan) kampung (= *kampung*), yaitu: Bandaran I-II, Ombul I-II, Sumber Wangi I-II, Nangger, dan kampung Montor. Kampung Bandaran I-II, Ombul I-II, serta kampung Sumber Wangi I-II adalah kampung-kampung yang letaknya di dekat laut/pesisiran, sedangkan dua kampung (Nangger dan Montor) yang lain terletak agak jauh dari pesisiran dan berada di lereng sebuah perbukitan di sebelah utara keenam kampung sebelumnya. Jumlah penduduk secara keseluruhan ± 4.000 orang ¹⁾, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak ± 963 orang.

¹⁾ informasi dari Kepala Desa (*klebun*) desa Bandaran yaitu H. Abd. Rasyid.



Gambar 1: Peta Desa Bandaran

Keenam kampung pesisiran tersebut, walaupun secara geografis memiliki luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan kedua kampung yang lain, akan tetapi memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, serta menjadi pusat konsentrasi pemukiman penduduk desa Bandaran. Pusat pemerintahannya sendiri (Kantor Kepala Desa) terletak di kampung Sumber Wangi II di pinggir jalan desa. Di sebelah selatannya terletak Puskesmas Cabang Kecamatan Tlanakan, SDN Bandaran I dan IV. Sedangkan di seberang jalan (sebelah barat)—sudah masuk ke wilayah kampung Ombul I--terdapat SDN. Bandaran II dan III, dan salah satu mesjid dari dua mesjid yang ada di desa Bandaran.

Bila masyarakat pulau Madura sebagian besar hidup dari matapencaharian di bidang pertanian, akan tetapi pada umumnya wilayah desa Bandaran kondisi tanahnya tidaklah subur, bahkan cenderung agak keras, serta aktivitas pertanian dapat dikatakan tidak berkembang atau tidak diusahakan oleh penduduk setempat. Hal ini berbeda dengan penduduk yang berada di dua kampung yang lain yaitu kampung Nangger dan Montor²⁾, mereka bermatapencaharian sebagai petani sawah tadah hujan. Namun, ada pula di antara mereka yang bermatapencaharian sebagai nelayan, terutama ketika musim kemarau panjang (*mosem nemor kara*), bergabung dengan saudara-saudara mereka yang berada di kampung Bandaran, Ombul, dan Sumber Wangi. Dalam kondisi geologis seperti itu, matapencaharian pokok masyarakat yang berada di desa Bandaran pesisir, memiliki matapencaharian utama sebagai nelayan, serta hanya sebagian kecil di antaranya bermatapencaharian sebagai penjual bahan-bahan kebutuhan keseharian masyarakat (*meracang*), pedagang emas, pegawai negeri, dan pengusaha angkutan penumpang (taksi).

Kondisi ini agak berbeda dengan desa-desa nelayan lainnya di Pamekasan, seperti Pasean, Tamberu, dan Talang, yang selain masyarakatnya hidup dari

²⁾ Penduduk dari kampung Nangger dan bagian utara kampung Montor oleh para penduduk yang berdiam di kampung pesisir disebut "*reng dhisa*" (orang desa). Sebutan ini bagi peneliti memang agak aneh, mengingat mereka pun sebenarnya orang desa. Akan tetapi tampaknya penyebutan tersebut dilakukan untuk membuat "pemisahan" dalam arti sosiologis antara mereka yang berdiam di tepi pantai (*reng gir sereng*) dengan mereka yang berdiam di atas/lereng gunung (*reng gunung*). Dengan adanya penyebutan seperti itu, tampak pula bahwa para penduduk nelayan di pesisiran ingin mengidentifikasi diri sebagai "*reng kotta*" (orang kota) dengan segala atribut dan sikap kekotaannya, sementara orang yang hidup di daerah pertanian jauh di daerah pedalaman mereka identifikasi sebagai "*reng dhisa*" (orang desa) dengan segala atribut dan sikap sebagaimana layaknya orang desa umumnya, yaitu kolot dan tradisional. Hal ini juga terjadi di kalangan masyarakat pesisir lain di Madura. Pemisahan secara sosiologis antara mereka, juga ditemukan di daerah pesisir Madura lainnya, seperti di Pasean (Djojomartono, 1985); dan di Parenduan (de Jong, 1989).

aktivitas nelayan di laut, aktivitas di bidang pertanian pun cukup banyak memberikan hasil secara ekonomis. Bagi penduduk desa Bandaran, keberadaan laut telah memungkinkan mereka terlepas dari sikap ketergantungan hidup terhadap usaha pertanian, dan pada saat yang bersamaan telah mampu memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, bila dibandingkan dengan saudara-saudara mereka yang berada di kampung Montor dan Nangger yang lebih menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Selain itu, aktivitas mereka sebagai nelayan dengan jumlah penghasilan yang mereka pandang cukup memadai, ternyata juga telah mampu mengendalikan mereka untuk tetap bertahan dan mendapatkan rejeki di daerahnya sendiri, tanpa harus melakukan *exodus* ke daerah atau bahkan negara lain seperti yang banyak ditemukan pada umumnya masyarakat nelayan di pantai utara pulau Madura³⁾.

Selain itu, walaupun masyarakat desa Bandaran pesisir tersebut berada pada daerah yang tidak terlalu subur, dan banyak menggantungkan hidup pada hasil penangkapan ikan di laut, namun secara ekonomis kehidupan mereka tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat terbelakang dan miskin. Bahkan, ternyata dari hasil penangkapan ikan di lautnya itu, sebagian besar dari mereka memiliki rumah tembok, fasilitas rumah tangga “modern dan canggih”, untuk ukuran “masyarakat tradisional” (*traditional peasant societies*), dan mobil.

Seperti lazimnya pemukiman masyarakat nelayan lain di Pulau Madura, rumah-rumah penduduk setempat cukup padat, berjejal, tidak menganut pola penataan rumah seperti dalam masyarakat petani pedalaman⁴⁾, serta mengesankan

³⁾ Di daerah Kabupaten Pamekasan bagian utara, seperti di Pasean, Sotabar, Tamberu/Batumarmar (daerah pesisir), serta di Waru, Kapong (daerah pegunungan) para pemudanya banyak yang cenderung melakukan *exodus* ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, bahkan ke Arab Saudi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Di negara-negara tersebut mereka banyak bekerja sebagai tukang bangunan, tukang pembuat gigi, atau pekerjaan kasar lainnya. Sekalipun pekerjaan tersebut terbilang sebagai pekerjaan kasar, tapi berdasarkan informasi penduduk setempat, pendapatan mereka lebih dari cukup untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup keseharian mereka. Buktinya menurut mereka, para tenaga kerja tersebut bisa mengumpulkan banyak uang untuk dikirimkan ke keluarganya di Madura; dan dari uang kiriman tersebut keluarga/orang tua mereka bisa membangun rumah tempat tinggal yang “mewah” untuk ukuran masyarakat setempat. Orang pamekasan kota, biasa menyebut pemukiman penduduk di sana sebagai “rumah kota di tepi pantai atau di atas gunung”, karena apabila diperhatikan deretan rumah-rumah tersebut memang mengesankan sebagaimana layaknya “rumah-rumah villa” yang berdiri megah di atas gunung/pesisir pantai. Akibat banyaknya gerakan *exodus* dari para lelaki atau pemuda tadi ke luar negeri, menyebabkan di daerah-daerah tadi jumlah lelaki sangat sedikit, atau jarang menemukan adanya suami/para lelaki di rumah.

⁴⁾ Dalam masyarakat petani pedalaman di Madura, terdapat pola penataan rumah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal (*soma*) yang disebut “*taneyan lanjhang*” (harfiah: halaman/pekarangan panjang). *Taneyan Lanjhang* pada dasarnya merupakan sebuah pola penataan bangunan-bangunan rumah keluarga karakteristik orang Madura yang terdiri dari *dhapor*, (dapur), *kandhang* (kandang), *langghar/kobhung*, (langgar tempat sholat, sekaligus tempat menerima tamu lelaki (*tamoy lake*)) keluarga,

aktivitas nelayan di laut, aktivitas di bidang pertanian pun cukup banyak memberikan hasil secara ekonomis. Bagi penduduk desa Bandaran, keberadaan laut telah memungkinkan mereka terlepas dari sikap ketergantungan hidup terhadap usaha pertanian, dan pada saat yang bersamaan telah mampu memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, bila dibandingkan dengan saudara-saudara mereka yang berada di kampung Montor dan Nangger yang lebih menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Selain itu, aktivitas mereka sebagai nelayan dengan jumlah penghasilan yang mereka pandang cukup memadai, ternyata juga telah mampu mengendalikan mereka untuk tetap bertahan dan mendapatkan rejeki di daerahnya sendiri, tanpa harus melakukan *exodus* ke daerah atau bahkan negara lain seperti yang banyak ditemukan pada umumnya masyarakat nelayan di pantai utara pulau Madura³⁾.

Selain itu, walaupun masyarakat desa Bandaran pesisir tersebut berada pada daerah yang tidak terlalu subur, dan banyak menggantungkan hidup pada hasil penangkapan ikan di laut, namun secara ekonomis kehidupan mereka tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat terbelakang dan miskin. Bahkan, ternyata dari hasil penangkapan ikan di lautnya itu, sebagian besar dari mereka memiliki rumah tembok, fasilitas rumah tangga “modern dan canggih”, untuk ukuran “masyarakat tradisional” (*traditional peasant societies*), dan mobil.

Seperti lazimnya pemukiman masyarakat nelayan lain di Pulau Madura, rumah-rumah penduduk setempat cukup padat, berjejal, tidak menganut pola penataan rumah seperti dalam masyarakat petani pedalaman⁴⁾, serta mengesankan

³⁾ Di daerah Kabupaten Pamekasan bagian utara, seperti di Pasean, Sotabar, Tamberu/Batumarmar (daerah pesisir), serta di Waru, Kapong (daerah pegunungan) para pemudanya banyak yang cenderung melakukan *exodus* ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, bahkan ke Arab Saudi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Di negara-negara tersebut mereka banyak bekerja sebagai tukang bangunan, tukang pembuat gigi, atau pekerjaan kasar lainnya. Sekalipun pekerjaan tersebut terbilang sebagai pekerjaan kasar, tapi berdasarkan informasi penduduk setempat, pendapatan mereka lebih dari cukup untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup keseharian mereka. Buktinya menurut mereka, para tenaga kerja tersebut bisa mengumpulkan banyak uang untuk dikirimkan ke keluarganya di Madura; dan dari uang kiriman tersebut keluarga/orang tua mereka bisa membangun rumah tempat tinggal yang “mewah” untuk ukuran masyarakat setempat. Orang pamekasan kota, biasa menyebut pemukiman penduduk di sana sebagai “rumah kota di tepi pantai atau di atas gunung”, karena apabila diperhatikan deretan rumah-rumah tersebut memang mengesankan sebagaimana layaknya “rumah-rumah villa” yang berdiri megah di atas gunung/pesisir pantai. Akibat banyaknya gerakan *exodus* dari para lelaki atau pemuda tadi ke luar negeri, menyebabkan di daerah-daerah tadi jumlah lelaki sangat sedikit, atau jarang menemukan adanya suami/para lelaki di rumah.

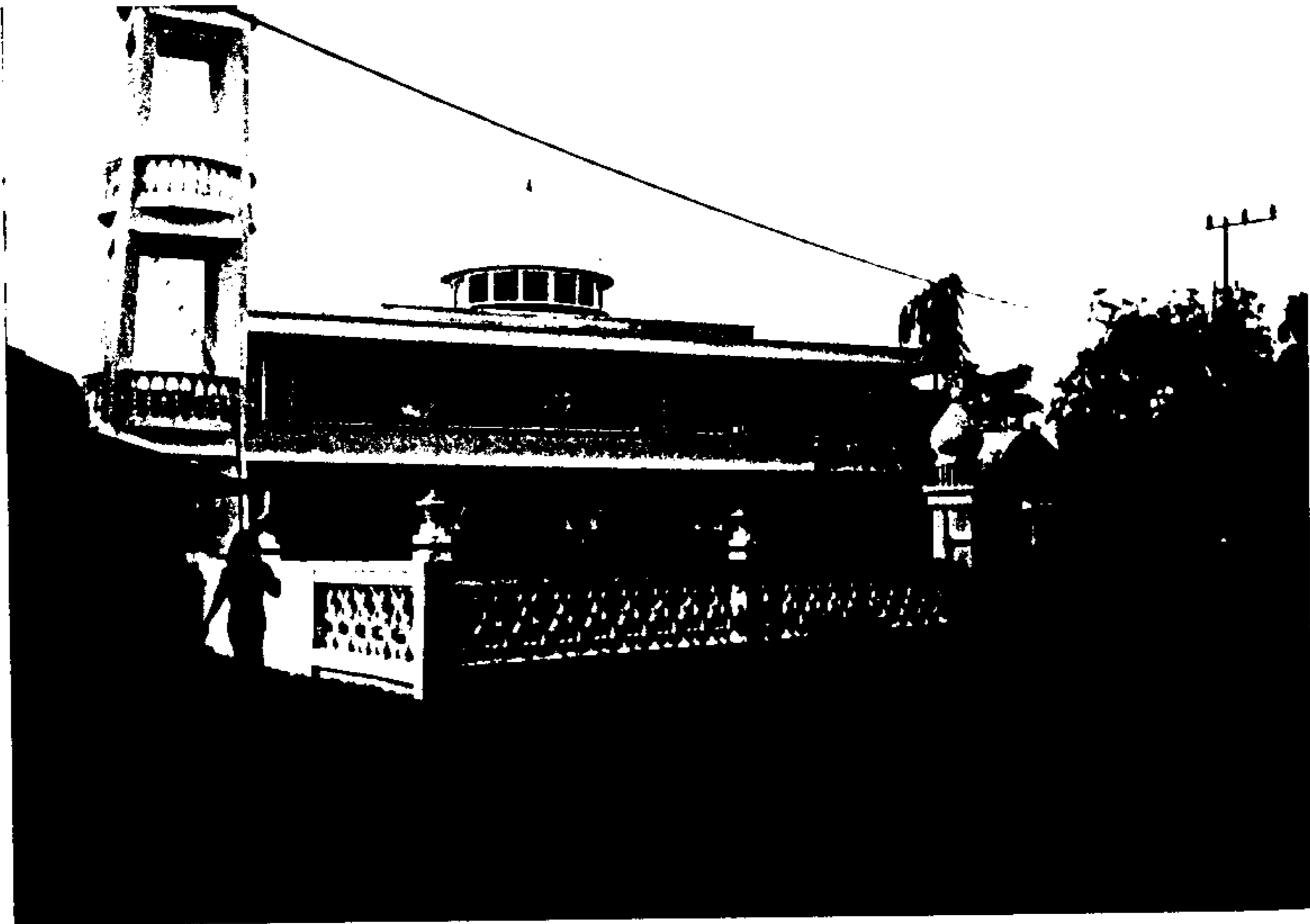
⁴⁾ Dalam masyarakat petani pedalaman di Madura, terdapat pola penataan rumah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal (*soma*) yang disebut “*taneyan lanjhang*” (harfiah: halaman/pekarangan panjang). *Taneyan Lanjhang* pada dasarnya merupakan sebuah pola penataan bangunan-bangunan rumah keluarga karakteristik orang Madura yang terdiri dari *dhapor*, (dapur), *kandhang* (kandang), ‘*langghar/kobhung*, (langgar tempat sholat, sekaligus tempat menerima tamu lelaki (*tamoy lake*’) keluarga,

sebuah “*pemukiman kumuh*”. Pada umumnya rumah-rumah mereka menghadap ke laut, kecuali rumah-rumah di kedua kampung Bandaran yang berada tepat di pinggir laut menghadap ke utara⁵⁾. Jalan-jalan di perkampungan sangat sempit dan berkelok-kelok, sehingga apabila berpapasan salah satu harus mengalah. Namun, apabila diperhatikan, sulit dibayangkan bahwa daerah itu adalah daerah nelayan, dengan matapencaharian “satu-satunya” adalah menangkap ikan di laut. Kondisi rumah-rumah mereka yang berderet dari Timur-Barat sepanjang 500 meter sebelah utara dan selatan jalan raya antara Pamekasan dan Sampang, tidak begitu jauh berbeda dengan rumah-rumah di pemukiman orang-orang kota. Deretan bangunan rumah pemukiman penduduk di desa Bandaran itu ibarat sebuah “kota kecil di tepi pantai” (*a little state in the coast*), lengkap dengan berbagai aksesoris peralatan rumah tangga “modern”, berselang-seling dengan rumah-rumah desa khas penduduk kampung nelayan, baik yang terbuat dari bambu maupun kayu, juga berbagai perabot rumah tangga khas masyarakat nelayan. Sungguh merupakan sebuah *mozaik* desa yang sangat mencengangkan.

dan tempat beristirahat/bersantai di siang hari, yang terbuat dari bambu (*perreng*), serta ‘*roma*’ (rumah induk) tempat bertinggal seluruh anggota keluarga. Sebuah ‘*taneyan lanjhang*’ bertinggal tidak hanya keluarga inti (*soma*, yang berasal dari kata ‘*sa*’ = satu, dan ‘*roma*’ = rumah), tetapi juga para tetua keluarga (kakek, nenek) dan para menantu lelaki (*manto lake*), hingga membentuk sebuah “keluarga luas” (*extended family*). Pola menetap yang berwujud sebuah konsep penataan bangunan-bangunan rumah keluarga ini mencerminkan kombinasi antara adat menetap *uksorilokalitas* dan *matriilokalitas* (bdk. de Jonge, 1989:13-18; Djojomartono, 1985:73-74). Secara sosiologis-kultural, penataan rumah dengan pola *taneyan lanjhang* ini mencerminkan betapa penting arti “kesatuan hidup” dari sebuah keluarga dalam masyarakat Madura; dengan siapapun, dimanapun atau kemanapun seorang anggota keluarga pergi merantau, dia senantiasa pada akhirnya berkumpul kembali dengan keluarganya; dan betapa kehidupan duniawi dan ukhrowi harus tetap merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*wawancara dengan Bpk. Baisuni, BA. pensiunan Kasi Kebudayaan Kab. Sumenep*).

⁵⁾ Pemukiman penduduk yang berada tepat di garis pantai sebelah selatan jalan raya, seluruhnya merupakan kawasan “pemukiman baru”, sebagai hasil “reklamasi laut secara tradisional” oleh penduduk setempat. Hal ini dilakukan, menurut Kepala Desa (*klebun*) Bandaran—H. Abd. Rasyid—, di samping karena keterbatasan daerah pemukiman di pesisir, dan juga karena mereka enggan tinggal di kampung Nangger dan Montor yang sebenarnya tanahnya masih cukup luas, juga agar rumah kediaman mereka dapat berdekatan dengan laut tempat mereka mencari nafkah, maka kawasan pinggir laut yang berada di bagian selatan *jhalan* raya, mereka timbun dan kemudian di atasnya didirikan rumah-rumah bangunan. Penimbunan dan pembangunan rumah-rumah di kawasan pinggir laut—sebelah selatan jalan raya—tersebut, boleh dilakukan oleh penduduk asli desa Bandaran, atas dasar ijin darinya. Luas tanah yang dibolehkan untuk setiap penduduk maksimal adalah 10 x 20 meter, atau tergantung pada kemampuan masing-masing penduduk. Batu-batu yang mereka jadikan sebagai fondasi rumah dan pembatas timbunan tanah, berasal dari batu-batu karang yang diambil dengan menggunakan perahu-perahu kecil di tengah laut, ketika mereka sedang beristirahat atau tidak “melaut”.

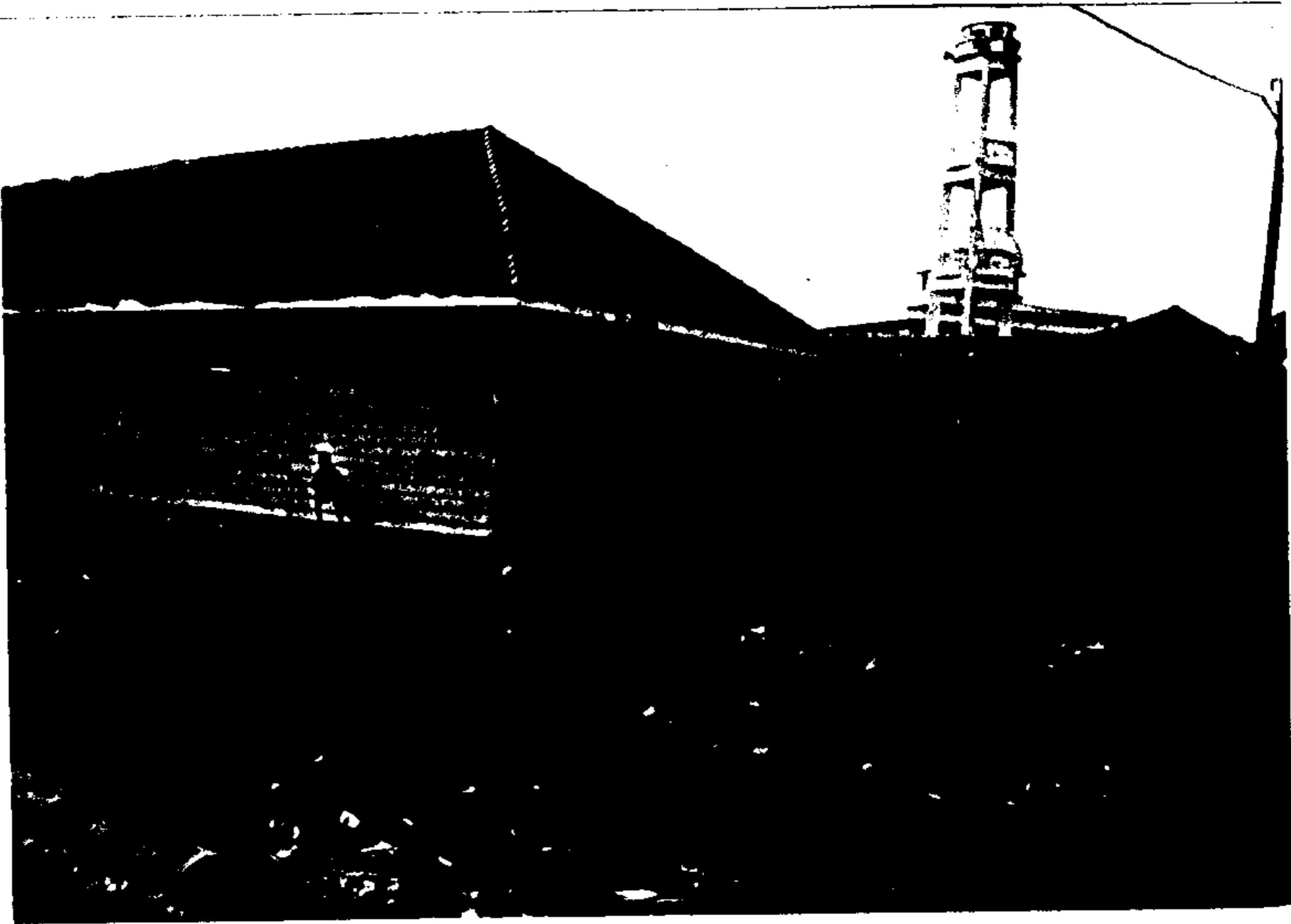
Aktivitas penduduk menimbun kawasan pinggir laut untuk dijadikan pemukiman ini, ternyata kemudian banyak menarik minat para pengusaha swasta di bidang pegaraman, untuk turut juga mendirikan pabriknya di pinggir laut, seperti cara yang dilakukan oleh penduduk setempat, tentunya dengan luas sesuai dengan kebutuhan mereka dan atas dasar ijin yang diberikan oleh Kepala Desa dan pemerintah daerah.



Gambar 4: Salah Satu Mesjid yang Terletak di Kampung Sumber Wangi II Desa Bandaran



Gambar 5: Kantor Kepala Desa Bandaran



Gambar 6: Gedung SDN. Bandaran II No. 423, dan Pusat Kegiatan Guru (PKG)

Di desa Bandaran ini juga, telah terdapat dua mesjid, yang salah satunya merupakan “mesjid agung” bagi masyarakat desa Bandaran, dan baru selesai direhabilitasi pada tahun 1999. Dana pembangunannya diperoleh dari swadana murni masyarakat; bagian (*sara'an*) dari hasil penangkapan ikan setiap perahu; ditambah dengan hasil penarikan *infaq* dan *shadaqah* orang-orang di luar penduduk desa yang sedang melintasi daerah mereka, melalui “*amal jhalanan*”, yaitu amal yang mereka minta dari para penumpang taksi, bus, kendaraan pribadi, atau orang-orang yang melewati jalan raya di daerah mereka. Menurut salah seorang petugas penarik amal yang ditemui oleh peneliti, rerata jumlah uang amal yang diperoleh sebesar Rp. 100.000 – 150.000,- per hari. Sungguh suatu jumlah yang cukup besar untuk mendukung swadana masyarakat tersebut.

Sebagai daerah pemukiman cukup padat, upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, tampaknya dapat dipenuhi sendiri dari berbagai fasilitas warung atau pertokoan yang ada di desanya; kecuali sebagian kebutuhan sandang dan papan yang tidak terdapat di desanya atau terdapat kekurangan, mereka membeli di kota Kabupaten (Pamekasan atau Sampang).

Di sisi lain, perhatian dan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan anak-anaknya sangat kurang. Anak-anak mereka terutama yang perempuan, pada umumnya hanya bersekolah hingga jenjang SD, itupun tidak seluruhnya tamat, terutama karena alasan akan “dikawinkan”, setidaknya hingga jenjang SLTP. Kepedulian masyarakat setempat terhadap arti penting pendidikan bagi masa depan kehidupan anak-anak mereka, mulai berubah sejak dasa warsa 90-an. Walaupun dengan tingkat persentase yang tidak terlalu tinggi, anak-anak mereka, laki-laki atau perempuan telah mulai ada yang disekolahkan hingga jenjang SMTA, dan hanya satu dua orang saja yang bisa mencapai jenjang Perguruan Tinggi.⁶⁾

⁶⁾ Menurut cerita pengalaman Bpk. Adrawi Zaini (salah seorang rekan peneliti yang berasal dari desa Bandaran), dia adalah “orang pertama” dari desanya yang bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang Sarjana. Dia adalah seorang anak kedua dari tiga bersaudara keluarga H. Zaini (*alm*) dan Hj. Sufiah yang dahulu adalah seorang juragan perahu di Desa Bandaran. Setelah menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1968, SLTP pada tahun 1971, serta SPAIN tahun 1974, dia tidak bisa langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, karena “dilarang keras” oleh kedua orang tuanya. Karena itu, dia bekerja sebagai nelayan dari perahu milik orang tuanya. Hal ini ia jalani selama ± 2 tahun. Dari penghasilannya sebagai nelayan selama dua tahun itulah, akhirnya dia memiliki sedikit uang untuk bekal melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi, walaupun untuk itu dia harus “menentang orang tuanya” yang tidak bersetuju dengannya, yang tetap berkeinginan agar dirinya tetap tinggal di desa melanjutkan usaha penangkapan ikan milik orang tuanya. Namun, karena kuatnya keinginan dirinya untuk dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan mungkin karena sudah menjadi takdir atau suratan nasib “yang di atas”, dia akhirnya berhasil diterima sebagai mahasiswa di kotanya sendiri, yaitu IAIN Sunan Ampel cabang Pamekasan, hingga dia berhasil meraih gelar Sarjana Muda pada tahun 1980;

B. Sistem Penangkapan Ikan di Laut

Penangkapan ikan di laut yang dikenal oleh penduduk desa-desa nelayan di Madura pada umumnya melalui tiga cara, yaitu: (1) *bagan*; (2) jaring (*phajang*); dan (3) pancing (*panceng*). Bagi masyarakat nelayan di Desa Bandaran, sistem jaring (*jaring lepas dan jaring lingkar, jaring gondrong*) merupakan sistem penangkapan utama atau umum diterapkan di dalam menangkap ikan di laut; sedangkan sistem penangkapan ikan melalui *bagan* tidak digunakan, mengingat kondisi laut di desa Bandaran ini cukup dalam dan terjal sehingga tidak memungkinkan penggunaan sistem *bagan*. Namun demikian, mereka cukup mengenal sistem *bagan* tersebut dari para nelayan di daerah lain di pulau Madura seperti Pragaan dan Talang. Penangkapan ikan dengan sistem pancing pun tidak terlalu banyak digunakan, karena secara ekonomis tidak terlalu efektif dan efisien; selain itu sistem pancing di antaranya pula hanya sebagai “sistem alternatif” apabila penggunaan jaring (*jaring lepas, jaring gondrong*) tidak banyak menghasilkan ikan tangkapan.

*Penangkapan Ikan melalui Sistem Bagan*⁷⁾

Sistem penangkapan ikan melalui *bagan* ini pertama kali diperkenalkan oleh para nelayan imigran dari Bugis pada tahun 1950-an, dan kemudian diadopsi oleh para nelayan (*reng majheng*) di Pulau Madura sebagai sebuah sistem penangkapan ikan pertama bagi mereka⁸⁾. Penangkapan ikan melalui sistem *bagan*, adalah sisten penangkapan ikan yang juga banyak dilakukan oleh nelayan di Pulau Madura, seperti Prenduan (pragaan) dan Talang, akan tetapi para nelayan di desa Bandaran sendiri tidak pernah menggunakannya, karena laut di sekitar daerah itu terlalu dalam untuk menggunakan sistem *bagan*.

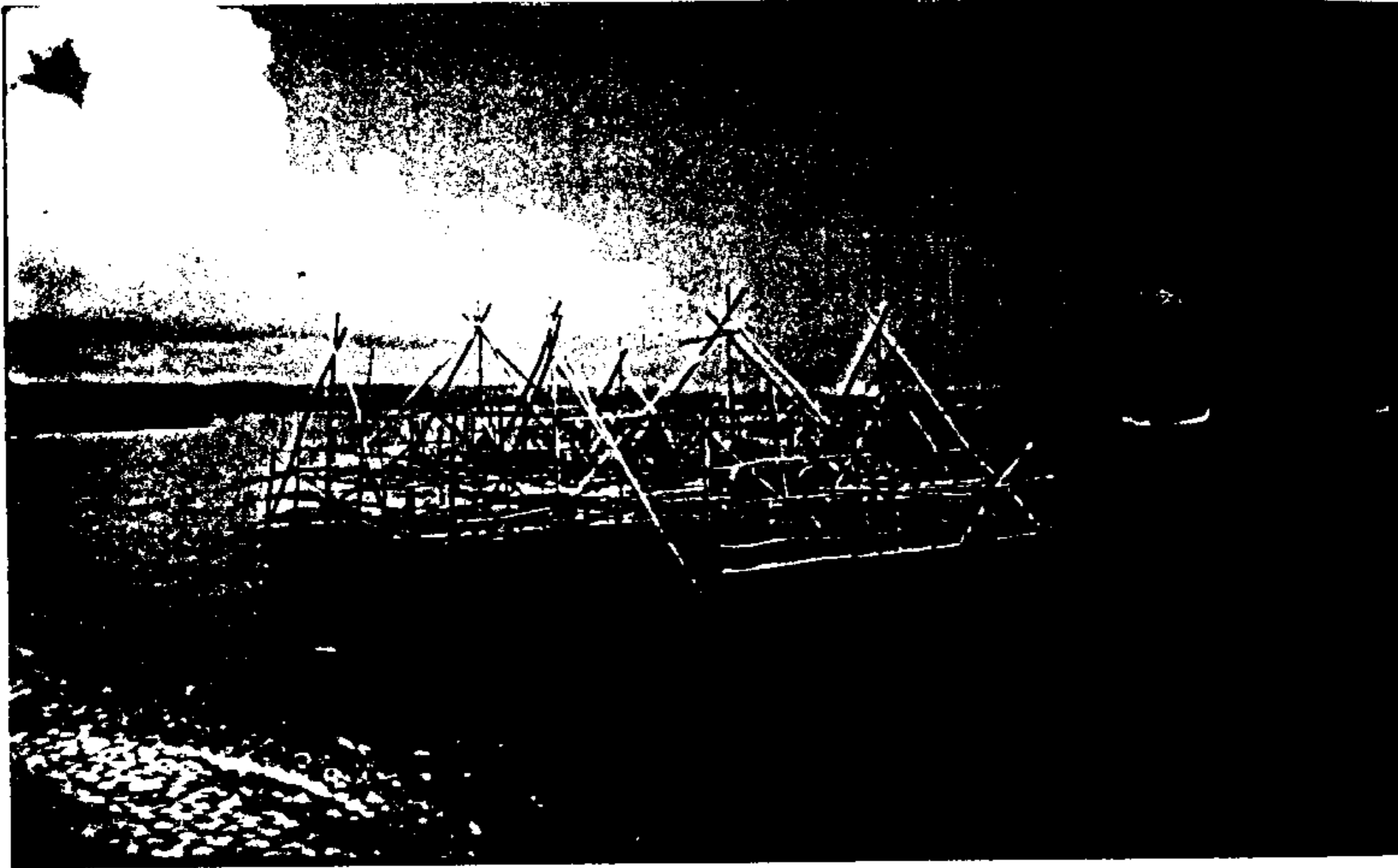
Bagan merupakan sebuah nama yang diberikan untuk sebuah bangunan dari bambu di laut untuk keperluan penangkapan khusus “ikan teri” (*jhuko' kenduy*). Selain itu, *bagan* juga berfungsi sebagai tempat para nelayan beristirahat

dan pada tahun 1985, diapun berhasil meraih gelar kesarjanaannya dari Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang. Bahkan sekarang pun, dia tetap merupakan orang pertama dari desa Bandaran yang mengikuti studi lanjutan ke jenjang S2 (Magister) di Universitas Islam Malang (UNISMA).

⁷⁾ informasi tentang sistem *bagan* ini banyak diperoleh dari de Jong (1989), di samping dari sejumlah informan nelayan di desa Bandaran.

⁸⁾ Para imigran Bugis ini, sekarang banyak terdapat di kepulauan Arjasa, Masa Lembu, Raas, Sapudi, dan pulau-pulau kecil lainnya di wilayah Kabupaten Sumenep

selama menunggu jaring diangkat, memasak ikan hasil tangkapan untuk dimakan, mengasinkan ikan, dan atau mempersiapkan lampu-lampu petromaks yang akan digunakan untuk menerangi *bagan* dan menarik perhatian ikan. Pembuatan *bagan* itu sendiri dilakukan ketika air laut sedang surut/kecil (*aeng kene*) oleh sekitar 5 orang dari masing-masing kelompok nelayan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan *bagan*.



Gambar 7: Bentuk “*Bagan*” sebagai Salah Satu Sistem Penangkapan Ikan di Daerah Perairan Dangkal dan Landai.

Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan *bagan*, kurang lebih sekitar 8-10 jam, dengan persiapan selama kurang lebih dua minggu. Sementara itu, pemeliharaan dan perbaikan *bagan* dilakukan ketika para nelayan memasuki istirahat melaut (yaitu sekitar satu minggu, antara tanggal 11-19 bulan Madura/Jawa). Karena *bagan* tersebut terbuat dari bambu, maka umurnya hanya bertahan kurang dari dua tahun, dan itupun apabila tidak rusak karena hembusan angin dan arus deras.

Setiap *bagan* memiliki ketinggian antara 15-20 meter dengan garis keliling sekitar 35-40 meter. Di bagian atas, dipasang atap yang terbuat dari jerami padi, untuk keperluan para nelayan beristirahat sambil menunggu hasil tangkapan ikan di jaring yang mereka pasang. Selain itu, karena aktivitas penangkapan ikan melalui sistem *bagan* ini tidak terlalu intensif—sifatnya hanya menunggu—maka di sela-sela waktu tersebut, mereka memanfaatkan waktu untuk memancing ikan

yang lebih besar, di antaranya tongkol (*jhuko' cakalan*), cumi-cumi (*jhuko' enus*), tengiri (*jhuko' cang-ngecang*), yang hasilnya sepenuhnya menjadi milik masing-masing pemancin. Mereka juga ada yang memasang jala *apung* di samping *bagan*, yang hasilnya dibagi antara mereka dengan pemilik *bagan*.

Penangkapan ikan dengan menggunakan sistem *bagan* ini, hanya dilakukan di daerah dekat pantai atau perairan laut dangkal (2-10 meter). Akan tetapi, sejalan dengan semakin menjauhnya daerah kawasan ikan, *bagan-bagan* tersebut semakin jauh dari pantai, bahkan bermil-mil dari lepas pantai, akan tetapi tingkat kedalamannya masih memungkinkan untuk dipasangkan bambu-bambu.

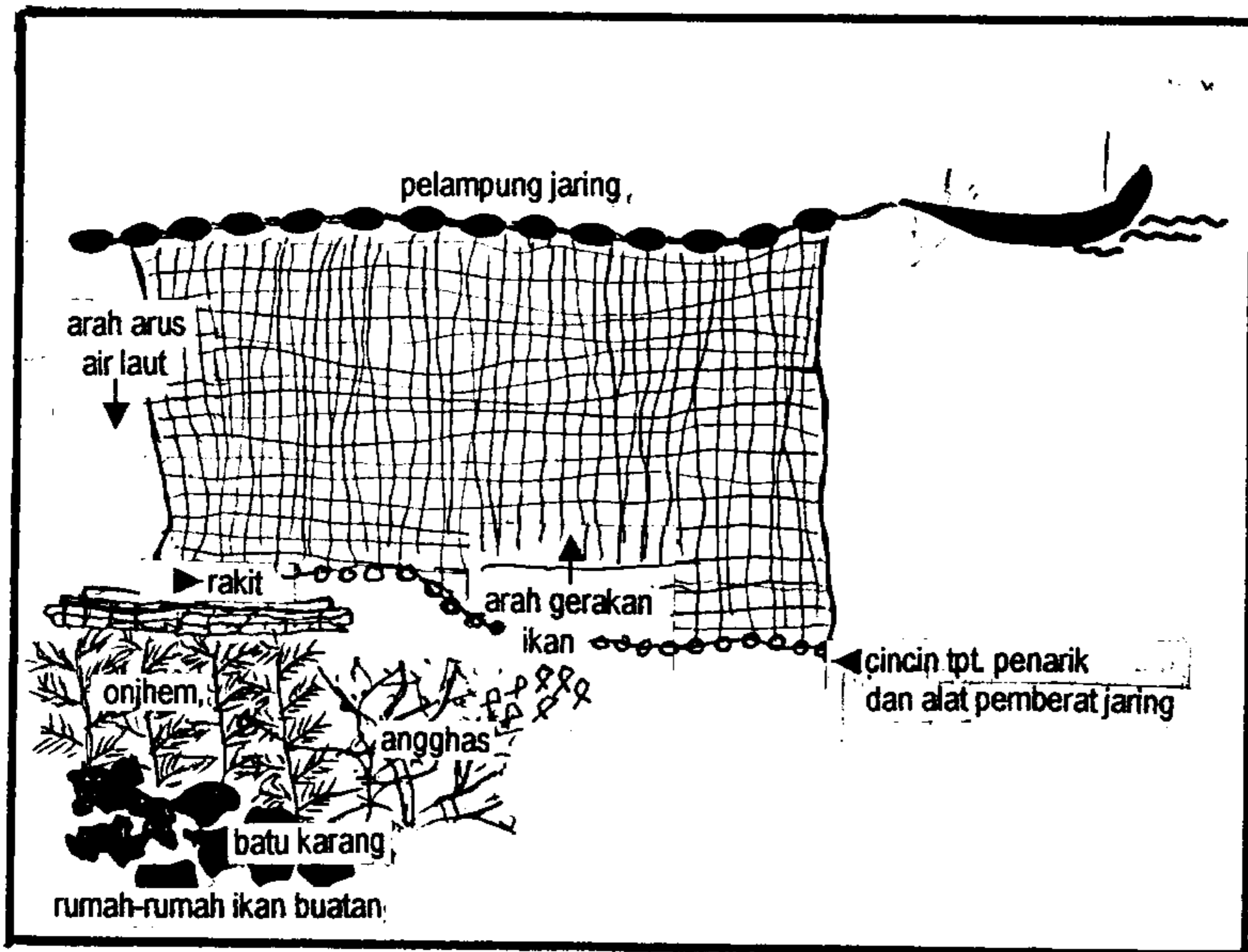
Penangkapan ikan dengan sistem *bagan* ini, dilakukan dengan cara memasang jaring seluas ukuran *bagan* di tengah-tengah *bagan*, hingga ke dasar laut. Masing-masing ujung jaring diikat dengan tali yang terbuat dari serabut kelapa atau *tali nylon* untuk keperluan mengangkat jaring tersebut apabila diperkirakan sudah banyak memuat ikan, yaitu sekitar 1 – 3 jam. Hal ini terus menerus dilakukan hingga jumlah ikan yang berhasil ditangkap untuk waktu itu dipandang cukup banyak. Waktu penangkapan ikan melalui *bagan* ini hanya dilakukan pada malam hari, di saat petang bulan (*pettengan*). Untuk menarik perhatian ikan, setelah jaring dilepas ke laut ditaburkan *dedak* atau *bekathul* sebagai umpan ikan, serta di tengah-tengah jaring dilampungkan sebuah lampu petromaks.

Penangkapan Ikan melalui Sistem Jaring

Sistem jaring merupakan sistem penangkapan ikan di laut yang utama bagi masyarakat nelayan desa Bandaran. Ada tiga jenis jaring (*phajang*) yang biasa digunakan untuk keperluan penangkapan ikan di laut, yaitu: (1) jaring lepas (*sethet*); (2) jaring gondrong; dan (3) jaring lingkaran (*sleret*); dan *rakat*.

(1) ***Jaring lepas*** atau *sethet*, memiliki ukuran panjang \pm 15 meter dan lebar \pm 20 meter. Untuk setiap kali penangkapan ikan jumlah jaring hingga mencapai lima buah. Kelima jaring tersebut, digunakan secara bergantian dan terus menerus hingga jumlah ikan tangkapan diperkirakan telah cukup banyak, dan kapal yang akan memuat hasil tangkapan ikan tersebut sudah penuh atau sarat dengan ikan hasil tangkapan. Penangkapan ikan dengan jaring *sethet* ini sekarang sudah jarang digunakan, karena dipandang kurang banyak menghasilkan ikan, dan lebih bersifat pasif, yaitu hanya menunggu datangnya

ikan atau banyaknya ikan yang berada di rumah-rumah buatan tersebut di atas. Penggunaan jaring jenis *pajhang lepas (sethet)* biasanya digunakan di daerah sekitar rumah-rumah ikan buatan (*onjhem dan angghas*)⁹⁾.



Gambar 8: Sistem Penangkapan Ikan di Sekitar Rumah Ikan Buatan dengan “Jaring SETHET”

⁹⁾ *Onjhem*, adalah rumah ikan buatan yang terbuat dari pelepah-pelepah daun kelapa (*lrep*) yang diikat secara bertingkat dengan tali serabut kelapa atau tali plastik hingga mencapai dasar laut (20-40 meter). *Onjhem* tersebut diikatkan pada bambu (*pereng*)—dinamakan *kolo*—berjumlah antara 2-10 buah yang diikat menjadi satu) yang berfungsi sebagai pelampung. *Kolo* yang sudah rusak berisi air diganti dengan yang baru. Di ujung bawah tali pengikat *lrep* dipasang jangkar buatan yang terbuat dari bambu dan batu, sebagai pengikatnya sehingga *lrep* tidak terseret oleh air dan tidak mengapung. Jumlah *onjhem* minimal tiga buah, dan terus ditambah setiap dua bulan sekali, sehingga benar-benar merupakan rumah bagi ikan. *Angghas* adalah rumah ikan buatan juga, tetapi digunakan untuk laut yang berkedalaman antara 10-20 meter. Seperti halnya *onjhem*, *angghas* juga terbuat dari dari pelepah-pelepah daun kelapa (*lrep*) yang diikat secara bertingkat dengan tali serabut kelapa atau tali plastik hingga mencapai dasar laut. Akan tetapi, ada juga yang dibuat dari pohon bambu yang beranting banyak “bambu duri” (*pereng noreh*) atau pepopohan yang bercabang dan beranting banyak. Sistem pemasangannya pun sama dengan *onjhem*. Sedangkan batu karang (*bato karang*) adalah jenis rumah ikan buatan lainnya yang terbuat dari batu-batu karang yang dibawa oleh nelayan dari pinggir pantai, dan dimasukkan ke dasar laut.

(2) *Jaring gondrong* adalah jaring yang secara khusus digunakan untuk penangkapan udang dan ikan dasar laut, dengan kedalaman antara 3-10 meter. Jaring gondrong ini berukuran kecil, yaitu panjang antara 50-200 meter dan lebar sekitar 2 meter, dengan besar lubang jaring \pm 1,5 sentimeter. Dinamakan *jaring gondrong*, karena bentuk jaring ini menyerupai jalinan rambut gondrong, agak tidak beraturan (*salbut*), karena selain jaring utama, masih terdapat lagi tali-tali plastik yang sangat kecil/halus yang berfungsi untuk menarik jaring utama tersebut sehingga agak menekuk. Apabila udang dan ikan telah masuk ke dalam jaring, udang dan ikan tadi seperti terjat, tidak bisa lepas kembali dari jaring yang telah tertekuk sisi bawahnya oleh tali-tali halus tadi.

Jaring gondrong khusus digunakan di kawasan laut yang tidak berbatu karang, dan jauh dari daerah sekitar rumah-rumah ikan buatan (*onjhem, angghas dan batu karang*), sehingga jaring tidak rusak terkait. Penangkapan udang/ikan di sekitar *onjhem, angghas* dengan menggunakan *jaring gondrong* dapat dilakukan setiap saat (pagi, siang, sore, dan malam hari), terutama ketika musim udang.

(3) *Jaring lingkar* jenis *sleret* adalah jaring yang bentuknya memanjang dengan ukuran panjang antara 500-1500 meter, dan lebar 50 meter atau sedalam laut, dengan lebar lobang jaring sekitar 1,5 sentimeter. Dinamakan *phajang lingkar (sleret)* karena di dalam pengoperasiannya dilakukan dengan melingkarkan jaring kawasan yang sudah dipastikan mengandung banyak ikan, hingga antara ujung jaring yang satu dengan yang lain bertemu, menutup kawasan gerak ikan. Selanjutnya setiap ujung jaring bagian bawah ditarik (*e sleret*) hingga membentuk sebuah wadah tertutup yang tidak memungkinkan ikan yang sudah masuk ke dalam bagian jaring yang dinamakan *konchong* tersebut tidak bisa lepas kembali. Baru kemudian jaring tersebut ditarik ke atas perahu oleh awak perahu yang disebut *pandhiga*. Dengan kemajuan teknologi penangkapan ikan, tenaga *pandhiga* ini telah digantikan oleh peran mesin penarik jaring yang disebut *mesin kardan*.

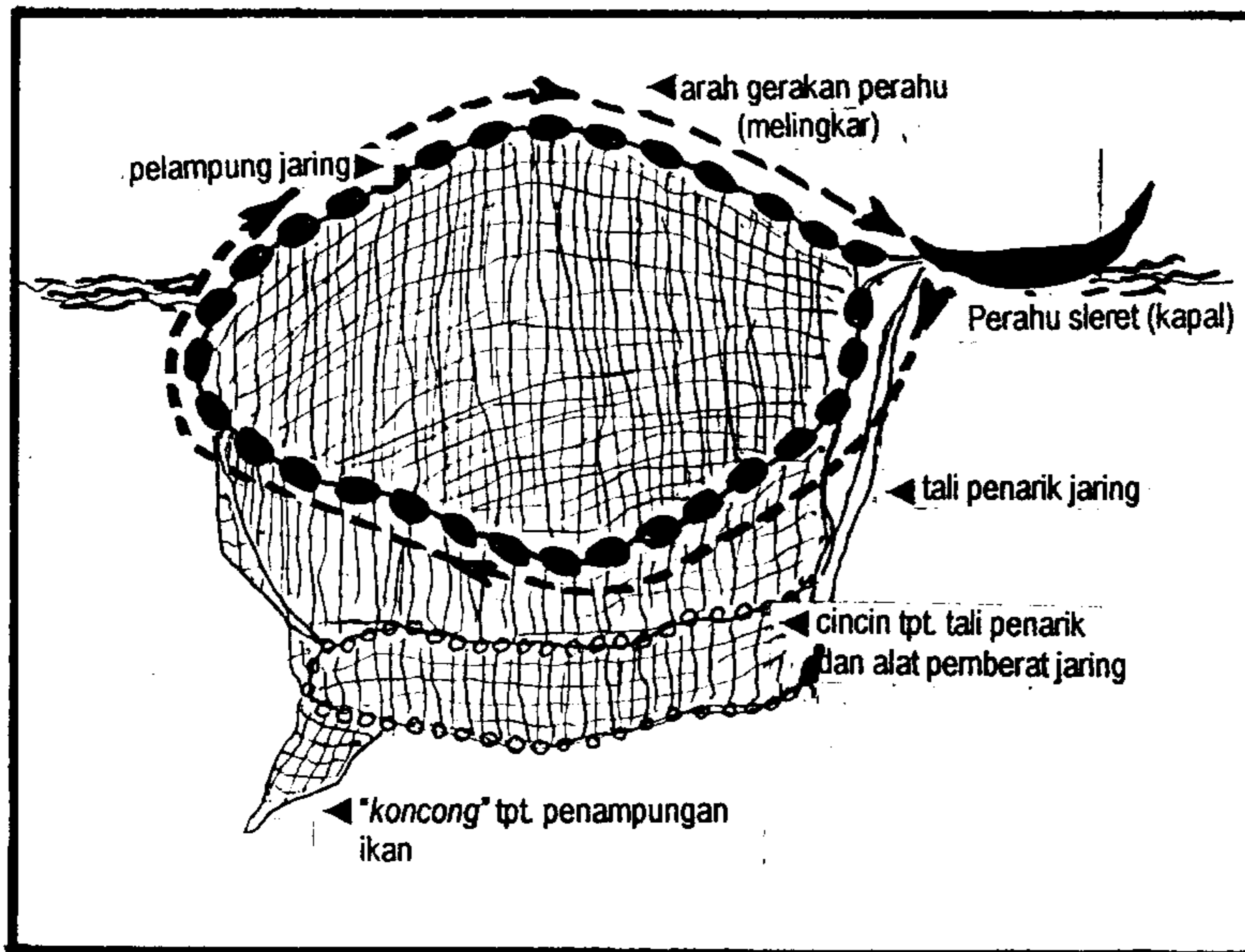
Penangkapan ikan dengan *jaring sleret* dapat dilakukan pada pagi, sore, atau malam hari¹⁰⁾, akan tetapi khusus penangkapan ikan di daerah

¹⁰⁾ Penangkapan ikan yang dilakukan pada siang dan sore hari dinamakan "*nyambhang*", yang secara harfiah berarti "mampir sebentar". Penamaan demikian karena waktu penangkapan hanya sebentar, yaitu untuk pagi hari antara pukul 0600 - 08.00 wib (*metto pajjhar* = matahari terbit), dan untuk sore hari antara

sekitar kawasan rumah-rumah ikan buatan (*onjhem*), sebelum jaring di lepas terlebih dahulu salah seorang anggota nelayan turun ke air untuk membawa dan memasang pelepah daun kelapa (*lerep*) baru (antara 5-10 ikat) di lokasi kawasan rumah-rumah ikan buatan (*onjhem*) tadi; setelah itu rumah-rumah ikan buatan (*onjhem*) tadi dilepas hingga tenggelam ke dasar laut, sehingga ikan-ikan yang semula berada di kawasan rumah-rumah ikan buatan (*onjhem*) berpindah menuju daun kelapa (*lerep*) yang baru dipasang tadi. Setelah itu, baru jaring dilepas.

Penangkapan ikan dengan *jaring sleret* menggunakan kapal/perahu besar jenis *sleret dan pakesan besar* dapat dilakukan sepanjang musim petang bulan (*mosem pettengan*) (antara tanggal 20 – 10 bulan *Madhura/Jawa*) tanpa ada jeda waktu untuk istirahat. Waktu-waktu lain yang oleh para nelayan Bandaran diperkirakan sebagai musim banyak ikan adalah ketika musim angin selatan (*angen laok*)--angin bertiup ke darat dari arah selatan—yang bagi nelayan Bandaran merupakan musim banyak ikan; sedangkan untuk jenis perahu/kapal kecil seperti *pakesan kecil (thitil)*, *sampan (edher)*, terdapat waktu istirahat tidak melaut selama satu hari setiap minggu, yaitu hari Jumat. Akan tetapi hal inipun melihat keadaan ikan di laut. Artinya, apabila diperkirakan pada hari Jumat tersebut merupakan masa ikan (banyak ikan), maka selepas sholat Jumat (pukul 14.00 wib) mereka tetap berangkat melaut. Para nelayan baru istirahat tidak melaut (*tak majheng*) manakala telah memasuki waktu terang bulan (*mosem tera'an*) sekitar 10-15 hari; atau pada saat musim angin barat (*mosem bharat*) sekitar 1 bulan; dan musim angin timur (*angen slabhung*; harfiah = angin yang berputar-putar tidak tentu arah) sekitar 10 hari (*satengnga bulan*) mereka tidak melaut. Kedua musim ini bagi nelayan Bandaran khususnya dan nelayan Madura pada umumnya musim-musim paceklik (*mosem laep*).

pkl. 14.00 – 18.00 wib (*rop-sorop are* = matahari hampir tenggelam). Ketiga waktu terakhir tersebut dipandang waktu yang paling tepat untuk menangkap ikan, karena pada ketiga saat tersebut ikan dalam keadaan "kebingungan" (*jhuko' posang*) akibat terjadinya pergantian siang dan malam, atau perubahan siklus pasang-surut air laut. Apabila para nelayan dapat melakukan penangkapan dengan tepat pada ketiga waktu itu, dapat dipastikan akan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak. Walaupun diakui pula, hal tersebut juga tergantung pada rejeki masing-masing nelayan. Sedangkan penangkapan ikan yang dilakukan pada malam hari dilakukan dengan bantuan 10-20 buah lampu petromaks. Apabila tidak menggunakan lampu petromaks, maka penangkapannya dilakukan dengan mencari cahaya yang terpantul dari percikan air karena pergerakan segerombolan ikan, oleh nelayan setempat dinamakan "*nyare bhura'an*" (harfiah = mencari pantulan cahaya)



Gambar 9: Sistem Penangkapan Ikan dengan “Jaring Lingkar”

(4) **Rakat** adalah jaring yang juga berbentuk persegi panjang, dengan ukuran dan bentuk hampir sama dengan jaring *sleret*, lebar 2 meter, serta memiliki lubang jaring sekitar 2 sentimeter. Khusus *konchong* (tempat penampungan ikan yang telah masuk jaring), memiliki ukuran lubang jaring antara $\frac{1}{2}$ - 1 cm. Jaring *rakat* ini hanya digunakan khusus untuk menangkap ikan di dekat dasar laut, serta hanya digunakan untuk perahu-perahu *pakesan kecil*, sedangkan jaring *lingkar (sleret)* digunakan untuk perahu-perahu besar jenis kapal seperti *kapal dan pakesan besar*.

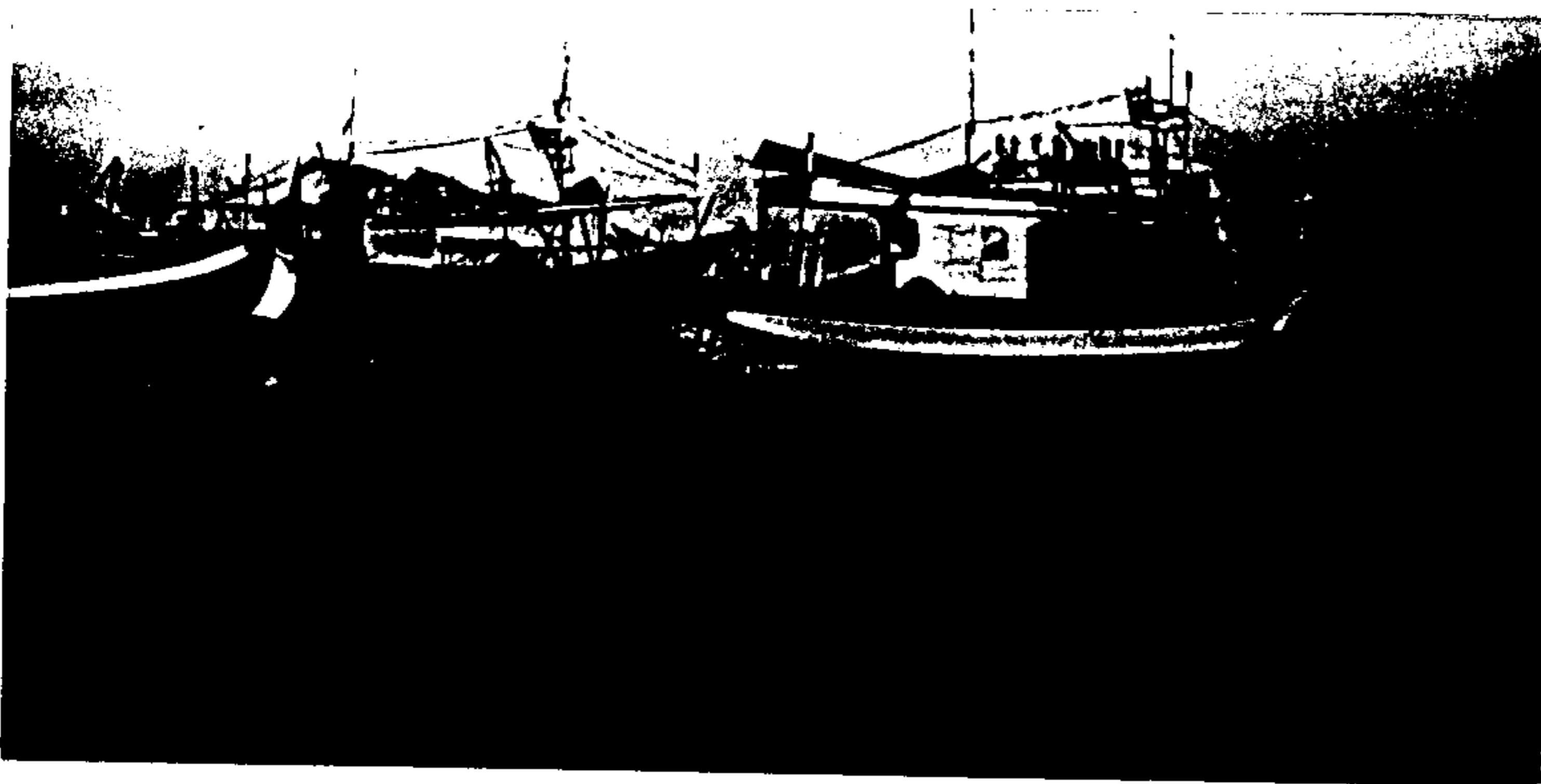
Di antara keempat jenis sistem penangkapan ikan dengan menggunakan sistem jaring di atas, yang hingga kini tetap bertahan dan masih banyak digunakan oleh nelayan tradisional di desa Bandaran adalah dengan jenis *jaring lingkar (sleret)*, *rakat*, dan *jaring gondrong*; sedangkan jaring lepas (*sethet*) kini hanya

sebagian kecil nelayan yang menggunakan (di desa Bandaran kini hanya tinggal 5 buah).

Berbagai jenis perahu yang digunakan para nelayan desa Bandaran untuk menangkap ikan yang ada sekarang, terdiri dari jenis dari yang paling besar hingga yang terkecil, yaitu: *kapal sleret, edher, pakesan kecil (thitil)*¹¹.



Gambar 10: "Edher" (Sampan) salah Satu Jenis Perahu Penangkapan Ikan



Gambar 11: Berbagai Jenis Perahu Penangkap Ikan yang Digunakan Nelayan Desa Bandaran untuk Menangkap Ikan di Laut

¹¹⁾ Pada beberapa waktu yang lalu, juga digunakan perahu jenis *Pakesan Besar, Modhus, Jhukong dan Lajhangan* (perahu bercadik), serta *Glathe*. *Pakesan Besar dan Glathe* digunakan untuk penangkapan ikan di kawasan yang sangat jauh dari lepas pantai, bahkan hingga ke daerah-daerah perairan di luar Bandaran (seperti ke Bali); *Modus, Jhukong dan Lajhangan* digunakan untuk penangkapan di daerah yang tidak terlalu jauh dari pantai tetapi masih cukup dalam (antara 3 KM dari garis pantai hingga batas perairan lepas pantai); sedangkan perahu jenis *jhukong, dan lajhangan* (perahu bercadik dengan ukuran kecil) digunakan di laut hingga sejauh 1 KM – 3 KM dari pantai, atau yang lazim disebut *ngaddhang* (secara harfiah berarti menghadang", yaitu menghadang ikan yang akan kembali ke laut dalam ketika air laut akan surut (*aeng kene*)).



Gambar 12: (di atas) Kapal Sleret akan Pergi Melaut; (di bawah) Perahu Nelayan yang Telah Datang dengan Membawa Ikan Hasil Tangkapannya

Penangkapan Ikan melalui Sistem Pancing (pancheng)

Sistem penangkapan ikan dengan menggunakan pancing ini, tidak begitu banyak dilakukan. Itupun sering secara individual, atau maksimal oleh dua orang, dengan atau tanpa perahu (*sampan*). Jaraknya pun hanya di dekat pantai atau paling jauh sekitar 50-100 meter dari pantai, baik di pagi atau sore hari. Para penangkap ikan melalui pancing ini biasa disebut *reng manceng*. Di bagian lain, seperti di Pragaan, memancing juga dilakukan di atas *bagan*, biasanya dilakukan di saat para nelayan *bagan* tersebut istirahat sambil menunggu hasil tangkapan ikan melalui jaring yang dipasang di *bagan*-nya (de Jong, 1989).

Jenis ikan yang bisa ditangkap dengan menggunakan pancing ini berupa ikan-ikan yang cukup besar, seperti: tongkol (*cakalan*), tengiri (*cang-ngecang*), dan berbagai jenis ikan besar yang lain. Ikan-ikan hasil memancing itu kemudian mereka jual ke pasar setempat dengan harga yang dapat dikatakan cukup tinggi (1 ikan tongkol per kilonya bisa mencapai Rp. 15.000,-). Hasil penjualan ikan-ikan tersebut mereka gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, pancing juga digunakan oleh nelayan yang menggunakan *Pakesan Kecil, Edher* yang dilakukan manakala jaring (*gondrong dan lepas*) yang

ditebar tidak memberikan hasil tangkapan ikan yang memadai, atau sama sekali tidak ada hasilnya. Pancing bukan milik juragan pemilik kapal, tetapi milik masing-masing anggota nelayan.

B. Organisasi dan Pola Relasi Kerjasama Antar-Nelayan

Tidak seperti halnya aktivitas ekonomi yang lain, kehidupan para nelayan bukanlah bersifat individual, tetapi berkelompok. Setiap kelompok bervariasi jumlah anggotanya, bergantung pada jenis jaring dan perahu yang digunakan. Untuk jenis perahu kecil jenis *edher* dan *pakesan kecil* beranggotakan 2 - 5 orang; sedangkan untuk perahu jenis *pakesan besar* beranggotakan antara 14 - 18 orang; tetapi untuk perahu jenis *kapal sleret* bisa mencapai 30 orang anggota nelayan, dan minimal beranggotakan 23 orang. Oleh sebab itu, sebagai sebuah pekerjaan kolektif, para nelayan terorganisasi dalam kelompok-kelompok nelayan.

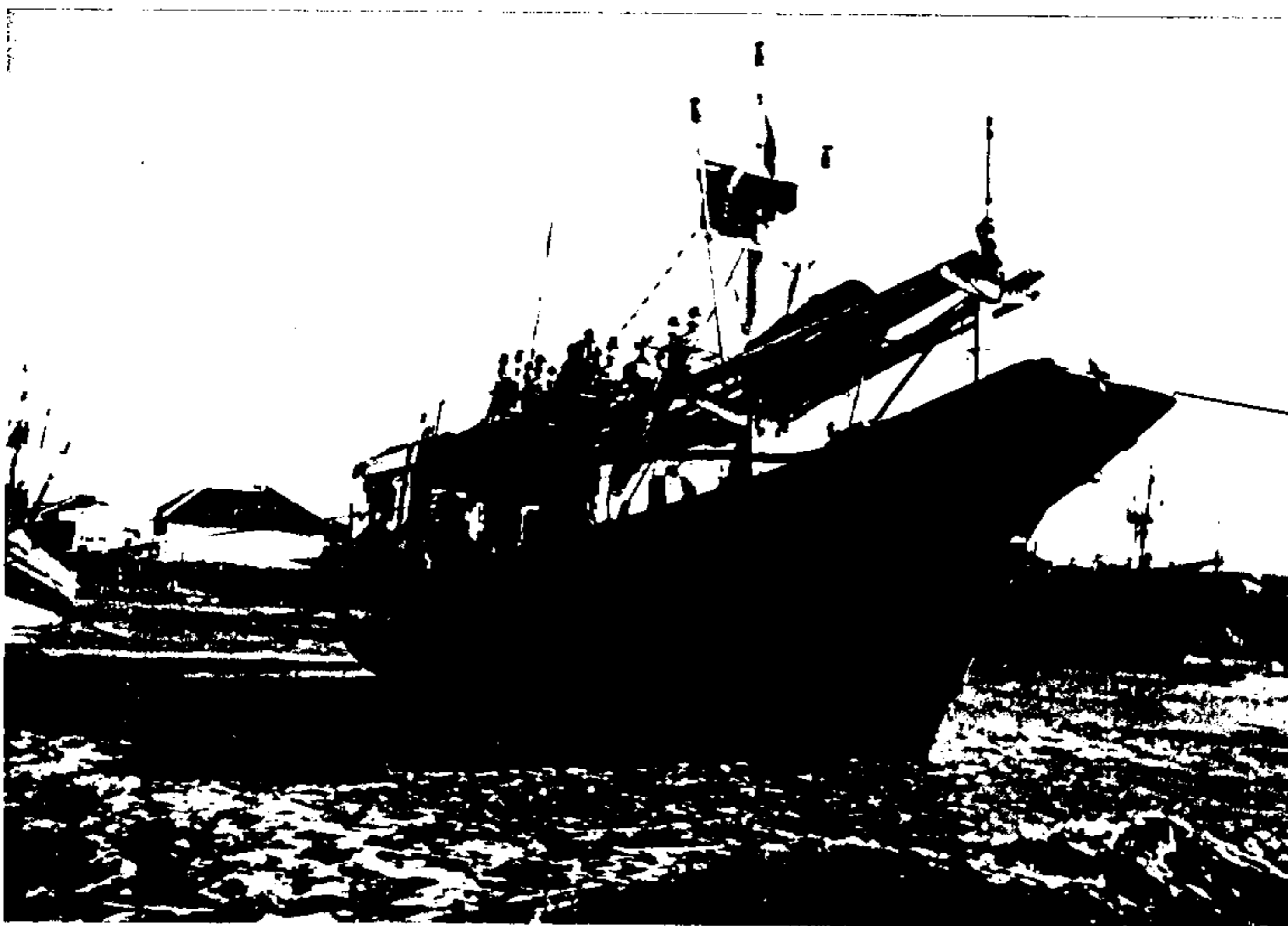
Di dalam masyarakat nelayan di desa Bandaran, setiap kelompok nelayan terdiri dari: (1) *juragan pemilik kapal/perahu*; (2) *juragan kepala perahu*; (2) *pandhiga*¹²⁾.

(1) *Juragan pemilik kapal/prahu (jraghan praho)* adalah orang yang memiliki kapal/perahu, beserta jaring, dan mesinnya. Mereka adalah para pemilik modal yang mampu mengadakan kapal/perahu, jaring, serta mesin. Di desa Bandaran, tidak kurang dari 100 orang pemilik kapal/perahu, jaring, serta mesin, yang jumlah kepemilikannya bisa lebih dari dua buah. Para pemilik kapal/perahu, jaring, serta mesin tersebut sebagian sudah pernah naik haji atau bergelar seorang haji, seperti: H. Rahem, H. Abd. Rasyid (*klebhun* desa Bandaran yang sekarang), H. Sukardi, H. Zainollah, H. Syarif; H. Abd. Latief; tetapi ada juga yang hingga sekarang masih belum bergelar haji, seperti: *pak* Satumin, *pak* Rusdi, *pak* Mulyadi (putra H. Rahem), *pak* Munawir, *pak* Thoha, dan *pak* Ismail.

Kapal/perahu yang mereka miliki tidak hanya satu buah, tetapi ada yang hingga 4 buah, tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki; dengan nama masing-masing. H. Rahem dan putranya memiliki perahu jenis *sleret* sebanyak 4 buah dengan nama: *se Sekar*, *se Sumber*, *se Merpati*, dan *se*

¹²⁾ Jenis keanggotaan sebuah kelompok nelayan di Pasean dapat dibaca dalam (Djojmartono, 1985 di Pragaan Sumenep dalam de Jong (1989).

Sekar Datang. H. Abdul Latief hanya memiliki satu buah kapal yang dinamakan *se Sari Indah*, milik *pak* Munawir dinamakan *se Mega*, *pak* Thoha (*se Marlboro*); *pak* Ismail (*se Marcopolo*). Pemberian nama kepada kapal/perahu mereka tersebut, selain karena atribut-atributnya yang indah, seperti *se Sekar* atau *Sekar Datang*; atau karena perahu tersebut merupakan “sumber penghidupan” mereka seperti *se Sumber*; karena larinya cepat (*se Merpati*); atau karena dia pengikut atau partisipan Megawati (*se Mega*); maupun nama-nama lain yang mereka kenal seperti *se Marcopolo* atau *se Marlboro*.



Gambar 13: Pak Rusdi, Salah Seorang Juragan di atas Kapal Sleret “se Mega” Miliknya

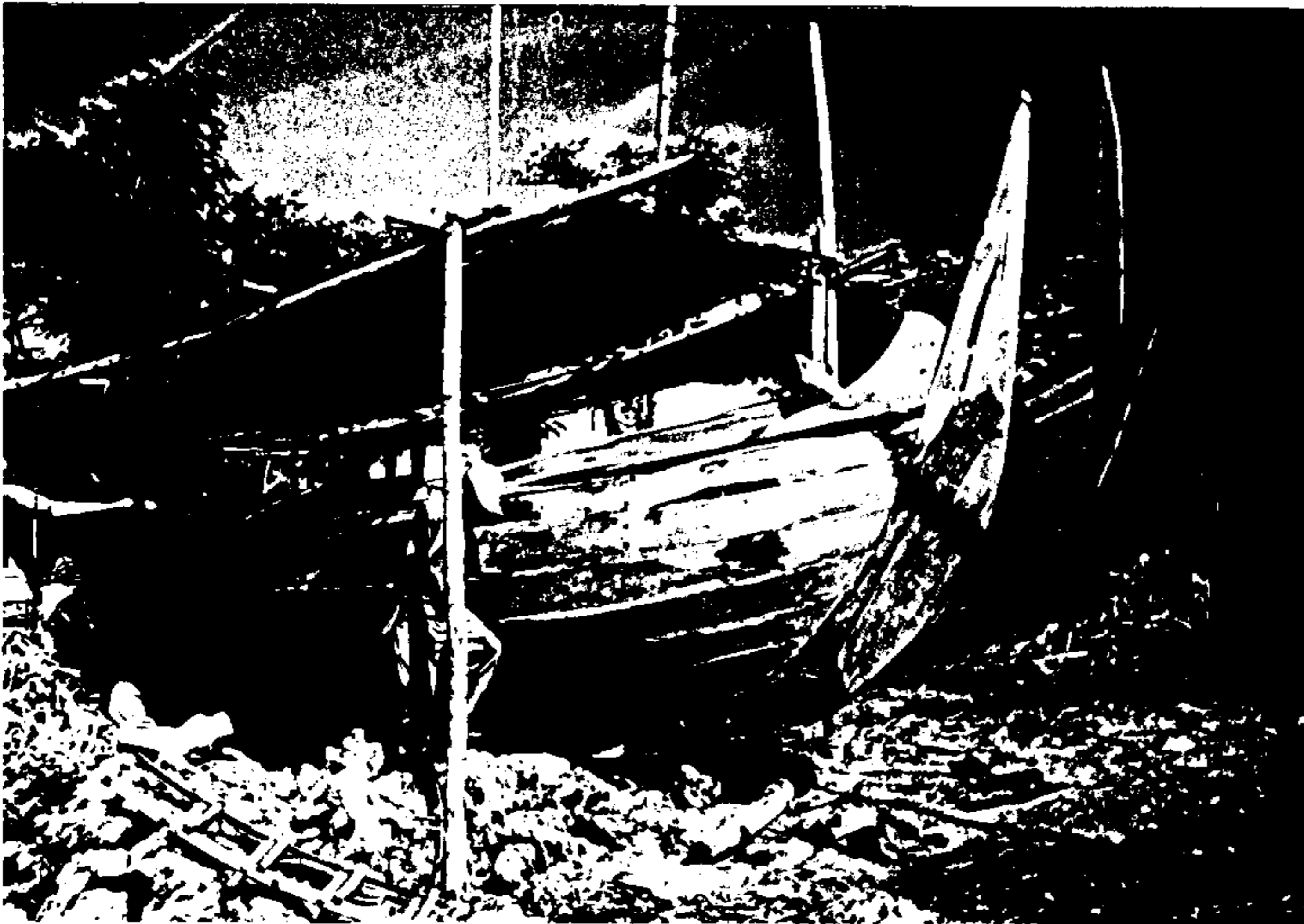
Penangkapan ikan sebagai bentuk usaha perikanan laut, merupakan usaha “padat modal”, baik untuk keperluan pengadaan peralatan, kecuali ketika seluruh pengoperasian kapal/perahu masih menggunakan tenaga manusia, usaha ini juga bersifat “padat tenaga”. Untuk pengadaan peralatannya saja untuk waktu sekarang, diperlukan investasi setidaknya Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta; baik untuk keperluan membeli perahu, jaring, petromak, serta mesin diesel pendorong perahu (*mesin tempel*) dan mesin penarik jaring (*mesin kardan*) dengan kekuatan 30-40 PK; serta biaya

operasional berkisar antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,- untuk pembelian bahan bakar solar, dan peralatan lainnya selama musim penangkapan ikan.

Untuk pengadaan kapal/perahu, mereka cukup membeli di daerah setempat kepada penduduk setempat yang secara khusus menangani pembuatan kapal/perahu (*tokang agabay praho*), atau juragan perahu tadi mendatangkan tukang pembuat perahu untuk membuat perahu sesuai dengan jenis dan ukuran yang dikehendaki.

Di desa Bandaran ini, setidaknya-tidaknya terdapat sebanyak lima kelompok pembuatan kapal/perahu. Salah satunya—yang menjadi informan—adalah milik *pak* Tapa. Dia adalah seorang juragan *Meubel* yang sekaligus menangani pemesanan pembuatan kapal/perahu dari para juragan perahu desa Bandaran. Jenis kapal/perahu yang kini banyak dipesan/dibuat adalah kapal *sleret* (ukuran 16 M X 6 M), dan *pakesan kecil* (*thithil*, secara harfiah berarti “kecil”) (ukuran 8 M X 4 M)¹³⁾, *Edher*, yaitu sejenis perahu yang lebih kecil, kini sudah jarang diproduksi, karena para nelayan di desa Bandaran juga sudah jarang atau bahkan sama sekali tidak menggunakannya. Perahu jenis “*thithil*” saja di desa Bandaran kini hanya tinggal lima buah. Tidak digunakannya jenis perahu kecil (*edher*) menurut dia, karena penghasilannya sangat sedikit, karena mereka kalah bersaing dengan kapal/perahu besar jenis *sleret* dan *pakesan besar* yang kini lebih banyak digunakan oleh nelayan setempat.

¹³⁾ Untuk pembuatan perahu besar jenis *sleret/kapal* (ukuran 16 M X 6 M), dibutuhkan sebanyak \pm 2 kubik kayu jati, dan untuk jenis *pakesan kecil* (ukuran 8 M X 4 M) sebanyak \pm 1 kubik kayu jati, belum termasuk kayu jenis trembesi untuk bagian punggung kapal/perahu (*lonas*). Biaya investasi yang dibutuhkan berkisar antar Rp. 7000.000 - Rp. 1.5.000.000,- untuk setiap unit kapal/perahu, untuk kebutuhan pengadaan kayu dan perkakas pembuatan lainnya, serta untuk biaya makan dan ongkos tukang dan para pekerja pembantunya. Sebuah kapal *sleret* dikerjakan oleh dua orang tukang dan sekitar 4/5 orang pekerja pembantu, dengan jangka waktu penyelesaian selama \pm 2 bulan; sedangkan Sebuah untuk perahu jenis *pakesan kecil* dikerjakan oleh satu orang tukang dan sekitar 3/4 orang pekerja pembantu, dengan jangka waktu penyelesaian selama \pm 1 bulan. Para tukang perahu tersebut, berasal dari kampung *Morsongai* (Timur Sungai) di desa Branta Pesisir sebelah timur desa Bandaran; sementara para pekerja pembantunya berasal dari desa Bandaran sendiri. Ongkos seorang tukang perahu sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan (atau setiap hari sebesar Rp. 50.000,-), dan para pekerja pembantu sebesar antara Rp. 12.000 - Rp. 15.000,- perhari. Harga jual sebuah kapal *sleret* sebesar Rp. 55 juta, dan jenis *pakesan kecil* sebesar 7 juta (dalam keadaan mentah, belum dicat/dihias).



Gambar 14: Tukang Perahu dan Para Pekerja sedang Membuat Kapal/Perahu

Kepemilikan kapal/perahu, jaring, serta mesin tersebut diperoleh para juragan pemilik kapal/perahu dari tiga cara, yaitu: *arisan*, *berhutang*, atau dari harta *warisan* keluarga. Namun, dari ketiga cara tersebut, *arisan* merupakan cara yang banyak dilakukan oleh para juragan perahu untuk memiliki sebuah kapal/perahu.

Arisan (aresan) -merupakan cara yang paling banyak mereka lakukan untuk mendapatkan banyak modal guna keperluan memiliki atau menambah armada kapal/perahu, tetapi dengan sedikit risiko. Menurut *pak Rusdi* (salah seorang informan juragan pemilik perahu), besarnya perolehan uang *arisan* berkisar antara Rp. 15.000.000,-, s.d Rp. 50.000.000,-. Penarikan lotere dilakukan pada setiap akhir bulan, akan tetapi uang *arisan* tersebut, tidak dilakukan sekaligus pada akhir bulan atau ketika akan dilotere, tetapi dilakukan setiap hari sebesar antara Rp. 10.000,- hingga 50.000,-, serta bergantung pada besar kecilnya hasil penangkapan ikan yang diperoleh dari

perahu/kapalnya. Kesertaan para juragan perahu tidak hanya dalam arisan ini, tidak satu kelompok arisan, bisa dua hingga lima kelompok arisan.

Hutang (*otang*) dilakukan dengan cara meminjam uang kepada para pemilik modal atau perahu/kapal yang lain untuk menambah kekurangan modal yang diperoleh dari hasil arisan, sesuai dengan jumlah/besarnya kebutuhan untuk pengadaan sebuah kapal/perahu jenis *sleret*, lengkap dengan segala peralatannya (mesin *kardan dan tempel, phajang*, dan lain-lain), yang diperkirakan bisa mencapai antara Rp. 150 juta s.d Rp. 200 juta. Dalam hal ini, tidak ditemukan di antara mereka yang berhutang atau mengambil kredit melalui Bank atau Koperasi Desa. Menurut mereka, hal ini disebabkan karena apabila meminjam uang melalui bank memiliki risiko yang, dan diperkirakan tidak dapat dipastikan pelunasannya, mengingat sangat bergantung pada jumlah hasil penangkapan ikan setiap musim atau bulannya. Selain itu, juga disebabkan karena prosedur peminjaman uang di bank dalam jumlah yang sangat besar dipandang cukup merepotkan, sementara keperluan untuk pengadaan kapal/perahu dengan segala peralatannya harus segera dipenuhi. Hal ini berbeda apabila mereka meminjam dari kolega pemilik perahu/kapal atau pemodal lainnya. Selain karena mereka adalah para tetangganya sendiri, juga lebih didasarkan pada kepercayaan, serta merekapun tahu persis bagaimana kehidupan mereka sebagai nelayan.

(2) **Juragan pimpinan perahu (*jraghan kepala*)¹⁴⁾**, adalah orang yang memegang pimpinan atau komando dalam sebuah operasi penangkapan ikan di laut untuk jenis *kapal, pakesan besar*, yang berkapasitas besar (berton-ton). Seorang *jraghan kepala* untuk jenis *kapal sleret, pakesan besar*, bukanlah sembarang orang, tetapi seseorang yang benar-benar harus dipilih oleh para pemilik kapal/perahu dari sekian banyak nelayan berpengalaman untuk mendapatkan kepercayaan penuh memegang komando dalam operasi penangkapan ikan. Untuk dipilih dan menjadi seorang *jraghan kepala*, dia harus telah berpengalaman sebagai nelayan dalam waktu yang cukup lama, yang memungkinkan dirinya banyak mengenal teknik penangkapan ikan, waktu yang tepat untuk melaut (*majheng*) untuk menangkap ikan dan/atau

¹⁴⁾ Di daerah Pragaan, seorang *jraghan* selain sebagai pemimpin dari sebuah atau beberapa kelompok nelayan, sekaligus juga pemilik modal, serta kapal/perahu yang digunakan oleh kelompok nelayan penangkap ikan, serta yang bertanggung jawab terhadap setiap risiko yang ditimbulkan selama

melepaskan jaring ke laut, dimana posisi laut yang banyak ikannya, atau pengetahuan dan pengalaman lain yang sangat dibutuhkan dalam suatu aktivitas penangkapan ikan.

Jraghan kepala juga adalah seseorang yang memiliki hubungan dan komunikasi dengan berbagai kelompok nelayan baik yang berasal dari daerah setempat atau lain daerahnya. Kepemilikan hubungan yang luas ini, bagi seorang *jraghan kepala* sangat penting artinya untuk menghindari bentrok dengan kelompok nelayan lain yang pada saat bersamaan akan melepas jaring di lokasi penangkapan ikan yang sama, serta untuk memperoleh akses informasi tentang dimana lokasi laut yang banyak mengandung ikan.

Jumlah *jraghan kepala* ini, sesuai dengan jumlah kapal/perahu yang ada (setidak-tidaknya 100 orang). Beberapa orang yang berstatus sebagai *jraghan kepala* ini antara lain: Sjakur, Supi, Sumardi, Pak Asmad (Pini), Maimun, dan lain-lain. Para *jraghan kepala* ini tidak seluruhnya orang yang sudah berumur (30-40 tahun), tetapi banyak pula yang masih muda (20-25 tahun).

(3) *Pandhiga* adalah para awak/anggota perahu atau nelayan biasa adalah seluruh pekerja yang melakukan seluruh aktivitas penangkapan ikan dalam sebuah kelompok nelayan, tidak termasuk *jraghan kepala*. Dalam sebuah armada kapal/perahu jenis *kapal sleret* bisa beranggotakan hingga 30 orang, dan minimal 23 orang; dan untuk perahu jenis *pakesun kecil* minimal 2-5 orang *pandhiga* untuk setiap kali operasi penangkapan ikan. Mengingat bahwa jenis kapal/perahu memerlukan banyak orang untuk mengoperasikannya, maka apabila kurang dari jumlah minimal tadi, mereka tidak akan berangkat.

Pada dasarnya, nama-nama dari setiap *pandhiga* untuk seluruh jenis kapal/perahu adalah sama, kecuali jumlah orang yang terlibat di dalamnya tergantung pada jenis kapal/perahu yang digunakan. Berdasarkan jenis aktivitas dan tanggung jawab masing-masing *phandiga*, mereka terdiri dari (1) 2 orang *toron aeng*, yaitu anggota perahu yang bertugas sebagai pemegang lampu petromaks yang menandai posisi awal ketika jaring akan dilepas ke laut kawasan tempat penangkapan ikan; dan pemegang senter ketika jaring akan dilepas; (2) dua orang *tokang mesin (montir)*, yaitu mereka yang bertanggung

penangkapan ikan. *Jraghan* juga sebagai sebutan bagi orang-orang di lingkungan masyarakat nelayan yang membeli seluruh hasil ikan tangkapan para nelayan (*abhurung*) (de Joung, 1989).

jawab terhadap mesin pendorong kapal (mesin tempel), atau mesin penarik jaring (mesin kardan); (3) “*jur muddhi*” atau *tokang pancher*, yang bertugas mengatur/mengarahkan jalannya perahu ke lokasi yang dituju, sekaligus bertugas sebagai “wakil juragan kepala”; (4) *tokang phajang* (tukang melepas/melempar jaring); (5) *tokang jhangkar*, yaitu petugas pemegang/pelepas jangkar ketika membuang sauh di tengah laut; (6) *tokang jaga jhala*, yaitu yang bertugas mengambil ujung jaring yang satu untuk disatukan/dipertemukan dengan ujung jaring yang satunya lagi (*jaring sleret*); (7) *gurit*, yaitu mereka yang bertugas untuk menata/mengatur jaring yang akan dilepas/dilemparkan ke laut dan/atau jaring yang sudah ditarik ke kapal/perahu sehingga tetap tertata dengan rapi dan benar seperti semula, dan tidak semrawut (*ta’ salbut*); serta (8) *tokang jaga/ghulung talena pajhang* (penggulung jaring), yaitu anggota nelayan yang secara khusus bertugas untuk menjaga tali jaring ketika jaring dilepas/dilempar ke laut sehingga lancar dan tidak tersangkut pada perahu, serta menggulung tali jaring kembali ketika jaring yang sudah penuh dengan ikan ditarik kembali ke atas perahu/kapal.

Selain ketiga kelompok nelayan tersebut, masih terdapat beberapa orang anggota lain, akan tetapi mereka tidak ikut serta melakukan penangkapan ikan di laut. Orang-orang tersebut adalah: (1) *tokang nampo*, yaitu orang yang bertugas untuk membersihkan kapal/perahu selama masa istirahat tidak melaut. Dia juga memiliki tugas untuk menarik kapal/perahu ke tengah laut apabila air laut lagi surut, serta menambatkan perahu yang baru datang melaut (*tandhuk majheng*) di tempat yang aman; memelihara (mengecat dan memperbaiki kerusakan perahu/kapal). Aktivitas memperbaiki kapal/perahu ini dilakukan selama masa istirahat tidak melaut, yaitu “musim terang bulan” (*mosem tera’an*), yang waktunya kurang lebih antara 7-10 hari; (2) *tokang jagha’an*, yaitu petugas penghubung atau pemberi informasi kepada seluruh awak kapal/perahu tentang keberangkatan kapal/perahunya. Tugas ini dipegang oleh seorang perempuan (*reng bine’*); (3) *kyae* atau *reng penter*, yang diminta memberikan doa restu dan selamat kepada seluruh awak perahu dan *jraghan kepala* yang akan berangkat melaut¹⁵⁾.

¹⁵⁾ Dalam kehidupan nelayan desa Bandaran, seorang “kyai” (*kyae*), walaupun sebenarnya tidak termasuk ke dalam anggota kelompok nelayan, akan tetapi dia mendapatkan sebanyak 1 bagian dari hasil penangkapan ikan pada setiap kali melaut. Hal ini karena seorang kyai memiliki peran strategis dalam

Organisasi dan hubungan kerjasama di antara *jraghan praho/kapal*, *jraghan kepala* dan *awak perahu/kapal* di atas tidaklah terlalu ketat, serta semata-mata didasarkan pada hubungan ekonomi-bisnis. Faktor-faktor yang bersifat “kekeluargaan” juga mewarnai pola relasi kerjasama di antara mereka. Artinya, siapapun orangnya, dia dapat masuk menjadi pengikut atau awak perahu (*pandhiga*) dari seorang pemilik perahu tertentu dan/atau para pemilik perahu yang lain, secara sukarela, tanpa ada paksaan. Demikian pula, mereka pun dapat keluar dari keanggotaan suatu kelompok nelayan tersebut kapan mereka menghendaki, tanpa harus menunggu habisnya satu *mosem petthengan*; atau apabila menurut mereka kapal/perahu yang mereka ikuti kurang memberikan hasil yang mencukupi atau memuaskan kebutuhan diri dan keluarganya. Seorang pemilik perahu tidak memiliki wewenang dan hak untuk melarang para anggota perahunya tersebut untuk tidak meninggalkan perahu miliknya. Sekalipun pada waktu-waktu sebelumnya mereka telah mendapatkan berbagai keuntungan secara ekonomis dari penghasilannya menangkap ikan. Hal ini juga berlaku bagi seorang *jraghan kepala*, namun tampaknya hal ini jarang terjadi, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang mengharuskannya untuk berpindah ke kapal/perahu lain, seperti apabila penghasilan kapal/perahu tersebut tidak banyak untuk beberapa kali *mosem petthengan*.

Longgarnya organisasi dan hubungan kerjasama kemitraan di antara pemilik kapal, juragan dan awak perahu tersebut tampaknya disebabkan oleh pola rekrutmen keanggotaan yang juga tidak terlalu ketat, prosedural, atau dengan berbagai persyaratan sebagaimana layaknya sebuah usaha profesional. Khusus untuk seorang *jraghan kepala*, mengingat pentingnya peran dan tanggungjawab dia sebagai “pemegang komando” dalam suatu operasi penangkapan ikan, maka hanya dipersyaratkan bagi setiap nelayan yang telah memiliki banyak pengalaman

keyakinan para nelayan di desa Bandaran. Dia adalah seorang “ahli spiritual” yang memberikan “petunjuk spiritual” bagi nelayan sehingga bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak.

Seorang kyai, juga sangat berperan apabila para nelayan akan mengadakan upacara selamatan di laut (*rokat*). Berkaitan dengan upacara *rokat*, selama ini di desa Bandaran hanya pernah dilakukan sekali, yaitu tahun 19908. Upacara *rokatan* ini diadakan, berkenaan dengan terjadinya musibah hilangnya seorang anggota nelayan “secara tiba-tiba” di tengah laut ketika sedang melaut. Acara *rokat* dilakukan pada pagi hari hingga tengah hari. Berbagai jenis makanan (nasi, ikan, kue jajan), hewan piaraan (ayam), pakaian (sarung, kopiah, baju, sandal) yang biasa dimakan, dipelihara atau digunakan oleh penduduk disiapkan dan diletakkan di atas sebuah rakit bambu, kemudian ditarik oleh perahu dengan didampingi oleh sejumlah perahu nelayan untuk kemudian dilepas ke tengah laut. Sebelum acara pemberangkatan dan pelepasan sesajian tersebut, seorang kyai memimpin dan sekaligus mengajak seluruh penduduk untuk memohon ampun kepada “*Guste Allah*” atas segala dosa dan kesalahan yang pernah mereka perbuat selama ini, serta memohon agar para nelayan mendapatkan perlindungan, serta hasil ikan yang banyak dan barokah.

di bidang penangkapan ikan di laut serta luasnya hubungan dan komunikasi dengan berbagai kelompok nelayan yang ada di daerah itu atau di luar desa Bandaran.

Sistem atau pola rekrutmen keanggotaan nelayan dilakukan secara: (1) *sukarela*; dan (2) *membeli*. Cara *sukarela*, adalah perekrutan seseorang dalam sebuah kelompok nelayan yang terbuka bagi siapa saja, atas dasar kesukarelaan yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok nelayan. Kesediaan seseorang untuk menjadi awak perahu ada yang “diajak” oleh juragan perahu atau juragan kepalanya, ada juga karena “keinginan sendiri” untuk ikut menjadi anggota kelompok nelayan. Kerelaan untuk diajak atau karena keinginan sendiri untuk anggota kelompok nelayan tersebut, terjadi apabila kapal/perahu yang akan diikuti itu setiap hari atau setiap musim melaut (*sabbhan mosem majheng*) senantiasa membawa hasil tangkapan ikan yang banyak (*sarat jhuko*), sehingga para anggota perahu itu merasa dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Karena perahu/kapal tersebut dianggap “berjaya” (*jhajah*), maka setiap nelayan pasti tertarik untuk ikut menjadi anggota dan bergabung dengan perahu tadi. Bahkan bukan mustahil, menyebabkan jumlah keanggotaannya bisa mencapai 30 orang nelayan setiap harinya atau selama satu musim penangkapan ikan. Semakin banyak para nelayan setempat bergabung dengan perahunya, semakin tinggi “pamor” perahu dan pemiliknya baik di mata para *pandhiga*, *juraghan kepala*, dan atau para pemilik perahu yang lain. Dengan kata lain, dalam hal ini, tanpa diundang, dengan sendirinya para *pandhiga*, *juraghan kepala* serta merta akan tertarik bergabung dan menjadi anggotanya. Akibatnya, para pemilik perahu bisa mengambil sikap “jual mahal” (*rang malarang*), walaupun kasus ini sangat jarang terjadi, karena seorang juragan perahu biasanya justru sangat senang apabila perahu/kapal miliknya banyak memiliki anggota, selain sedikit banyaknya anggota sama sekali tidak mempengaruhi jumlah bagian ikan yang akan diterima.

Sistem yang kedua, yaitu “membeli” (*melle*) dilakukan manakala sebuah kapal/perahu tersebut pada setiap hari atau setiap musim melaut dapat dikatakan sedikit atau sama sekali tidak membawa hasil tangkapan ikan yang banyak (*ta’ olleyan*), atau kurang memadai. Dalam situasi yang demikian, baik para *pandhiga* maupun *juraghan kepala* kurang tertarik atau enggan untuk bergabung menjadi anggotanya, sehingga apabila hal ini dibiarkan, bisa jadi perahu/kapal tersebut

tidak dapat melaut setiap hari atau bahkan mungkin bisa hingga satu musim penangkapan ikan.

Untuk mengatasi kondisi kekurangan anggota kelompok nelayan, maka pemilik perahu/kapal “membeli” para *pandhiga* dan *juraghan kepala* untuk mengoperasikan perahu miliknya. Sebab, bila tidak demikian bisa jadi kapal/perahunya tidak bisa berangkat, karena jumlah minimal awak kapal tidak terpenuhi. “Harga beli” seorang *pandhiga* atau *juraghan kepala* sama, yaitu Rp. 25000,- - Rp. 100.000,- selama mereka tetap menjadi anggota kelompok nelayan dari juragan pemilik kapal/perahu tadi. Apabila mereka tidak ikut, keluar atau pindah ke kelompok nelayan lain, harus mengembalikan “uang pembelian” tersebut kepada juragan pemilik kapal/perahu.

Seorang juragan perahu dapat membeli para *pandhiga* atau *juraghan kepala* yang pada waktu itu memang belum terikat ‘kontrak’ dengan seorang pemilik perahu yang lain (tenaga lepas). Namun, bisa juga membeli para *pandhiga* atau *juraghan kepala* yang pada waktu itu masih terikat ‘kontrak pembelian’ dengan seorang pemilik kapal/perahu yang lain, tanpa harus memberitahukan atau minta ijin terlebih dahulu kepada pemilik perahu yang mengontrak sebelumnya. Dia cukup membayar atau mengembalikan uang pembelian (*nebbhus*) *phandhiga* atau *jraghan kepala* tersebut kepada pemilik perahu sebagai pembeli pertama tadi, sejumlah uang yang telah dikeluarkan; ditambah dengan uang untuk pembelian *phandhiga* atau *jraghan kepala* tersebut kepada yang bersangkutan.

Adanya sistem pembelian anggota kelompok nelayan untuk keperluan pengoperasian perahu/kapal sebagaimana ini, menyebabkan adanya hubungan “hutang-piutang” yang cukup rumit di antara mereka dan seringkali menyebabkan posisi “menawar” para *phandhiga* atau *jraghan kepala* lemah terhadap para pemilik perahu, serta merupakan lahan yang sangat potensial bagi keduanya untuk terlibat dalam hutang yang bertumpuk-tumpuk.

Misalnya, seorang *phandhiga* atau *jraghan kepala* memiliki hutang kepada seorang pemilik kapal tertentu, maka untuk menutupi hutangnya tadi mereka meminjam atau ‘menjualkan diri’ kepada pemilik perahu yang lain, dan memintanya agar dapat membayarkan hutang yang dimilikinya, dengan konsekuensi mereka harus bergabung sebagai anggota kelompok nelayan dari pemilik perahu tadi, dengan harga beli yang telah disepakati di atas. Selanjutnya, untuk melunasi hutang yang telah dilunaskan oleh pemilik perahu kedua tadi, mereka harus membayarnya dari hasil tangkapan ikan yang diperolehnya setiap

hari dan/atau selama satu atau lebih musim penangkapan ikan, hingga seluruh hutang yang ditanggungnya lunas. Dalam hal para *phandhiga* atau *jraghan kepala* tersebut pindah ke kapal/perahu yang lain, maka mereka kembali meminta agar pemilik perahu ketiga membayarkan hutang yang dimilikinya, dengan konsekuensi mereka harus bergabung sebagai anggota kelompok nelayan dari pemilik perahu tadi, dengan harga beli yang telah disepakati di atas. Demikian hal ini terus-menerus berlangsung, karena sistem keanggotaan seseorang di dalam suatu kelompok nelayan yang sangat longgar.

Satu hal yang perlu dicatat dalam berkaitan dengan kasus hutang-piutang ini adalah, sekalipun kasus-kasus tersebut senantiasa terjadi, namun jarang sampai berakibat pada terjadinya keretakan hubungan di antara para *jraghan kepala* dan/atau *awak perahu/kapal* dengan pemilik kapal/perahu, kecuali telah bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat pribadi atau keluarga.

Sistem Pembagian Ikan Hasil Tangkapan

Dalam bisnis penangkapan ikan di desa Bandaran, seorang *pemilik perahu/kapal* tidak menentukan “target minimal” yang harus dipenuhi atau dicapai oleh para *jraghan kepala* atau awak kapal/perahunya berkenaan dengan hasil tangkapan ikannya. Kendatipun demikian, banyak atau sedikitnya hasil ikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem pembagian hasil ikan di antara *jraghan kapal/perahu*, *jraghan kepala*, *pandhiga*, serta anggota nelayan lain yang termasuk anggota kelompok nelayan tersebut, dan/atau orang-orang lain yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan operasi penangkapan ikan. Berapapun hasil perolehan ikan, sistem pembagian hasilnya tetap tidak berubah.

Dalam masyarakat nelayan desa Bandaran, dikenal dua sistem pembagian hasil ikan tangkapan, yang didasarkan pada “jenis perahu yang digunakan” dan “jaring (alat penangkapan ikan) yang digunakan”, yaitu apakah menggunakan jenis kapal/perahu besar (*sleret dan pakesan besar*); atau jenis kapal kecil (*sampan/edher dan pakesan kecil*); serta apakah menggunakan alat berupa jaring atau pancing (khusus untuk jenis kapal kecil). Pembagian tersebut kadang-kadang sudah dilakukan di tengah laut (*pasar tengga tase*), tetapi terkadang pula dilakukan setelah kapal/perahu sampai di darat, karena transaksi jual-beli kadang-kadang berlangsung di tengah laut, tetapi pada umumnya dilakukan di darat (*pasar dharat*).

(1) Sistem Pembagian Ikan Hasil Tangkapan Jenis Kapal Sleret

Untuk jenis kapal/perahu besar (*sleret dan pakesan besar*), sistem pembagian hasil ikan yang diperoleh setiap harinya didasarkan pada ketentuan sebagai berikut¹⁶⁾:

- 50% untuk pemilik perahu/kapal
- 50% lainnya dibagi untuk seluruh awak perahu dan anggota lain, termasuk untuk *jraghan kepala*. Sebelum yang 50% dibagikan ke seluruh anggota kelompok nelayan dan juragan perahu, sebanyak 1 bagian (= 2.14%) diberikan kepada *tokang nampo praho*; serta 5-10% diberikan kepada *tokang mateppa' praho* sebagai biaya perbaikan prahu/kapal, dan jaring¹⁷⁾; dan baru setelah itu sisanya dibagi sebagai berikut:

(a) 5 bagian untuk *jraghan praho*

(b) 12 bagian untuk seluruh awak perahu yang ikut melaut, setiap awak perahu mendapatkan masing-masing 1 bagian yang terdiri dari: 1 orang *toron aeng*, 2 orang *tokang mesin (montir)*, 1 orang *tokang ngocol phajang*, 1 orang *tokang jhangkar*, 1 orang *gurit*, 1 orang *tokang jaga pajhang*, 1 orang *tokang tata phajang*, 1 orang *tokang jaga/ghulung talena pajhang*, dan 1 orang *tokang mateppa' praho*, 1 orang *tokang koras*, dan 1 orang anggota.

(c) 1 bagian untuk *tokang jagha'an*

(d) 1 bagian untuk pembawa/pemilik lampu petromaks. Pembawa/pemilik lampu petromaks ini, adalah para anggota nelayan sendiri. Dalam hal demikian, maka seorang anggota nelayan selain mendapatkan 1 bagian dari keanggotannya sebagai nelayan, juga mendapatkan 1 bagian lagi

¹⁶⁾ Untuk sistem pembagian hasil ikan di daerah Pragaan Kabupaten Sumenep, dapat dilihat dalam de Jong (1989).

¹⁷⁾ Uang untuk biaya perbaikan perahu dan jaring yang diperoleh dari hasil pembagian untuk satu kali musim ikan diperkirakan sebesar Rp.2 – 4 juta; sedangkan biaya perawatan atau perbaikan yang dikeluarkan apabila terjadi kerusakan pada perahu dan jaring, termasuk pula biaya untuk pengecatan, dll. Secara riil biaya untuk perawatan dan perbaikan sebesar Rp. 50.000,- - Rp. 60.000,- yang dikeluarkan hanya untuk satu kali pada masa istirahat tidak melaut. Dengan demikian masih terdapat jumlah sisa uang yang cukup besar tersimpan. Akan tetapi, tidak jarang terjadi uang perbaikan tersebut tidak mencukupi, terutama apabila jenis kerusakannya sangat berat atau bahkan harus mengganti perahu atau jaring. Apabila dari penghasilan untuk biaya perbaikan kapal/perahu atau jaring tersebut tidak mencukupi jumlahnya, maka biasanya diberitahukan dan meminta tambahan biaya dari pemilik kapal/perahu. Namun demikian, karena tidak setiap masa istirahat dilakukan perbaikan kapal/perahu, jaring dan mesin, uang untuk perbaikan ini dapat mencapai jumlah yang sangat besar. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi si pemegang. Dia dapat menggunakan dan/atau memutar kembali uang perbaikan tersebut untuk keperluan-keperluan pribadinya, mengingat uang tersebut tidak berada dalam hak kepemilikan juragan perahu/kapal. Salah

sebagai pembawa/pemilik lampu petromaks; sehingga dia akan mendapatkan seluruhnya 2 bagian.

(e) 1 bagian untuk *kyae* atau *reng penter*.

- Apabila dari seluruh pembagian tersebut masih terdapat sisa/kelebihan hasil ikan (biasanya ikan-ikan yang tidak sejenis dengan ikan hasil tangkapan utama), maka seluruh anggota kelompok nelayan tersebut mendapat bagian yang sama jumlahnya, tanpa memperhatikan kedudukan mereka dalam keanggotaan kelompok nelayan tersebut; apakah dia seorang juragan ataukah seorang awak kapal. Sisa/kelebihan pembagian hasil tangkapan ikan yang diberikan kepada seluruh anggota tersebut dinamakan "*dhu'-gandhu*"¹⁸⁾.

Sistem pembagian hasil ikan di atas, dipandang cukup adil dan sepadan dengan tanggung jawab dan modal yang ditanamkan oleh juragan perahu, maupun dengan hasil kerja para pekerja kapal (juragan kepala dan awak perahu). Hasil pembagian ikan tangkapan sebanyak 50% untuk juragan pemilik perahu/kapal tersebut, dipandang cukup sepadan dengan tanggung jawab dan modal yang ditanamkan oleh juragan perahu.

Menurut *pak* Rusdi (seorang juragan kapal *sleret*), untuk membeli atau mengadakan sebuah kapal/perahu *sleret* lengkap dengan segala peralatannya memerlukan investasi modal antara Rp. 150 juta s.d Rp. 200 juta, dengan rincian sebagai berikut: 1 kapal/perahu *sleret* berharga Rp. 75 juta – 150 juta; jaring berharga Rp. 20 juta – 30 juta; mesin tempel (pendorong kapal/perahu) berharga Rp. 25 juta – 40 juta; dan harga sebuah mesin kardan (penarik jaring) sebesar Rp. 10 juta. Biaya tersebut masih akan bertambah manakala terjadi kecelakaan di laut yang menyebabkan kapal/perahu beserta seluruh perlengkapannya tenggelam atau rusak besar, yang tidak memungkinkan untuk ditanggulangi dari uang hasil ikan yang teralokasikan di dalam "uang biaya perawatan/perbaikan" yang jumlahnya sebesar 5-10% dari seluruh hasil pembagian ikan satu kali musim.

seorang pemegang uang perbaikan kapal/perahu yang ditemui, telah menjadi seorang "kaya baru" karenanya.

¹⁸⁾ secara harfiah berarti "apa yang diambil", atau "hasil bawaan". *Dhu' gandhu'* ini biasanya dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan lauk sehari-hari, dan bilamana terdapat kelebihan dijual ke pasar setempat yang hasilnya digunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan hidup keseharian mereka, seperti: minyak tanah, minyak goreng, garam, cabe, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Sistem pembagian *dhu' gandhu'* di desa Bandaran ini, berbeda dengan sistem yang berlaku di kalangan nelayan di Pragaan-Sumenep. Bila di Bandaran dibagi merata/sama untuk semua anggota kelompok nelayan tanpa memperhatikan kedudukan mereka di dalam keanggotaan kelompok nelayan, akan tetapi di Pragaan sistem pembagiannya ditentukan berdasarkan kedudukan masing-masing di dalam keanggotaan kelompok nelayan (lihat de Joung, 1989).

Apabila memperhatikan kondisi bangunan rumah yang banyak merupakan rumah tembok dengan berbagai model/bentuk rumah modern dengan berbagai “fasilitas modern” rumah tangga yang dimiliki oleh penduduk, atau bila dilihat dari kemampuan para nelayan penduduk Desa Bandaran ketika mengadakan perhelatan seperti pesta perkawinan anaknya¹⁹⁾, hasil pembagian ikan tadi sudah cukup dari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keseharian mereka. Sebagai ‘masyarakat tradisional’, mereka tidak mengenal sistem penyimpanan uang modern. Artinya, uang yang diperoleh dari hasil penjualan ikan hasil pembagian, tidak mereka tabung di Bank, tetapi dengan cara dibelikan barang-barang berharga seperti perhiasan dari emas; umumnya kalung, gelang, atau mas lantak; atau diikutsertakan ke dalam *arisan* yang penarikannya dilakukan setiap bulan.

Berdasarkan informasi dari H. Abd. Latief (seorang pemilik kapal *sleret*), jumlah perolehan ikan untuk satu kali *mosem petthengan* dari seorang pemilik perahu/kapal, yang hanya 50% dari jumlah seluruh hasil ikan bisa digunakan untuk ongkos naik haji untuk dua orang. Apabila hal tersebut diperhitungkan dengan nilai tukar uang sekarang atau biaya haji pada tahun 2000 ini, jumlah perhasilan seorang pemilik perahu/kapal bisa mencapai sekitar 40-45 juta rupiah. Dengan demikian, secara keseluruhan nilai uang dari hasil penjualan ikan sebanyak 50% dari total hasil penangkapan ikan untuk satu kali musim penangkapan saja bisa mencapai 80-90 juta rupiah. Berdasarkan acuan ini dan atas dasar sistem pembagian ikan di atas, maka dalam perhitungan sederhana seorang *jraghan kepala* yang memperoleh ikan sebanyak 5 bagian (10.7%) akan memperoleh uang berkisar antara Rp. 3.745.000,- s.d Rp. 4.280.000,-; setiap anggota kelompok nelayan yang memperoleh pembagian sebanyak 1 bagian (2.14%) akan memperoleh uang berkisar antara Rp. 749.000,- s.d Rp. 856.000,- untuk sekali musim penangkapan ikan. *pandhiga* sekitar Rp. 300.000 – 350.000 (8.5%); demikian pula untuk para anggota lain yang masing-masing mendapatkan 1 bagian. Suatu jumlah uang penghasilan yang cukup besar bila hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka, dalam situasi tingkat kebutuhan ekonomi dan tingkat harga barang kebutuhan hidup keseharian yang tidak terlalu tinggi bagi seorang nelayan tradisional di pulau Madura. Sehingga, dengan jumlah penghasilan sebesar itu, hampir setiap nelayan di desa Bandaran bisa menyisakan uangnya sebesar Rp. 50.000,- - Rp. 100.000,- untuk arisan bulanan. Berdasarkan

¹⁹⁾ lihat catatan kaki no. 25 di bawah.

perkiraan di atas pula, maka rerata jumlah biaya kebutuhan keseharian mereka berkisar antara Rp. 200.000,- s.d Rp. 250.000,- per bulan.

Sesuai dengan hukum “permintaan dan penawaran”, maka sejalan dengan semakin banyaknya penggunaan kapal besar jenis *sleret*, yang berarti pula kebutuhan akan tenaga *pandhiga* semakin banyak, maka sistem pembagian di atas, mengalami perubahan terutama hak ikan yang menjadi bagian seorang juragan pemilik perahu/kapal. Apabila pada masa yang lalu seorang pemilik perahu mendapat 50% dari seluruh ikan hasil tangkapan, maka kini hanya mendapat 1/3 bagian (atau 35%); sedangkan 2/3 (65%) bagian yang lain dibagi menjadi 20 bagian untuk seluruh awak kapal/perahu, dengan rincian sebagai berikut:

- *jrgan kepala* = 5 bagian (16.25%)
- *juru muddhi (wk. Jraghan kepala)* = 4 bagian (13%)
- *tokang nampo* = 5 bagian (16.25%)
- *pandhiga* = sebanyak 6 orang, masing-masing memperoleh 1 bagian (3.25%).

Selain pembagian di atas, tidak dikenal adanya pos pembagian ikan untuk orang-orang di luar anggota kelompok nelayan²⁰⁾; tidak juga untuk biaya kesehatan atau kematian untuk para anggota kelompok nelayan, sehingga apabila terdapat musibah kecelakaan atau kematian yang menimpa salah seorang anggota kelompok nelayan baik selama di laut ataupun di darat. Kalaupun ada bantuan, tidak lebih dari kewajiban setiap orang untuk memberikan “infaq dan sedekah” kepada keluarga korban. Biasanya, bantuan tersebut berupa bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan lain sebagainya; tetapi juga ada yang memberikan dalam bentuk uang. Hal ini juga berlaku terhadap hal-hal lain yang bersifat sosial, keagamaan, ataupun untuk keperluan desa/umum. Tidak ada bagian khusus atau tertentu dari perolehan ikan para nelayan tersebut diserahkan kepada kas desa bagi keperluan pengadaan sarana-sara umum, sebab ini

²⁰⁾ Sebenarnya terdapat juga orang di luar anggota kelompok nelayan yang bisa memperoleh sedikit ikan dari para nelayan tadi. Penduduk setempat biasa menyebut mereka sebagai “*reng ngojhur*”. Umumnya mereka terdiri dari anak-anak kecil dan/atau perempuan-perempuan dewasa yang meminta “sedekah” barang sedikit dari para nelayan yang baru pulang (*thanduk majheng*). Ikan-ikan hasil “*ngojhur*” ini, oleh mereka sebagian dikonsumsi, akan tetapi bila hasil mereka agak banyak, tidak jarang dijual ke pasar setempat, sebagai “uang jajan”, atau untuk penambah keperluan sehari-hari.

sepenuhnya menjadi tanggungan atau seluruh penduduk desa tanpa ada pengecualian²¹⁾.

Besar kecilnya perolehan ikan setiap hari selama satu kali musim gelap bulan bersifat “fluktuatif”, karena hal tersebut sangat bergantung pada “rejeke” (*rajheke*), serta ketepatan waktu dan lokasi penangkapan ikan. Apabila mereka mujur atau beruntung, besarnya penghasilan dari seluruh anggota kelompok nelayan bisa seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, apabila kurang beruntung atau mujur (*ta' ontong atau apes*), uang hasil ikan tadi setidaknya-tidaknya bagi pemilik perahu hanya cukup untuk mengembalikan modal (ongkos pembelian minyak, dan persiapan peralatan mesin kapal/perahu, dll); atau bagi juragan dan anggota nelayan yang lain cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian. Bahkan, juga bisa terjadi hasilnya bahkan sama sekali tidak cukup untuk mengembalikan modal (*ta' abhali bandha*) atau malah harus menambah (*norogi, tekkor*); serta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian mereka.

(2) Sistem Pembagian Ikan Hasil Tangkapan Jenis Kapal/Perahu Kecil

Pembagian pembagian ikan hasil tangkapan jenis kapal kecil ini, terbagi lagi menjadi tiga sistem. Hal ini tergantung pada jenis peralatan penangkapan ikan yang digunakan, yaitu jaring (*sethet dan gondrong*) atau pancing.

Apabila menggunakan *jaring sethet*, maka sistem pembagiannya sebagai berikut:

- *Juragan pemilik perahu* mendapatkan 4 bagian; yang diperoleh dari: 1 bagian untuk kepemilikan lampu petromaks; 2 bagian untuk kepemilikan jaring; dan 1 bagian untuk kepemilikan perahu. Akan tetapi, apabila si pemilik perahu tersebut turut ke laut maka bagiannya ditambah lagi 1 bagian, sehingga bagian yang diterima secara keseluruhan menjadi 5 bagian.
- *Awak perahu* masing-masing mendapatkan 1 bagian (jumlah awak perahu antara 4-6 orang).
- *Tokang nampo dan tokang jagha'an* mendapatkan masing-masing ½ bagian. Akan tetapi karena keduanya merupakan keluarga juragan pemilik perahu

²¹⁾ Realitas ini berbeda dari anggapan Boeke (1983: 22-23) yang menyatakan bahwa: “...karena keterbatasan kebutuhan individu; yang karena penyerapan individu oleh masyarakat (kepentingan umum: pen), mengakibatkan penundukan kegiatan (dan hasil: pen) ekonomi di bawah kegiatan sosial,...semua kegiatan ekonomi (desa) hanya dapat ditelaah menurut ukuran-ukuran etis dan keagamaan, ...maka

(*reng dalem*), maka biasanya mereka tidak mendapatkan bagian; artinya bagian mereka sudah termasuk ke dalam 4/5 bagian yang telah diterimakan kepada juragan pemilik kapal.

- *Tokang koras* (harfiah: “tukang mengurus” air di dalam perahu di tengah laut ketika sedang melaut) tidak mendapatkan bagian tersendiri, tetapi memperoleh bagian dari hasil pemberian sekadarnya (*sakadharra*) atau atas dasar kerelaan dari para nelayan

Jaring gondrong adalah jaring yang khusus digunakan untuk menangkap udang besar (*udang windu*; *Mdr = odhang peltas*). Penangkapan udang dengan menggunakan *jaring gondrong* ini juga memiliki sistem pembagian yang berbeda dengan yang menggunakan *jaring sethet*, karena untuk jenis *jaring gondrong* ini, yang memiliki/membawa bukan juragan pemilik perahu tetapi dibawa dan milik masing-masing anggota nelayan. Setiap nelayan biasanya membawa jaring lebih dari satu buah, biasanya antara 2 – 10 jaring. Sistem pembagian hasil dengan menggunakan *jaring gondrong* ini adalah sebagai berikut:

- *Juragan pemilik perahu* mendapatkan bagian sebanyak 10% yang ‘disetorkan’ oleh masing-masing anggota nelayan, sesuai dengan jumlah udang hasil tangkapan jaring mereka. Dengan demikian, apabila keanggotaan nelayan dalam perahu tersebut antara 1-4 orang, maka total bagian juragan pemilik perahu tersebut adalah sebanyak 10% - 40%. Sebaliknya, apabila seluruh jaring tidak memperoleh hasil, maka dengan sendirinya juragan pemilik perahu pun tidak mendapatkan bagian.
- *Awak perahu* juga mendapatkan bagian yang bervariasi, tergantung apakah jaringnya memperoleh hasil banyak, sedikit atau tidak. Namun secara umum ketentuannya adalah 10% diserahkan kepada juragan pemilik perahu; dan 5% diserahkan kepada *tokang nampo*. Dengan demikian, seorang para awak perahu memperoleh hasil total bersih sebanyak 85% dari jumlah udang hasil pancingan mereka.
- *Tokang nampo* mendapatkan bagian yang diberikan oleh masing-masing anggota nelayan sebanyak 5%. Karena seluruh anggota nelayan berjumlah 1-4 orang, maka total bersih penerimaannya sebanyak 5% - 20%. *Tukang nampo* ini bisa orang lain, tetapi juga juragan pemilik perahu sendiri. Dalam hal yang

mereka harus menghormati orang-orang yang menolak untuk kerja—pengemis, fakir miskin, orang suci; setiap orang harus membantu untuk memungkinkan mereka hidup”.

terakhir, maka juragan pemilik perahu selain mendapatkan bagian sebanyak 40% - 60% sebagaimana pembagian di atas, juga masih mendapatkan tambahan lagi antara 5% - 20%; sehingga juragan pemilik perahu secara keseluruhan mendapatkan perolehan sebanyak 45% - 80%.

Sistem pembagian hasil tangkapan ikan dengan menggunakan *pancing* (*pancheng*)²², tidak berbeda dengan sistem pembagian dengan menggunakan *jaring gondrong*, yaitu sebagai berikut:

- *Juragan pemilik perahu* mendapatkan bagian sebanyak 10% yang 'disetorkan' oleh masing-masing anggota nelayan, sesuai dengan jumlah ikan hasil pancingan mereka. Dengan demikian, apabila keanggotaan nelayan dalam perahu tersebut antara 4-6 orang, maka total bagian juragan pemilik perahu tersebut adalah sebanyak 40% - 60%.
- *Awak perahu* juga mendapatkan bagian yang bervariasi, tergantung apakah pancingnya memperoleh hasil banyak, sedikit atau tidak. Namun secara umum ketentuannya adalah 10% diserahkan kepada juragan pemilik perahu; dan 5% diserahkan kepada *tokang nampo*. Dengan demikian, seorang para awak perahu memperoleh hasil total bersih sebanyak 85% dari jumlah ikan hasil pancingan mereka.
- *Tokang nampo* mendapatkan bagian yang diberikan oleh masing-masing anggota nelayan sebanyak 5%. Karena seluruh anggota nelayan berjumlah 4-6 orang, maka total bersih penerimaannya sebanyak 20% - 30%. Seperti pada penangkapan udang dengan *jaring gondrong* di atas, *tukang nampo* ini bisa orang lain, tetapi juga juragan pemilik perahu sendiri; sehingga dengan demikian juragan pemilik perahu selain mendapatkan bagian sebanyak 10% di atas, juga masih mendapatkan tambahan lagi antara 20% - 30%. Dengan demikian, juragan pemilik perahu secara keseluruhan mendapatkan perolehan sebanyak 60% - 90%.

Apabila diperhatikan, dalam ketiga sistem pembagian ikan/udang hasil tangkapan di atas, tampaknya juragan pemilik perahu umumnya tetap mendapatkan pembagian hasil ikan rerata lebih tinggi dari para awak kapal. Seperti pada sistem pembagian ikan pada jenis kapal *steret* di atas, besarnya

jumlah penerimaan dari seorang juragan pemilik perahu *pakesan kecil dan sampan (edher)* tersebut, memang sebanding dengan investasi yang telah dia keluarkan untuk pengadaan perahu, jaring, dan mesin. Selain itu, karena dalam hal terjadi kecelakaan atau kerusakan pada perahu, jaring, dan mesin, maka seluruh biaya perawatan, perbaikan atau bahkan pengantiannya yang baru sepenuhnya menjadi tanggungan dan atas modal dari juragan pemilik perahu tersebut. Hal ini berbeda pada kapal besar jenis *sleret dan pakesan besar* yang seluruh biaya perawatan, perbaikan dan/atau penggantian yang baru diambilkan dari uang perbaikan/perawatan yaitu sebesar 5% - 10% (sistem pembagian lama), atau sebesar 2.14% (sistem pembagian baru).

C. Pola Relasi dan Jaringan Penjualan Ikan

Nelayan, Bakul, dan Tengkulak Ikan

Pola relasi dan jaringan aktivitas jual-beli ikan/udang dari hasil pembagian yang diterima oleh masing-masing dalam kelompok nelayan di desa Bandaran, umumnya sama. Transaksi jual-beli ikan hasil perahu jenis *sleret* kadang-kadang berlangsung di tengah laut, dan pada umumnya dilaksanakan di darat. Di dalam aktivitas jual-beli tersebut terjadi antara (1) nelayan, juragan perahu, juragan kepala; (2) bakul ikan (*bakol jhuko*); (3) tengkulak (*tokang kolak jhuko*).

Dalam aktivitas jual-beli di tengah laut, hasil ikan bagian masing-masing awak kapal dan juragan kepala, sebagian langsung dijual atau diserahkan kepada para bakul ikan yang datang ke tengah laut dengan menggunakan perahu, dan sebagiannya lagi dibawa ke darat untuk dijual atau diserahkan kepada para bakul ikan yang ada di darat.

²²⁾ penggunaan pancing ini biasanya dilakukan manakala jaring jenis *gondrong* yang ditebar tidak memberikan hasil tangkapan ikan yang memadai atau sama sekali tidak ada hasilnya. Pancing bukan milik juragan pemilik kapal, tetapi milik masing-masing anggota nelayan.



Gambar 15: Sosok Para Nelayan (*Oreng Majheng*) Desa Bandaran

Dalam banyak kasus antara para nelayan dan juragan kepala di satu pihak dengan para bakul ikan telah terjalin hubungan yang tampaknya bersifat “mengikat” daripada atas dasar “sukarela” dalam hubungan jual-beli ikan. Hal ini terjadi, karena para nelayan dan juragan kepala tersebut secara rutin dan berkesinambungan mendapatkan “uang pengikat” (*pesse panyengset*) dari para bakul ikan. Uang tersebut merupakan “uang muka” (*pesse panjher*) dari bakul ikan kepada para nelayan dan juragan kepala dari hasil penjualan ikan yang diterima kepada bakul ikan. Besar jumlah uang pengikat tersebut berkisar antara Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,-, Jumlah uang ini sama untuk seluruh bakul ikan. Pemberian uang tersebut tujuannya tidak lain adalah, agar para nelayan dan juragan kepala tadi menyerahkan atau menjual ikan kepada si bakul ikan. Adalah “wajib” atau “harus” bagi para nelayan dan juragan kepala penerima uang tadi, menjual atau menyerahkan sebagian atau seluruh ikan-ikan yang menjadi bagiannya—sesuai dengan kesepakatan--kepada bakul yang telah memberinya uang tadi. Apabila nelayan dan juragan tersebut tidak mau menjual atau

menyerahkan ikannya, maka si bakul tadi akan menjadi marah. Kebiasaan memberikan uang perangsang ini, sungguhpun seakan telah menjadi “kesepakatan bersama” antara para nelayan dan juragan kepala dengan para bakul ikan, namun pemberian uang pengikat tersebut dalam banyak hal telah menjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Relasi dan praktik jual-beli yang demikian ini, telah menjadi pola umum dalam hampir setiap relasi dan jaringan perdagangan ikan yang berlaku di kalangan nelayan di desa Bandaran.

Pola jual-beli ikan dengan sistem “uang pengikat” tersebut, memang tidak selalu merugikan pihak nelayan dan juragan kepala, walaupun sebenarnya uang yang dibayarkan--saat itu juga atau kemudian--oleh para bakul kepada mereka tidak pernah sama, bahkan lebih rendah dari harga jual riil ikan seandainya mereka jual langsung di pasar lokal. Artinya, para nelayan atau juragan kepala tersebut akan menerima uang hasil pembelian ikan dari bakul ‘senantiasa kurang’ dari harga jual ikan di pasaran. Misalnya, apabila para bakul dapat menjual ikannya sebanyak 1 bakul sebesar Rp. 35.000,- maka yang diserahkan kepada nelayan atau juragan kepala tadi hanya Rp. 25.000,- - Rp. 30.000,-, sisa uang sebesar Rp. 5.000 – Rp. 10.000,- tersebut menjadi milik bakul ikan, sebagai hasil keuntungannya. Sistem pemberian hasil penjualan “*di bawah harga*” tersebut berlaku umum atau sama untuk seluruh bakul. Dalam hal ini, tidak ada permainan harga jual antara bakul yang satu dengan bakul yang lain; sehingga jumlah uang yang diterima oleh para nelayan dan juragan kepala dari para bakul siapapun dia setiap orang adalah setara, tidak ada perbedaan. Bagi bakul ikan sendiri, dengan adanya uang pengikat ini, selain dia dapat menjual harga sesuai dengan keadaan pasar dan jenis ikan yang dijual, dari hasil penjualan ikannya itu dia juga masih mendapatkan keuntungan, yang diperoleh dari selisih antara uang yang diberikan kepada para nelayan dan juragan kepala rekanannya dengan uang yang sebenarnya diperoleh dari hasil penjualan ikan tadi.

Kecenderungan para nelayan dan juragan kepala untuk menjual ikan kepada bakul yang telah “mengikatnya dengan uang pengikat tadi, adalah lebih disebabkan pada pertimbangan kecepatan dan kemudahan menjual ikan serta memperoleh uang, atau hal-hal praktis lainnya; daripada semata-mata pertimbangan bisnis-ekonomi yang berorientasi pada mencari untung sebesar-besarnya. Sebab, bagi para nelayan dan juragan kepala ada risiko yang akan diterima, apabila mereka menjual langsung ikan-ikan tersebut di pasar jalanan (pasar di pinggir jalan), yaitu ada kemungkinan tidak laku, harga jual

rendah/murah, dan atau apabila mereka bawa ke pasar di luar daerah mereka sendiri, misalnya ke pasar kota Pamekasan, selain masih harus mengeluarkan uang tambahan untuk transportasi juga belum dapat dipastikan dapat segera laku dengan cepat atau berharga tinggi. Bahkan apabila ikan yang dijual sendiri tadi tidak laku, maka ikan-ikan tersebut harus dikeringkan (*jhuko' kerreng*), yang tentunya harga jualnya akan lebih murah dibandingkan apabila dijual dalam bentuk "ikan basah" (*jhuko' odi*), di samping perlu uang ekstra untuk biaya pengeringan, serta tenaga.

Hal lain yang menjadi daya tarik dari para nelayan dan juragan kepala melakukan praktik bisnis semacam itu, adalah karena mereka akan mendapatkan fasilitas tambahan dari para bakul ikan, yaitu kemudahan untuk mendapatkan hutang (*otang*) atau pinjaman uang (*nginjham pesse*) dari para bakul rekanannya; apakah untuk keperluan modal usaha rumah tangga (meracang, dll) atau pun untuk keperluan keluarga yang lain, yang bagi mereka mungkin tidaklah mudah diperoleh dari orang lain. Bunganya pun tidaklah terlalu tinggi (maksimal 5% perbulan). Selain itu juga, para nelayan itu pun secara rutin masih mendapatkan barang-barang lain seperti rokok (ketika dia istirahat, atau tidak melaut), atau ketika menjelang lebaran mereka kembali mendapatkan "sesuatu" dari para bakul rekanan bisnisnya seperti: pakaian, kopiah, sarung, sandal atau barang-barang kebutuhan lebaran lain untuk keluarga mereka.

Praktik jual-beli di atas, senantiasa dipelihara dan semakin diperkuat; dan dalam hal-hal demikian itu telah menimbulkan hubungan jual-beli yang bersifat "*patron-client*" (hubungan pelindung-klien) di antara mereka, walaupun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai relasi yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Khusus bagi juragan perahu, yang karena lebih disebabkan mereka memiliki posisi kuat dari segi modal, maka relasi *patron-client* semacam itu tidak terjadi. Sebaliknya, dalam hal ini posisi tawar-menawar juragan perahu lebih kuat daripada para bakul. Jual-beli ikan oleh juragan perahu dilakukan semacam "sistem lelang". Namun, pada umumnya bukan didasarkan atau diserahkan pada harga penawaran tertinggi dari bakul ikan, tetapi lebih didasarkan pada "harga kesepakatan umum" di antara para bakul dengan sang juragan perahu. Tampaknya dalam hal ini, baik para juragan perahu maupun para bakul sama-sama mempertimbangkan keadaan pasar, sehingga apabila harga jual ikan tersebut di pasar ternyata berada di bawah harga beli dari juragan perahu, maka juragan

perahu akan menanggung akibat bahwa pada hari-hari selanjutnya ikan miliknya tidak akan diminati oleh para bakul, karena terlalu tinggi (*cek larangga*). Padahal keduanya sama-sama berharap terdapat keuntungan walaupun tidak terlalu besar dari hasil penjualan ikan-ikan tadi.

Selain sebab-sebab di atas, terjadinya praktik jual-beli ikan dengan sistem “uang pengikat” di atas mungkin juga disebabkan oleh kurang berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada, padahal pembangunan TPI tersebut pada awalnya merupakan inisiatif pemerintah—dalam hal ini Dinas Perikanan—untuk memudahkan dan memberikan keuntungan ekonomis yang lebih besar dari para nelayan, juragan kepala, dan juragan perahu. Akan tetapi, keberadaan TPI ini hanya efektif pada awal-awal pendiriannya saja, namun sejak beberapa tahun yang lalu semakin tidak diminati oleh para nelayan atau juragan. Sejumlah alasan yang dikemukakan adalah, pasar tidak selalu memberikan respon positif terhadap “hasil harga lelang” yang disepakati di TPI, karena jaringan pemasaran ikan dari desa Bandaran ini hanya untuk konsumsi pasar-pasar lokal yang berada di kota Pamekasan dan Sampang. Juga, karena seringkali para pembeli yang telah memberikan “harga tertinggi” di TPI tersebut banyak yang tidak segera melunasi uangnya, malah tidak jarang terjadi penagihan yang tidak kunjung terselesaikan; sehingga para pemilik ikan pun merasa dirugikan.

Dari para bakul ini, ikan kemudian ada yang dipasarkan sendiri langsung di pasar jalanan setempat, atau di pasar kota Pamekasan atau Sampang; akan tetapi sebagian besar para bakul menjualnya bagian perbagian kepada para tengkulak ikan (*tokang kolak jhuko*) yang datang dengan bersepeda/sepeda motor dari berbagai pasar lokal di wilayah Pamekasan dan Sampang. Mengingat, apabila harus dijual sendiri, seperti pada kasus penjualan ikan sendiri oleh para nelayan di atas, ada kemungkinan tidak laku, harga jual rendah/murah, dan atau apabila mereka bawa ke pasar di luar daerah mereka sendiri, misalnya ke pasar kota Pamekasan, selain masih harus mengeluarkan uang tambahan untuk transportasi juga belum dapat dipastikan dapat segera laku dengan cepat atau berharga tinggi. Bahkan apabila ikan yang dijual sendiri tadi tidak laku, maka ikan-ikan tersebut harus dikeringkan (*jhuko' kerreng*), yang tentunya harga jualnya akan lebih murah dibandingkan apabila dijual dalam bentuk “ikan basah” (*jhuko' odi*), di samping perlu uang ekstra untuk biaya pengeringan, serta tenaga.

Kalaupun tidak menjadi gejala umum seperti halnya hubungan jual-beli antara nelayan dan bakul seperti di atas, dalam hal ini pun ada di antara para

tengkulak ikan yang memberikan uang perangsang kepada para bakul ikan, sehingga para bakul tadi dapat menjual ikan kepadanya. Tetapi, pada umumnya di antara mereka terdapat hubungan jual-beli yang relatif bebas; sehingga setiap tengkulak dapat menguhungi setiap bakul untuk mendapatkan berbagai jenis ikan yang dibutuhkan atau diminati oleh para pembeli di pasar asal mereka; sementara para bakul ikan itu dapat pula secara bebas menjual ikan-ikannya kepada setiap tengkulak sesuai dengan harga pasaran atau harga yang lebih tinggi dari harga penawaran tengkulak yang lain.

Penjualan Ikan di Pasar Lokal

Sebagian ikan para nelayan yang tidak “dijual” kepada para bakul *patronnya* di tengah laut, mereka serahkan kepada para bakul rekanannya yang lain di darat yang tidak menyambutnya di tengah laut, atau diserahkan kepada para isteri mereka (*binena*) untuk dijual kepada para pembeli lain di pasar setempat. Penjualan ikan di pasar setempat ini, umumnya dilakukan oleh para nelayan dari perahu jenis *pakesan kecil (thithil)* dan *sampan (edher)*. Para nelayan ini, adalah para “nelayan bebas” yang sama sekali tidak memiliki ikatan *patron-klien* dengan para bakul ikan; sehingga yang bersangkutan secara bebas memasarkan ikan-ikan hasil tangkapannya ke pasar lokal; walaupun tidak jarang pula sebelum mereka menjajakannya ke pasar, seorang juragan/bakul telah memborong (*abhurung*) seluruh ikannya.

Pasar lokal tempat penjualan ikan berada di sepanjang jalan raya atau jalan desa menuju kampung pedalaman di sebelah utara. *Pasar jalanan* ini, hampir tiap hari ramai sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual-beli ikan hasil tangkapan para nelayan, terutama di saat musim ikan. Pasar diadakan pada waktu pagi, sore, maupun malam hari, tergantung pada waktu kepulangan para nelayan menangkap ikan di laut. Pasar pagi sudah ramai dipenuhi ikan, para bakul dan tengkulak ikan sejak pukul 06.00 – 08.00, tergantung pada ada tidaknya ikan yang masih dapat dijual. Ikan yang dijual pada pagi hari ini, biasanya yang diperoleh oleh para nelayan yang melaut siang hari hari sebelumnya hingga dini harinya (pukul 14.00 – 03.00 wib), atau nelayan yang melaut pada waktu subuh hingga pagi hari (pukul 03.00 – 05.00 wib). Nelayan yang melaut hingga bermalam di laut dinamakan “*reng nyoloo*”, dan ikan hasil tangkapan nelayan yang melaut pada malam hari tersebut dinamakan *jhuko’ ollena reng nyoloo* (harfiah: ikan yang diperoleh dengan menggunakan lampu petromaks). Pasar sore dan malam hari, mulai ramai

sejak pukul 17.00 wib – 21.00 wib. Ikan-ikan yang diperjualbelikan di pasar sore dan malam ini adalah ikan-ikan yang dibawa pulang oleh para nelayan yang melaut pada siang hari sejak pukul 14.00 – 16.00 wib dengan menggunakan *jaring sleret* dinamakan “*reng nyambhang*”, dan ikan hasil tangkapan nelayan yang melaut pada sore hari tersebut dinamakan *jhuko' ollena reng nyambhang* (harfiah: menangkap ikan dalam waktu sebentar). Ikan-ikan yang diperjual belikan tadi adalah ikan basah/segar (*jhuko' odhi'*), karena ikan tadi belum dibekukan dengan es.



Gambar 16: Pasar Lokal Tempat Penjualan Ikan di Pinggir Jalan Raya Pamekasan-Sampang

Ikan-ikan tersebut diletakkan di atas nampah (*bakol*), atau wadah yang terbuat dari bambu (*lencak*). Ikan-ikan besar seperti tongkol (*cakalan*), tengiri, cumi-cumi besar, dijual secara satuan; dan untuk ikan-ikan yang lebih kecil seperti blanak, pindang (*lajhang*), dan cumi-cumi kecil (*jhuko' ennus*) diperjualbelikan secara kelompok biasanya setiap kelompok berjumlah 10 ekor (*sajhina*). Harganya senantiasa berubah-ubah sesuai dengan musim jenis ikan, atau berdasarkan harga penawaran pembeli. Ikan teri tidak pernah diperjualbelikan, karena jenis ikan teri

ini biasanya ikan hasil penangkapan khusus untuk *bagan*, yang merupakan sistem penangkapan yang tidak pernah digunakan oleh nelayan desa Bandaran.

Pasar jalanan desa Bandaran ini sepenuhnya memperjualbelikan ikan-ikan hasil tangkapan dari nelayan setempat; akan tetapi ketika waktu itu musim paceklik (*mosem laep*) yang diperjualbelikan adalah ikan-ikan yang berasal dari luar desa. Ikan-ikan dari para nelayan desa Bandaran ini dengan perantara para tengkulak dapat menembus sejumlah pasar di wilayah Pamekasan dan Sampang. Intensitas aktivitas perdagangan ikan di pasar setempat ini, telah memungkinkan para bakul dalam memperjualbelikan ikan di daerahnya sendiri, yang berarti pula dapat menghemat dan memangkas ongkos pemasaran yang dilakukan di pasar-pasar lain, serta mempercepat penerimaan uang bagi para nelayan. Resikonya, karena pasar tersebut berada di pinggir jalan maka setiap hari pada saat pasar ramai (pagi, sore, dan malam), jalanan menjadi sangat ramai dan memacetkan lalu-lintas di daerah itu.

D. Kepemimpinan Ekonomi dan Pengembangan Struktur Ekonomi Lokal

Pemimpin Ekonomi Lokal: Juragan, Bakul dan Tengkulak Ikan

Pengembangan ekonomi lokal desa Bandaran, sebagaimana umumnya struktur ekonomi desa, dibangun dan didukung oleh pola-pola kepemimpinan ekonomi yang juga bersifat “lokal”, serta “pemupukan modal” yang sebenarnya bukan sebagai bentuk investasi dalam pengertian teori ekonomi, seperti arisan, titip, uang, hutang dan kredit.

Berbeda dengan relasi jaringan perdagangan komoditas lokal di daerah lain di Pulau Madura seperti tembakau (*bhako*)²³⁾, garam (*buja*), atau ikan teri (*jhuko' kenduy*), dan *nener* (bibit ikan bandeng) yang umumnya melibatkan para pelaku ekonomi berskala besar dan lintas-lokal. Kepemilikan modal dalam perdagangan ikan di desa Bandaran ini tidak terlalu besar, bahkan tidak sedikit dari para bakul yang berperan sebagai “pedagang pemasok dan perantara” dalam aktivitas penjualan ikan hasil tangkapan nelayan kepada para tengkulak ikan, hanya atas dasar prinsip “kepercayaan” (*saleng parcaja*), yaitu pada kemampuan atau keahlian mereka untuk meyakinkan para pemilik ikan agar menyerahkan atau menjual ikan kepada dirinya. Selain itu juga, dalam aktivitas perdagangan ikan di

²³⁾ Untuk jaringan perdagangan tembakau dari Pulau Madura, dapat dipelajari dalam de Jong, 1989.

desa Bandaran ini, juga terdapat sejumlah pedagang besar dari luar Bandaran, atau *tauke* yaitu pelanggan tetap bermodal besar, memiliki gudang atau pabrik pengolahan ikan, serta memiliki jaringan perdagangan di tingkat regional atau ekpor; akan tetapi sekarang mereka sudah tidak diperkenankan untuk memborong ikan-ikan hasil tangkapan nelayan setempat, karena dalam hal terjadi demikian, maka ikan-ikan tersebut diborong (*ebhurung*) oleh Kepala Desa

Dalam kaitan ini, juragan pemilik perahu, para bakul, dan tengkulak merupakan tiga pelaku ekonomi utama dalam aktivitas perdagangan ikan di desa Bandaran, yang jumlah ketiganya juga relatif cukup banyak.

Juragan pemilik perahu

Juragan pemilik perahu/kapal merupakan pelaku terpenting dalam aktivitas perekonomian desa dalam masyarakat nelayan Bandaran. Keberadaan, kepemilikan kapal/perahu, serta modal yang dimiliki, merupakan penggerak utama dalam aktivitas penangkapan ikan dan perdagangannya.

Seorang juragan pemilik kapal/perahu bisa memiliki 1-5 kapal/perahu jenis *sleret dan pakesan besar*, atau perahu-perahu kecil lainnya lengkap dengan segala peralatan untuk menangkap ikan, dengan jumlah investasi minimal berkisar antara Rp. 100 juta - Rp. 200 juta untuk satu unit kapal/perahu. Dengan jumlah armada kapal perahu tersebut, seorang juragan perahu mampu mempekerjakan nelayan antara 23 – 30 orang untuk satu kapal *sleret*; antara 14 – 18 orang untuk perahu jenis *pakesan besar*; dan untuk perahu kecil jenis *pakesan kecil dan sampan (edher)* antara 4-6 orang. Sementara juragan pemilik kapal/perahu yang terdapat di desa Bandaran, tidak kurang dari 100 orang. Secara fungsional, para juragan pemilik kapal/perahu ini telah mampu mengoptimasi keberadaan sumber daya manusia setempat, dengan merekrut penduduk setempat antara 4-36 orang untuk tiga unit kapal/perahu sebagai tenaga-tenaga kerja efektif. Selain itu, dia juga telah melibatkan para penduduk setempat dalam suatu aliansi ekonomis di tingkat lokal untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam di laut lokal dan regional, yang dari itu mereka secara ekonomis telah memungkinkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomis dari hasil pembagian ikan yang menjadi haknya bagi pemenuhan kebutuhan hidup keseharian, perumahan, dan alat-alat pemuas kebutuhan “modern” lainnya.

Sekalipun posisi seorang juragan perahu bermakna penting bagi kehidupan seorang nelayan di desa Bandaran ini, namun dia tidak memiliki dan tidak

berkehendak untuk melakukan penguasaan yang bersifat monopoli terhadap para juragan kepala atau anggota nelayan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, sifat organisasi dan pola rekrutmen keanggotaan sebuah kelompok nelayan di tangan seorang juragan perahu bersifat longgar, tidak mengikat, kecuali dalam kasus seorang juragan kepala atau nelayan anggota kelompok perahunya memiliki ikatan hutang kepadanya. Bahkan dalam hal relasi jual-beli ikan pun, jarang ditemukan adanya “keharusan” bagi seorang juragan kepala atau nelayan anggota kelompoknya untuk menyerahkan atau menjual ikan bagian mereka kepada dirinya, yang justru dalam hal ini peran seorang bakul ikan lebih penting artinya.

Bakul ikan

Sebagaimana telah pula dikemukakan di atas, pelaku ekonomi kedua dalam aktivitas perkenomian di desa Bandaran adalah para bakul ikan yang menjadi “pemulung” dalam aktivitas jual-beli ikan di tingkat lokal. Bahkan, adanya kecenderungan masyarakat nelayan setempat untuk menyerahkan atau menjual sebagian terbesar ikan kepada mereka, menyebabkan para bakul ikan menjadi mata rantai terpenting dalam seluruh aktivitas perdagangan ikan di desa Bandaran. Walaupun dalam konteks yang sifatnya lebih terbatas, kuatnya relasi bisnis antara nelayan/juragan kepala dan nelayan dengan para bakul ikan, yang dalam banyak hal menyerupai “*patron-client relationship*”, telah menjadikan keberadaan dan peran para bakul ikan ini sebagai “...*stand guard over the crucial junctures or synopsis of relationships which connect the local system to the larger whole*” (Wolf, dalam de Jong, 1989).

Efektivitas dan efisiensi aktivitas jual-beli ikan dari para nelayan dan juragan kepala dapat lebih dimungkinkan dicapai, walaupun ada risiko terhadap kemungkinan memperoleh pendapatan yang relatif lebih rendah dari pendapatan yang mungkin bisa diperoleh apabila mereka memperdagangkannya langsung di pasar jalanan setempat atau ke pasar-pasar lokal di luar daerah. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah informan juragan kepala dan nelayan, sistem penjualan ikan melalui bakul ikan secara ekonomis lebih aman dan pasti.



Gambar 17: Sosok Para "Bakul Ikan" Desa Bandaran sedang Menjual Ikan di Pasar Lokal

Tengkulak ikan

adalah pelaku ekonomi ketiga dalam aktivitas ekonomi dalam masyarakat di desa Bandaran. Sungguhpun para tengkulak ikan ini hampir dapat dikatakan tidak memiliki relasi dagang secara langsung dengan juragan kepala dan nelayan setempat, namun keberadaan dan perannya sebagai pembeli dan sekaligus sebagai pemasar ikan setempat ke berbagai pasar lokal di luar daerah Bandaran, telah memungkinkan ikan-ikan hasil para nelayan setempat dikenal spesifikasinya di seluruh daerah Pamekasan dan Sampang. Nama "*jhuko' laok*" yang diberikan oleh para pembeli luar terhadap ikan hasil tangkapan nelayan desa Bandaran yang mereka temukan di sejumlah pasar lokal di luar Bandaran, tidak terlepas dari peran dan arti penting seorang tengkulak dalam matarantai perdagangan ikan dari daerah ini. Selain itu, banyaknya para peminat ikan desa Bandaran telah mampu meminimalisasi adanya surplus ikan di pasaran setempat karena sirkulasi ikan setempat menjadi lebih lancar. Hal mana berarti pula bahwa pendapatan para bakul ikan termasuk pula para juragan kepala dan nelayan secara ekonomis lebih pasti dan berpengharapan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pola kepemimpinan ekonomi di daerah Bandaran tersebut, walaupun pada sebagiannya ada yang bersifat "*patron-client relationship*", namun secara umum lebih bersifat "*collegialisme*" atau kemitraan kerja yang sejajar. Pemberian keamanan, kemudahan, kelancaran dalam melakukan aktivitas ekonomis dalam pola-pola hubungan jual-beli di antara nelayan, juragan, dan bakul ikan merupakan dasar pokok dari setiap kepemimpinan ekonomi yang dijalankan. Adanya pola yang demikian, tampaknya erat berkaitan dengan faktor-faktor penggerak ekonomi dan uang yang pada umumnya tidak berada di tangan ketiga pelaku ekonomi di atas, di samping disebabkan oleh kemampuan masyarakat nelayan setempat di dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang jumlahnya tidaklah terlalu besar, sebagaimana akan dijelaskan berikut.

Arisan dan Titip Uang

Dalam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan "investasi" uang, arisan dan titip uang merupakan gejala umum yang dipraktikkan hampir setiap penduduk nelayan di desa Bandaran, di samping hutang atau kredit.

Di muka telah disinggung, bahwa setidaknya-tidaknya setiap bulan para nelayan setempat memiliki kelebihan uang belanja harian sekitar Rp. 50.000,- -

Rp. 100.000,-, bahkan bisa lebih. Kelebihan uang belanja (*pesse belenjhe*) ini secara efektif mereka sertakan dalam kelompok-kelompok arisan yang “menjamur” di daerahnya (ada tidak kurang dari 20-an kelompok arisan). Pengambilan lotere dilakukan setiap bulan oleh *kepala arisan*. Jumlah perolehan arisan mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Keanggotaan para nelayan dalam kelompok arisan bisa lebih dari satu. Hasil uang yang mereka peroleh dari hasil arisan ini, mereka sertakan lagi dalam kelompok-kelompok arisan yang lain; sehingga yang bersangkutan bisa memperoleh modal untuk membuka usaha perdagangan kecil-kecilan (*pedagang kelontong*), membuat rumah²⁴⁾, menyelenggarakan lamaran dan pesta perkawinan²⁵⁾, naik haji²⁶⁾, dan atau

²⁴⁾ Apabila kita amati kondisi rumah mereka, umumnya hanya sebatas dibangun dan yang penting sudah dapat ditempati; kecuali bagi mereka yang secara ekonomi “mapan”. Hal ini disebabkan oleh pembangunan rumah-rumah penduduk setempat, sebagian terbesar dilakukan secara bertahap setiap kali mereka mendapatkan arisan. Bisa jadi perampungannya memakan waktu lebih dari lima tahun, karena uang hasil arisan tadi mereka gunakan untuk keperluan yang lain. Tidak jarang pula, untuk menambah modal bagi pembangunan rumahnya, mereka juga berhutang kepada para tetangganya yang kaya, pemilik toko emas, atau kepada kepala arisan, yang dicil setiap hari/bulan.

²⁵⁾ Bagi masyarakat nelayan desa Bandaran, lamaran dan pesta perkawinan merupakan aktivitas yang penuh diliputi oleh “motif-motif ekonomi” serta “prestise sosial. Mereka cenderung untuk menyelenggarakan perkawinan (*mantan*) anak perempuannya dalam sebuah pesta yang sangat mewah dan “boros”. Dalam sebuah pesta perkawinan mereka tidak saja menyewa perlengkapan panggung temanten (*kuade*) yang penuh dengan aksesoris mewah, beserta undangan dalam yang besar (hampir seluruh penduduk desa diundang); akan tetapi juga mengundang kelompok “*orkes dangdut*” dari kota Pamekasan untuk meramaikan acara, yang biayanya bisa mencapai 3 juta – 4 juta. Orkes tersebut sudah mulai dipasang sehari sebelum acara perhelatan, dan mulai manggung sejak pukul 20.00 hingga pukul 13.00 wib. Dalam acara ini, suasana desa sangat ramai, karena yang datang untuk menonton tidak hanya dari desa setempat, tetapi juga dari desa-desa yang berdekatan seperti Tanjung, Slabayan, dll. Pada kesempatan ini banyak pula pasangan muda-mudi yang lagi “pacaran”. Di sela-sela acara hingga setelah perhelatan selesai, di samping panggung atau di dalam rumah yang berhajat terdapat pesta minum-minum (*tok-otok*) oleh para pemuda yang berlangsung hingga dini hari. Para peserta “*tok-otok*” ini pun tidak lepas pula dari kewajiban memberikan “uang minum” kepada tuan rumah.

Untuk menyelenggarakan lamaran (*sere penang*) dan pesta perkawinan yang berkesan mewah, selain uangnya diperoleh dari hasil arisan, juga dari hasil penarikan “uang titipan”, “*peccodhan*”, dan hutang (*aotang*).; selain dari “uang minum” dari para peserta “*tok-otok*”.

“Uang titipan”, adalah uang yang ditarik oleh tuan rumah dari orang-orang yang pernah mereka sumbang atau “ditiipi uang” ketika yang bersangkutan juga menyelenggarakan lamaran dan pesta perkawinan serupa. Uang sumbangan yang berasal dari uang titipan tersebut dinamakan “uang titipan yang dilebihkan” (*pesse ompangan*). Sesuai dengan namanya, besarnya “*pesse ompangan*” tersebut lebih besar (*ngompange*) dari uang yang pernah disumbangkan sebelumnya (kelebihannya antara Rp. 5000,- hingga Rp. 10.000). Bagi setiap penduduk yang pernah mendapatkan sumbangan—yang pada dasarnya sebagai “uang titipan”—, maka dia ‘harus/wajib’ mengembalikan uang titipan tersebut dengan sedikit kelebihan uang sebagai balas jasa. Apabila yang bersangkutan tidak hadir dalam undangan, maka dia akan didatangi oleh tuan rumah untuk mengembalikan uang titipan tadi beserta uang tambahannya. Praktik ini terus berlanjut hingga uang titipan dan “*pesse ompangan*” tadi semakin lama jumlahnya semakin besar.

Selain dari “*pesse ompangan*”, keuangan tersebut juga mereka peroleh dengan cara menjalankan “*peccodhan*” (*dipecut*). Dalam hal ini tuan rumah mengundang para penduduk dan kenalannya dengan cara mengedarkan rokok kepada mereka, dengan harapan si penerima rokok tersebut dapat menghadiri

dibeli perahu/jaring kecil untuk melanggengkan matapencaharian mereka sebagai nelayan. Hal ini juga berlaku di kalangan para juragan pemilik kapal/perahu, dengan jumlah onset arisan yang lebih besar (Rp. 10 juta – 50 juta). Oleh karena itu pula, sejumlah juragan kapal/perahu tidak hanya memiliki lebih dari satu armada kapal/perahu besar yang berharga ratusan juta rupiah, tetapi mereka juga mampu mengembangkan bisnis lain seperti membuka toko, tetapi kebanyakan menginvestasikannya dengan membeli mobil-mobil penumpang (*colt diesel*) untuk usaha transportasi orang jurusan Pamekasan-Kamal; seperti yang dilakukan oleh H. Rahem, H. Sukardi, dan beberapa juragan kapal/perahu yang lain. Mereka bahkan bisa memiliki armada “angkutan penumpang” hingga empat buah mobil jenis “Colt”²⁷⁾.

Yang menarik di dalam kasus arisan ini, adalah seorang *kepala arisan* memiliki “hak istimewa” (*previllege*), yaitu bahwa dia memperoleh hak untuk mendapatkan hasil arisan untuk satu kali penarikan. Artinya, apabila jumlah anggota arisan sebanyak 20 orang yang berarti pula penarikan seharusnya dilakukan sebanyak 20 kali, namun jumlah penarikan tersebut tidak sebanyak jumlah anggota yaitu 20 kali, tetapi ditambah satu kali sebagai hak dari *kepala*

pesta perkawinan anaknya, beserta uang sumbangannya. Besar kecilnya sumbangan dalam sistem “*peccodhan*” ini tergantung pada jenis rokok yang diterima (Jarum, Gudang Garam, Dji Sam Soe, dll). Dalam sistem ini pun, pada akhirnya di antara mereka tercipta pula hubungan-hubungan ekonomis secara “*ompangan*”.

Berhutang (*aotang*) merupakan cara lain yang juga dilakukan untuk mendapatkan sejumlah modal untuk keperluan perhelatan. Hutang tersebut mereka peroleh bukan dari juragan perahu, tetapi pada para tetangga yang kaya, kepala arisan, dan pedagang emas, yang pengembaliannya dilakukan secara berangsur (*e kredit*) dari uang hasil penjualan ikan.

²⁶⁾ Pergi haji (*onggha hajji*) bagi seluruh masyarakat nelayan setempat—dan umumnya masyarakat Madura—, yang kaya atau miskin merupakan “obses”. Arisan bulanan dan “*arisan haji*” merupakan cara umum yang mereka lakukan untuk mendapatkan modal untuk ongkos naik haji. Kekurangannya, mereka tambah dari berhutang, atau menjual berbagai perhiasan simpanan yang mereka miliki. Bagi kebanyakan masyarakat setempat, pergi haji dan predikat sebagai “*pak aji*” selain bermakna religius, juga memiliki atribut-atribut sosial, untuk gengsi sosial; walaupun secara ekonomis, seorang yang pergi haji belum dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah “seorang kaya” (*reng sogi*). Tidak jarang ditemukan, kepergian mereka ke Mekkah kurang memperhitungkan seluruh pembiayaan yang seharusnya dipunyai, terutama biaya bagi sanak keluarga yang ditinggalkan, atau biaya pesta setelah datang haji untuk para tamu peziarah (*reng asajara*); yang jumlahnya juga cukup besar. Akibat kurangnya perhitungan ini, “lilitan hutang” setelah mereka kembali ke daerah bukan menjadi rahasia lagi di kalangan mereka.

²⁷⁾ sebagai ciri khas juragan pemilik mobil dari desa Bandaran, pengoperasian mobil angkutan penumpang, menerapkan sistem “*setoran*”. Jumlah setoran antara Rp. 7.000 – Rp. 8.000 per hari. Untuk memenuhi target uang setoran itu, para sopir minimal menarik penumpang jurusan Pamekasan – Kamal (PP) sebanyak dua kali. Dalam situasi demikian, tidak jarang para sopir harus memacu kendaraanya dalam kecepatan tinggi, berlomba dengan mobil-mobil penumpang lain sejenisnya yang jumlahnya sangat banyak untuk jurusan yang sama (belum termasuk bus) sekadar untuk mendapatkan jumlah penumpang yang banyak. Pengambilan penumpang selain dilakukan di terminal Pamekasan atau Kamal, juga dicari sepanjang jalan (*ngeslah*).

arisan; sehingga penerikannya menjadi 21kali. Konsekuensinya, jumlah pembayaran uang arisan oleh setiap anggota serta penarikan pun menjadi 21 kali. Pemberian hak untuk mendapatkan satu kali hasil arisan bagi *kepala arisan* tersebut, karena yang bersangkutan memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan penarikan uang setoran arisan setiap hari kepada seluruh anggota. Katakanlah, hak tadi semata-mata sebagai imbal jasa atas jerih payah seorang *kepala arisan* untuk mengumpulkan uang setoran para anggota yang dilakukannya setiap hari.; sehingga pada saat penarikan lotere seluruh uang sesuai dengan jumlah total sudah harus terkumpul padanya.

Selain itu, para anggota arisan yang telah beruntung mendapatkan arisan, juga tidak segera mengambil uang arisan yang menjadi haknya itu; tetapi “menitipkan uang” (*nyaba' pesse*) tersebut kepada *kepala arisan*. Selanjutnya, “uang titipan” tersebut oleh *kepala arisan* tadi diputar kembali bagi orang-orang yang membutuhkan modal atau tambahan modal usaha dengan mengenakan “bunga pinjaman” kepada si peminjam. Sementara, anggota arisan yang menitipkan uang tersebut pun memperoleh “bunga” dari sebagian bunga yang telah diperoleh *kepala arisan* tadi (biasanya 3%). Dengan demikian, *kepala arisan* dan anggota arisan yang menitipkan uang tersebut sama-sama mendapatkan tambahan uang. *Kepala arisan* selain mendapatkan hak keuangan arisan, juga memperoleh bunga--sekitar 5%--dari uang titip anggotanya yang dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan; sementara si anggota arisan pun selain masih tetap memiliki uang hasil arisan, juga masih memperoleh tambahan uang dari uang yang dititipkan kepada *kepala arisan*. Sungguh suatu sikap dan prinsip ekonomi yang ulet dan bijak.

Kemungkinan masyarakat nelayan di desa Bandaran melakukan “investasi” uang dalam bentuk “arisan” dan “titip uang” tersebut, banyak dilatarbelakangi oleh sikap hidup mereka yang sederhana, semampunya, dan tidak terlalu konsumtif. Hampir tidak ditemukan di dalam masyarakat nelayan di Bandaran, yang membelanjakan uang mereka untuk barang-barang bagi kepentingan “pamer” atau “gengsi sosial”. Kalaupun mereka tidak menyertakan uang dalam arisan, mereka cenderung menginvestasikan dalam bentuk barang-barang berharga, seperti emas. Bahkan dari seorang guru yang mengajar di SD setempat, diperoleh informasi bahwa uang tersebut mereka berikan kepada anak-anak mereka untuk ditabung di sekolahnya, yang setiap harinya berkisar antara Rp. 5.000,- - Rp. 10.000,- per anak. Namun, kebiasaan untuk menyimpan di

sekolah ini, sekarang telah ditiadakan, karena pernah terjadi kasus bahwa guru yang memegang uang tabungan siswa tersebut tidak dapat mengembalikan uang simpanan mereka--yang jumlahnya setiap anak dapat mencapai jutaan rupiah selama setahun masa penabungan--karena dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi guru tadi.

Hutang dan Kredit

Hutang sebagai salah satu karakteristik perekonomian desa tradisional, dalam banyak hal hampir selalu tidak menguntungkan secara ekonomis bagi si penghutang atau peminjam kredit. Hal ini tampaknya kurang disadari oleh masyarakat nelayan tradisional di desa Bandara; sehingga hingga kini pun masyarakat setempat masih banyak terlibat dalam praktik hutang dan kredit, selain menggabungkan diri ke dalam kelompok-kelompok arisan yang menjamur di desa Bandaran, sebagaimana telah dibicarakan di atas.

Hutang (*otang*) atau kredit (*ngredit*) yang dilakukan oleh masyarakat nelayan setempat, umumnya tidak dalam kerangka hubungan kerja antara nelayan dan juragan. Hutang atau permintaan kredit biasanya dilakukan oleh para nelayan kepada orang-orang kaya (*oreng sogi*) tetangga-tetangga mereka sendiri yang sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dengan dirinya. Bahkan, mereka lebih sering meminjam uang kepada *kepala-kepala arisan* yang banyak memegang uang-uang titipan para anggotanya, dengan imbalan berupa bunga yang besarnya sekitar 5% perbulan, tergantung pada besarnya jumlah hutang/kredit.

Orang yang juga banyak memberikan hutang atau kredit kepada para nelayan adalah para bakul ikan, yang pembayarannya biasanya dilakukan setelah mereka mendapatkan hasil ikan. Dalam kasus hubungan hutang-piutang atau kredit antara nelayan dan bakul ikan ini, seorang nelayan hampir tidak melakukan pembayaran dalam bentuk penyerahan ikan kepada bakul dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh bakul. Hutang uang tetap dibayar dengan uang, yang diberikan dari hasil penjualan ikan mereka. Kalaupun para nelayan tadi seakan terikat akad jual-beli ikan dengan bakul, hal tersebut karena bakul telah memberikan "uang perangsang" dan barang-barang perangsang lain, tanpa mempengaruhi penetapan harga ikan yang dijual atau diserahkan kepada bakul. Dalam hal ini, tidak terjadi praktik *ijon* dari para bakul terhadap nelayan yang menjadi *kliemnya*, di mana harga jual ikan dari nelayan tersebut ditetapkan sebelumnya dan di bawah harga pasar. Harga jual ikan dari bakul tetap mengikuti

harga pasar. Kalaupun nelayan tadi menerima uang penjualan ikannya di bawah harga jual yang secara riil diterima oleh bakul, namun hal tersebut lebih merupakan sebagai "komisi" atau "uang jasa" yang mereka anggap wajar atas kerjanya menjual ikan nelayan tersebut. Itupun jumlahnya hanya berkisar antara Rp. 5.000 – Rp. 1000,-. Dengan perkataan lain, permintaan hutang atau kredit dari seorang nelayan kepada para bakul *patronnya*, lebih dimaksudkan sebagai upaya dari kedua belah pihak untuk memelihara hubungan perdagangan, sehingga keduanya sama-sama mendapatkan manfaat.

Keterlibatan masyarakat nelayan setempat dalam praktik hutang-piutang atau kredit, tampaknya banyak disebabkan oleh sikap hidup mereka yang "kurang menjangkau masa depan". "Apa yang diperoleh sekarang, habiskan sekarang juga. Besok cari lagi" (*ollena lako/ora' pabali ka lako/ora', lagguna nyare pole*). Sikap hidup ini, juga berlaku bagi penduduk Desa Bandaran di kampung Montor dan Nagger yang bermatapencarian sebagai petani. Berhemat, menabung atau melakukan investasi uang dan barang untuk pengembangan usaha lain maupun untuk kebutuhan masa depan²⁸⁾, hampir-hampir tidak dimiliki oleh sebagian terbesar masyarakat, kecuali para pemilik modal dan pedagang besar. Namun demikian, sikap hidup mereka tidak dapat dikatakan sebagai sikap hidup "boros", tetapi lebih dikarenakan mereka ingin segera memuaskan kebutuhan fisik, psikologis dan "sosialnya" setelah mereka berjerih-payah seharian atau sehari-semalam menangkap ikan; sementara mereka pun tidak perlu investasi untuk ikan di laut, sebagaimana layaknya mereka yang hidup dari pertanian.

Hutang atau kredit yang mereka peroleh pun, pada umumnya tidak diinvestasikan untuk menambah modal usaha; tetapi untuk kebutuhan "habis pakai", seperti membangun rumah, lamaran dan pesta perkawinan seperti telah dijelaskan di atas; juga untuk membeli peralatan rumah tangga, atau barang-barang berharga seperti perhiasan emas (kalung, gelang, cincin) terutama ketika akan menjelang lebaran²⁹⁾.

²⁸⁾ Landasan eksistensi "masyarakat desa prakapitalis", yang oleh Boeke (1983: 22) ditegaskan atas dasar sikap hidup "hemat, ingat (masa depan =pen), dan istirahat (menikmati masa tua)" tampaknya juga tidak berlaku bagi masyarakat nelayan tradisional di desa Bandaran. Lihat pula catatan kaki no. 14 di atas.

²⁹⁾ "Menghadapi lebaran" (*para' tellasan*), merupakan saat yang "sarat hutang/kredit". Pada waktu itu, setiap orang/keluarga berlomba untuk memenuhi kebutuhan lebaran; yang untuk itu banyak orang berhutang. Bahkan, tidak jarang pula barang-barang rumah tangga (seperti gelas, sendok, piring) mereka "gadaikan" (*epagadhi*) sekadar mendapatkan uang menyambut "hari lebaran" (*are tellasan*). Setelah usai lebaran, barang-barang tersebut mereka tebus kembali (*etebbhus*). Oleh karena penggadaian dan/atau pengambilan kembali barang-barang ini sebagian orang tidak melakukan sendiri, tetapi dengan bantuan perantara (*tokang gadhi*), maka untuk dia pun mereka harus mengeluarkan "uang komisi" (*persenan*).

Dengan adanya “lembaga-lembaga keuangan informal” dan sistem “kuasi investasi” semacam itu, praktis keberadaan Bank, Koperasi Desa, dan semacamnya tidak banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Di satu pihak, sungguhpun apabila masyarakat setempat dapat memberdayakan keberadaan lembaga-lembaga keuangan resmi untuk kepentingan investasi secara ekonomis lebih menjanjikan, kesederhanaan pemikiran ekonomi mereka, dan ketidakinginan mereka terhadap hal-hal yang bersifat prosedural; akan tetapi di lain pihak, hal tersebut telah memungkinkan struktur ekonomi di desa mereka dapat dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan ekonomi lokal atau secara “berswasembada”.

Uang tebusan tersebut diambilkan dari uang hasil penjualan perhiasan emas yang telah mereka beli sebelum lebaran, yang dijual dengan “harga mundur” (*ejual nyorof*) setelah lebaran usai. Dalam kondisi inilah, banyak para nelayan setempat yang memiliki hutang bertapis-lapis dan kepada banyak orang. Untuk menebus barang yang digadaikan, untuk mengembalikan hutang keperluan membeli emas, dan lain-lain.

BAB V PENUTUP

Pemikiran yang hendak dikembangkan melalui deskripsi dan analisa di dalam studi ini adalah bahwa konteks dan aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat setempat secara *resiprokal* berkaitan/berpengaruh pada aktivitas penangkapan ikan serta pengembangan struktur perekonomian pada masyarakat desa tradisional; setidaknya pada latar masyarakat nelayan tradisional di desa Bandaran Kabupaten Pamekasan.

Sebagaimana telah ditunjukkan oleh studi ini, nelayan (*majheng*), sebagai aktivitas ekonomi utama masyarakat desa pesisiran tradisional di desa Bandaran Madura; seperti halnya aktivitas-aktivitas perekonomian lainnya, tumbuh dan berkembang secara timbal-balik dengan aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat setempat; baik dilihat dari sistem penangkapan ikan yang digunakan; organisasi dan pola kerjasama antar-nelayan; hubungan-hubungan ekonomi dalam praktik perdagangan ikan di antara nelayan-bakul-tengkulak ikan; maupun keterlibatan para pelaku ekonomi lokal dalam pengembangan struktur ekonomi di tingkat lokal.

Penggunaan jenis perahu yang lebih lincah, bermuatan besar, dengan jaring berukuran panjang, serta didukung oleh penggunaan mesin berkekuatan besar tidak lain sebagai upaya yang bersifat ekonomis dari mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak; dan secara sosial dimaksudkan agar mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih lebih banyak. Pada sisi lain, pemikiran, sikap dan tindakan mereka untuk tetap berpijak pada tradisi pun masih juga dipertahankan. Seorang kyai (*keae*) tetap menjadi *referensi ekonomi-religius* mereka, untuk memberikan keyakinan dan kemantapan dalam setiap aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan; dan pada saat yang bersamaan mencari referensi-referensi ekonomi lain yang bersifat *profan* seperti pedagang, pemilik perahu, bakul dan tengkulak ikan, serta kepala arisan yang tumbuh sejalan dengan kepentingan mereka untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang semakin tinggi.

Sebagai sebuah organisasi kelompok nelayan, pola relasi kerja baik antara *jrghan perahu*, *jragan kepala* dan *phandiga*, atau antar anggota nelayan sendiri, bukan terjadi dalam kerangka hubungan kerja antara “atasan” dan “bawahan” yang bersifat “hubungan pengabdian”, tetapi lebih bersifat “kolegialisme” dan “kekeluargaan”, sekalipun terdapat klasifikasi di antara mereka sesuai dengan

spesifikasi kerja masing-masing. Hubungan di antara mereka pun sangat longgar, terbuka, suka-hati dan didasarkan atas “kesertaan secara sukarela”; tetapi dalam kasus-kasus tertentu bahkan seorang juragan pemilik perahu harus merekrut keanggotaan nelayannya dengan “cara membeli”, menunjukkan betapa faktor-faktor sosial dan budaya bercampur baur dengan faktor-faktor ekonomi.

Munculnya pelaku-pelaku ekonomi lokal (juragan, bakul dan tengkulak ikan) dalam relasi perdagangan ikan, tidak saja memiliki arti penting bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi para nelayan yang menjadi “kliennya”, tetapi di lain pihak juga telah menciptakan hubungan “patron-klien” yang cenderung melahirkan “ketergantungan ekonomis” bagi umumnya para nelayan. Kecenderungan ini pada dasarnya bukanlah karena alasan-alasan ekonomis semata (untuk mendapatkan hutang atau kredit), tetapi lebih disebabkan karena para nelayan ingin segera menikmati hasil kerjanya, dan tidak mau direpotkan dengan hal-hal yang *jlimet*, yang bersifat sosial-budaya.

Selain itu, seandainya Bank, Koperasi Desa, dan semacamnya dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat secara efektif untuk kepentingan pemupukan dan investasi modal, maka tentunya secara ekonomis dapat lebih menjanjikan. Akan tetapi, kesederhanan pemikiran ekonomi mereka, dan ketidakinginan mereka terhadap hal-hal yang bersifat prosedural, telah menciptakan sebuah sistem pengelolaan uang dan modal dalam “lembaga-lembaga keuangan informal” yang bersifat “kuasi investasi” seperti arisan dan titip uang yang menjadi kecenderungan umum di kalangan masyarakat nelayan. Hal ini sebenarnya tidak lain sebagai sikap mereka untuk mendapatkan dan “menginvestasikan” uang dalam jumlah yang lebih besar, walaupun dengan laba dan/atau risiko kecil, sehingga secara sosial, budaya, dan ekonomi mereka tidak dianggap sebagai “miskin”.

Hal-hal di atas merupakan sejumlah karakteristik terpenting dari masyarakat desa nelayan tradisional di desa Bandaran, namun juga justru yang telah memungkinkan struktur ekonomi di desa mereka dapat dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan ekonomi lokal atau secara “berswasembada”.

Berbagai bentuk dan pola perilaku ekonomi masyarakat nelayan di atas, tidak lain sebagai upaya (*ikhtiar*) mereka untuk senantiasa dapat mempertahankan hidup sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial, budaya, sekaligus ekonomi yang senantiasa berubah ke arah yang lebih “modern” dan “praktis”, tetapi senantiasa bergerak dalam kerangka sebuah tradisi.

Sosok “nelayan tradisional” Madura di desa Bandaran, seperti nelayan-nelayan yang lain, yang kurang memiliki orientasi ke masa depan, atau hal-hal yang “*jlimet*” lainnya, terkait erat dengan sikap mereka yang memandang bahwa “bekerja adalah sekedar untuk hidup” (*alako reya kaangguy odhi*). Apa yang diperoleh sekarang gunakan untuk hari ini, besok kerja lagi (*sateya sateya, lagghu' lagghu*). Berhemat dan berinvestasi belum menjadi budaya umumnya masyarakat nelayan Bandaran. Kesertaan mereka dalam arisan, titip uang, kredit dan hutang untuk keperluan lamaran, kemewahan perhelatan perkawinan, atau untuk membeli perangkat rumah tangga dan persiapan lebaran, yang menjadi kecenderungan umum di kalangan mereka, selain dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomis, sekaligus nilai-nilai sosial dan budaya.

Dengan sikap hidup demikian, kerja keras adalah “tradisi”; tiada hari tanpa kerja adalah “motto” hidup keseharian masyarakat nelayan tradisional Desa Bandaran. Siang, sore, ataupun malam hari merupakan hari-hari kerja bagi mereka. Masa-masa beristirahat mereka kenal hanya ketika tidak musim ikan (*mosem tera'an*), atau ketika musim angin barat (*angen bharat*) dan angin timur (*angen slabhung*) yang merupakan musim “paceklik” (*mosem laep*) bagi kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman., (1977). "Sekelumit cara mengenal masyarakat madura": *Madura I. Proyek Penelitian Madura*. Malang: Depdikbud (dalam rangka kerjasama Indonesia-Belanda).
- Akhmad Khusyairi, (1989). "Agama, orientasi politik, dan kepemimpinan lokal di antara orang-orang madura di lumajang". Huub de Jonge (ed.). *Agama, kebudayaan dan ekonomi*. Jakarta: Grafitti Press.
- Boeke, J.H., (1983). *Prakapitalisme di asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bogdan, R. & Biklen, Sari K. (1992). *Riset kualitatif untuk pendidikan: Pengantar ke teori dan metode*. Alih bahasa Munandir. Jakarta: PAU-UT.
- Bogdan, R. & Steven J. Taylor. (1993). *Kualitatif: dasar-dasar penelitian*, Alih bahasa A. Khosin Afandi. Jakarta: Usaha Nasional.
- Bouvier, Helene., (1989). "Musik dan seni pertunjukan di kabupaten sumenep". Huub de Jonge (ed.). *Agama, kebudayaan dan ekonomi*. Jakarta: Grafitti Press.
- Burger, D.H & (1980). *Sejarah sosiologis-ekonomis indonesia*. Jakarta: Prajnyaparamita.
- Castles, Lance. (1982). *Tingkah laku agama, politik, dan ekonomi di jawa: Industri Rokok Kudus*. Jakarta: Sinar Harapan.
- de Jonge, Huub. (1977). "Some thought on enterpreneur in a maduranese country": *Madura I. Proyek Penelitian Madura*. Malang: Depdikbud (dalam rangka kerjasama Indonesia-Belanda).
- _____ (1989a). *Madura dalam empat zaman: Pedagang, perkembangan ekonomi, dan islam (suatu studi antropologi ekonomi)*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- _____ (1989b). "Perkembangan ekonomi dan islamisasi di madura": de Jonge, Huub (eds): *Agama, kebudayaan dan ekonomi*. Jakarta: Grafitti Press.
- _____ (1989c), *Hubungan Ketergantungan dalam Perikanan di Madura*: de Jonge, Huub (eds): *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi*. Jakarta: Grafitti Press.
- Dewey, Alice G., (1962). *Peasant marketing in java*. Glencoe, III.
- Djojomartono, Muljono. (1985). "Adat-istiadat sekitar kelahiran pada masyarakat nelayan di madura"; Koentjaraningrat (eds): *Ritus peralihan di indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Geertz, C., (1956). *Religious belief and economic behavior in a central javanese town: Some preliminary considerations: Economic development and cultural change*.
- _____ (1963). *Peddlers and Princes*. Chicago.

- Geertz, H., (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Alih bahasa A. Rahman Zainuddin. Jakarta: YIIS dan FIS-UI.
- Koentjaraningrat, (1969). *Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. (eds) (1983). *Masyarakat Desa Indonesia*. Jakarta: Yayasan BPFE-UI.
- _____. (1985). "Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia". Sajogyo & Sajogyo, Pudjiwati. *Sosiologi Pedesaan*. Jilid. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuntowijoyo. (1980). *Social Change in an Agrarian Society*. Disertasi. New York: Columbia University.
- _____. (1993). *Radikalisasi petani: Essei-essei sejarah*. Jakarta: PT. Benteng Intervisi Utama.
- Leunissen, Jef., (1989). "Pertanian rakyat di madura": De Jonge, Huub (eds): *Agama, kebudayaan dan ekonomi*. Jakarta: Grafitti Press.
- Leur, J.C. van., (1967). *Indonesian trade and society: Essays in asian social and economic history*. The Hague and Bandung.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G., (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hill California: Sage Publications.
- McVey, Ruth T., ed., (1963). *Indonesia*. New Haven.
- Moleong, Lexy J. (1986). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: P2TK, Depdikbud.
- Munir, Mochammad., (1985). "Adat-istiadat yang berhubungan dengan upacara dan ritus kematian di madura: Koentjaraningrat (eds): *Ritus peralihan di indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Nasution, S. (1992). *Metode penelitian naturalistik-kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Niel Mulder. (1984a). *Kebatinan dan hidup sehari-hari orang jawa: Kelangsungan dan perubahan kulturil*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. (1984b). *Kepribadian jawa dan pembangunan nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pospoprodjo, W., (1987). *Subyektivitas dalam historiografi*. Jakarta: CV. Remadja Karya.
- Ritzer, g. (1992). *The Classical sociological theory*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Schrieke, B., (1955-1957). *Indonesian sociological studies*. 2 jilid. The Hague/Bandung: Van Hoeve.
- Selosoemardjan., (1984). *Perubahan sosial di yogyakarta*. Jakarta: YIIS-Gadjah Mada University Press.

- Shochib. (1997). *Pola asuh orang tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin-diri*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Silverman, David. (1995). *Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction*. London: SAGE Publications.
- Smith, Glenn., (1989). "Pentingnya sapi dalam masyarakat madura". Huub de Jonge (ed.). *Agama, kebudayaan dan ekonomi*. Jakarta: Grafitti Press.
- Touwen-Bouwsma, (1989a). "Kepala desa madura: Dari boneka ke wiraswasta". Huub de Jonge (ed.). *Agama, kebudayaan dan ekonomi*. Jakarta: Grafitti Press.
- _____. (1989b). "Kekerasan di masyarakat madura". Huub de Jonge (ed.). *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi*. Jakarta: Grafitti Press.
- Wertheim, W.F. (1959). *Indonesian society in transition*. 2nd rev., ed., The Hague and Bandung.
- Wolf. E.R. (1956). "Aspects of group relations in a complex society: Mexico", *American Antropologist* 58: 1065-78.